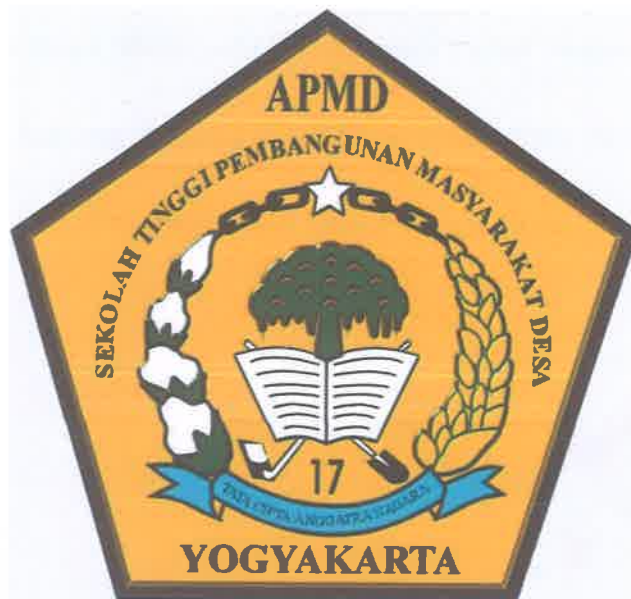


***POLITICAL WILL* PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
WISATA TAMAN ANGGREK HITAM**

(Penelitian di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah)

SKRIPSI



Disusun oleh:

DANIEL SETIADI

19520131

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



***POLITICAL WILL* PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
WISATA TAMAN ANGGREK HITAM
(Penelitian di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Meperoleh Gelar

Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

DANIEL SETIADI

19520131

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 9 Mei 2025

Jam : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Dosen Pembimbing

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping I

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping II

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Daniel Setiadi

NIM : 19520131

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Political Will* Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam (Penelitian di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Mei 2025




Daniel Setiadi

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Daniel Setiadi
NIM : 19520131
Telp : 082154553893
Email : danielsetiadi01@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengasli-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Political Will Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam (Penelitian di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah)”**.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk **juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 Mei 2025




Daniel Setiadi
19520131

MOTTO

“Karna masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“Lalu katanya kepadaku: ‘Jangan lah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu”

(Daniel 10:12)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan, dan tuntunan-Nya selama ini, sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, dukungan, kekuatan, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, semangat, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, terutama:

Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Bapak Sabdi Harmid dan Ibu Denita, yang telah mendidik saya dengan baik dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas cinta, doa, dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk saya, atas kerja keras dan usaha Bapak dan Ibu dalam memenuhi setiap kebutuhan saya. Terima kasih juga karena telah menjadi panutan terbaik bagi saya. Meskipun skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya, saya sangat bersyukur atas semua dukungan dan semangat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan pernyataan serta anungrah-Nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“POLITICAL WILL PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA TAMAN ANGGREK HITAM” (Penelitian di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan, serta saran yang berguna. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak bekerja sendiri. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses, belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen Penguji 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen Penguji 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan serta kritik saran perubahan yang membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh Pendidikan di “APMD” Yogyakarta.
8. Bapak Meiyanto selaku Kepala Desa di Desa Siong beserta Aparat Desa yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama penulis melaksanakan penelitian.
9. Bapak Raedy Andrang, Ibu Dina Mariana, Ibu Ibu Nadilla, Ibu Setyoningsih dan Bapak Derman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tritonga dan Rianita Septi yang telah bersedia menjawab pertanyaan saya saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Penulis



Daniel Setiadi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH. v	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
INTISARI	xvi
<i>SUMMARY</i>.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Literatur Review.....	10
G. Kerangka Konseptual	16
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis penelitian.....	27
2. Unit Analisis	28

3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisis Data.....	34
BAB II GAMBARAN UMUM DAN WISATA TAMAN ANGGREK HITAM	
DESA SIONG	41
A. Sejarah Desa Siong	41
B. Kondisi Geografis Desa Siong	42
C. Kondisi Demografis Desa Siong	43
D. Kondisi kesehatan masyarakat Desa Siong.....	45
E. Pendidikan.....	46
F. Mata pencaharian	47
G. Agama	48
H. Budaya.....	48
I. Kondisi Ekonomi Desa Siong	50
J. Kondisi Infrastruktur Desa.....	50
K. Pembagian Wilayah Desa	52
L. Pemerintah Desa Siong dan Struktur Organisasi Pemerintah	52
M. Profil Taman Anggrek Desa Siong.....	55
BAB III <i>POLITICAL WILL</i> PEMERINTAH DESA DALAM	
PENGEMBANGAN WISATA TAMAN ANGGREK HITAM.....	65
A. Ketersediaan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Taman Anggrek Hitam.....	65
B. Komitmen Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata.....	80
C. Tindakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata	91
BAB IV PENUTUP	133
KESIMPULAN.....	133
SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA	137

LAMPIRAN.....	141
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Narasumber Penelitian	28
Tabel 2. 1 Urutan Pejabat Kepala Desa Sampai Dengan Tahun 2024.....	40
Tabel 2. 2 Sejarah Pembangunan Desa	41
Tabel 2. 3 Batas Desa Siong	41
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	43
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan...	45
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	46
Tabel 2. 7 Kelembagaan dan Organisasi Data Desa Siong 2017	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	53
Gambar 2. 2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Desa Siong	44
--	----

INTISARI

Penelitian ini menganalisis tentang *political will* Pemerintah Desa Siong dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam di Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini menganalisis pendekatan *governing* pada *Political will* pemerintah Desa Siong yang berbentuk kesediaan, komitmen, dan tindakan yang diambil dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Taman Anggrek Hitam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir taman ini mengalami penurunan aktivitas hingga nyaris tidak difungsikan secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah 1) kepala desa; 2) sekretaris desa; 3) kepala urusan umum desa; 4) kepala seksi pemberdayaan; 5) karang taruna; 6) masyarakat lokal. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Desa Siong telah menunjukkan indikasi kesediaan, komitmen, dan tindakan dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam, ketiganya belum diwujudkan secara nyata dan belum memenuhi indikator *political will* yang kuat. Komitmen yang ada hanya sebatas pembicaraan tanpa realisasi kebijakan, program, atau dampak langsung terhadap taman. Tidak ditemukan bukti empiris yang mendukung adanya kesungguhan dalam pelaksanaan program wisata, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun aktivitas lapangan. Ketika dilakukan observasi, taman anggrek dalam kondisi mati suri tidak ada aktivitas, perawatan, atau intervensi aktif dari pemerintah desa. Hal ini mencerminkan *political will* pemerintah desa yang masih lemah, kehendak politik yang seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan wisata berbasis potensi lokal di Desa Siong.

Kata Kunci : *Political Will, Pengembangan Wisata, Governing, Komitmen*

SUMMARY

This study analyzes the political will of the Siong Village Government in developing tourism at the Black Orchid Park in Paju Epat District, East Barito Regency. This study analyzes the governing political will approach of the Siong Village Government in the form of willingness, commitment, and actions taken in developing the potential of the tourism sector based on natural resources and biodiversity owned by the Black Orchid Park. However, in recent years this park has experienced a decline in activity to the point where it is almost not functioning optimally.

This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The sources in this study were 1) the village head; 2) the village secretary; 3) the head of the village's general affairs; 4) the head of the empowerment section; 5) youth organizations; 6) local communities. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that although the Siong Village Government has shown indications of willingness, commitment, and action in developing Black Orchid Park tourism, all three have not been realized in real terms and have not met the strong political will indicators. The existing commitment is only limited to talk without the realization of policies, programs, or direct impacts on the park. There is no empirical evidence to support the seriousness in implementing tourism programs, either in terms of regulation, funding, or field activities. When observations were made, the orchid park was in a state of suspended animation with no activity, maintenance, or active intervention from the village government. This reflects the weak political will of the village government, a political will that should be the main driver of local potential based tourism development in Siong Village.

Keywords: Political Will, Tourism Development, Governing, Commitment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang turut serta berperan penting dalam peningkatan pendapatan negara. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang masih dijunjung tinggi, sehingga memiliki potensi besar dan perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, sektor pariwisata seharusnya harus diperhatikan lebih karena dianggap sangat menguntungkan dan sangat berpeluang besar bisa menjadi aset yang menjadi andalan perolehan devisa bagi bangsa dan negara ini. Industri pariwisata itu memang salah satu sektor yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pariwisata sendiri telah menempati urutan ketiga terbesar sebagai kontributor devisa nasional setelah ekspor minyak kelapa sawit dan Batubara. Pemerintah pun terus berusaha mengembangkan kebijakan pengelolaan sektor pariwisata agar bisa berdaya saing dalam kancah internasional.

Pada Tahun 2023, prospek sektor pariwisata semakin meningkat. Pariwisata domestik terus-terusan merangkak naik, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 825,80 juta perjalanan atau naik 12,37 persen dibanding tahun 2022. Saat ini pariwisata dalam negeri dianggap sebagai kontributor utama untuk memperkuat pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara diikuti per perjalanan meningkat pada tahun 2023. Rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara dalam satu perjalanan sebesar 2,57 juta rupiah atau naik 5,36 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Perjalanan wisata ini didominasi oleh wisatawan generasi millennial yang berkisar pada umur 25 sampai 45 tahun. Wisata ini sebagian besar untuk berlibur saja dan rekreasi mengunjungi kerabat atau keluarga. Perjalanan ini dominan dilakukan oleh masyarakat laki-laki tetapi pada proporsinya, wisatawan perempuan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pulau Jawa masih menjadi kontribusi utama pada jumlah perjalanan baik sebagai daerah

asal maupun sebagai daerah tujuan, terutama pada hari liburan, hari besar dan hari besar keagamaan.

Mengembangkan wisata desa memiliki banyak manfaat yaitu, dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk penduduk setempat. Wisatawan yang datang ke desa akan mencari akomodasi, makanan, transportasi, dan adat istiadat lokal yang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal. Ketika desa menjadi tujuan wisata, penduduk desa akan lebih terdorong untuk melestarikan adat istiadat mereka agar tetap menarik bagi wisatawan. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman langsung dengan budaya lokal. Pengembangan wisata desa dapat memperkenalkan pengunjung kepada kehidupan pedesaan yang autentik. Banyak wisatawan yang telah dengan keramaian kota dan mencari tempat yang tenang dan damai. Desa-desa tradisional dengan alam yang indah dan kehidupan yang sederhana dapat menjadi pilihan yang menarik bagi mereka. Menurut Richard Sihite dalam Marpaung & Bahar (2000), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan seseorang dalam waktu sementara, yang melibatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, setelah melalui tahap perencanaan. Tujuan dari perjalanan ini bukan untuk bekerja atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, melainkan untuk menikmati kegiatan rekreasi atau bertamasya, serta untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau keinginan. Dengan demikian, pariwisata dapat dipahami sebagai kegiatan yang bersifat sementara dan tidak menetap.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui pemanfaatan dan pengembangan industri pariwisata secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengembangkan berbagai produk dan layanan yang berkaitan dengan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, pemerintah semakin gencar melakukan investasi dalam pengembangan desa wisata dengan berbagai tujuan strategis, seperti meningkatkan pemasukan devisa, memperkuat ekonomi lokal, menambah pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, mendorong pemberdayaan

ekonomi masyarakat, membuka peluang bagi pertumbuhan sektor usaha, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pengembangan destinasi wisata ini mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan wilayah di sekitarnya.

Berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha. Pembangunan sektor pariwisata dilandasi oleh sejumlah asas penting, seperti asas manfaat, kebersamaan, keadilan dan pemerataan, keseimbangan, kemandirian, pelestarian, partisipasi, keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, serta persatuan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata, yang dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga dan mengangkat keberagaman, keunikan, serta kekhasan budaya dan potensi alam suatu daerah.

Dengan memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan tersebut, pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, pariwisata ini merupakan suatu proses perjalanan sementara yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang menuju suatu tempat di luar tempat tinggal asli mereka. Keberangkatan ini didorong oleh berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, dan kesehatan. Istilah pariwisata sendiri sangat terkait dengan konsep perjalanan wisata, yang mengacu pada perubahan sementara tempat tinggal seseorang di luar tempat tinggal asalnya dengan tujuan tertentu, tanpa ada niat untuk mencari nafkah atau menghasilkan upah. Dengan kata lain, perjalanan wisata adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh kenikmatan, serta memenuhi rasa ingin tahu atau hasrat untuk menjelajahi hal-hal baru. Meskipun ada aspek-aspek dalam pariwisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal pengelolaan, pengembangan sejumlah destinasi wisata kini telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013-2028. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan nasional sekaligus menjadi elemen penting dari pembangunan pariwisata nasional. Potensi wisata baik yang dimiliki berupa daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya fasilitas pariwisata, industri jasa pariwisata dan lainnya merupakan aset utama dalam mendorong pertumbuhan pariwisata di Kalimantan Tengah. Kepariwisata mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan wisata, termasuk perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, hingga pengawasannya, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Pengembangan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi asas manfaat, kekeluargaan, keadilan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, pelestarian lingkungan, partisipasi aktif, keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, serta kesatuan.

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pembangunan pariwisata di berbagai daerah, meskipun sebagian besar wewenang tersebut telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, daerah otonom diharapkan dapat mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pariwisata, termasuk dalam menentukan apa yang akan dikembangkan, di mana, dan bagaimana cara pengembangannya, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang lebih luas. Daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, tetapi dapat segera mengambil langkah-langkah untuk menentukan apakah sektor pariwisata memang diinginkan dan dibutuhkan di daerah mereka. Meskipun demikian, pembangunan pariwisata nasional tetap memerlukan arahan dan koordinasi yang jelas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya percepatan pembangunan, pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, termasuk

mengembangkan potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah memiliki otoritas untuk memprioritaskan pengembangan objek wisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu bentuk investasi strategis yang menjanjikan di masa depan. Dalam pengelolaannya, pemerintah juga berupaya menciptakan persepsi positif di kalangan wisatawan, khususnya dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kenyamanan, sehingga mampu memperkuat daya tarik destinasi wisata tersebut. Lebih dari sekadar meningkatkan pemasukan negara atau daerah, pembangunan pariwisata juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan pemberdayaan komunitas sekitar kawasan wisata. Oleh karena itu, penanganan dan pengelolaan objek wisata yang melibatkan peningkatan sumber daya manusia secara konsisten, menyeluruh, terpadu dan sistematis sangat penting dilakukan pemerintah. Keberhasilan strategi pengembangan dan pengelolaan pariwisata sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan kerjasama yang harmonis serta mewujudkan prinsip *sapta pesona*. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hanya dapat terwujud apabila proses pencapaiannya dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik dan terorganisir. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengusaha lokal di sektor pariwisata. Ini dapat dilakukan dengan membantu pengusaha lokal dalam mengatasi hambatan, seperti perizinan, regulasi, dan akses ke pasar. Dengan adanya lingkungan usaha yang kondusif, dapat mendukung pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan memberikan dampak positif dan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Dalam pengembangan desa wisata, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat memegang peran yang sangat krusial dan saling melengkapi. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan

pembangunan sektor ini, karena masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam prosesnya. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dapat dilihat dari capaian hasil, manfaat yang dirasakan langsung oleh warga, serta dampak positif jangka panjang yang ditimbulkannya. Untuk menggali dan memaksimalkan potensi desa, partisipasi masyarakat menjadi hal yang tidak terelakkan. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan pariwisata, baik dari segi perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan hasilnya. Sinergi yang harmonis antara pemerintah desa dan warga menjadi fondasi utama tercapainya tujuan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Lebih dari itu, masyarakat diharapkan tidak hanya terlibat secara administratif atau simbolik, namun juga memiliki kesempatan dan akses yang luas untuk mengembangkan usaha-usaha penunjang wisata. Hal ini mencakup usaha toko kerajinan tangan, penjualan oleh-oleh atau souvenir khas desa, warung makan tradisional, hingga jasa pemandu wisata. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi magnet bagi pengunjung, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dan merata.

Pengembangan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan perekonomian dan kesejahteraan desa setempat. Melalui pengembangan ini, diharapkan dapat tercipta berbagai dampak positif, seperti terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan yang membantu mengurangi tingkat pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta menjaga kelestarian alam, sumber daya alam, dan kebudayaan lokal. Salah satu destinasi wisata yang menarik adalah Taman Anggrek Hitam, yang tidak hanya memiliki keindahan alam yang unik tetapi juga memegang nilai budaya dan ekologis yang penting. Pengembangan wisata Taman Anggrek memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa taman anggrek ini merupakan sumber wisata alami yang telah terbentuk oleh alam

tanpa adanya campur tangan manusia. Oleh dari itu, taman anggrek ini harus dilestarikan bahkan dikembangkan menjadi sarana wisata.

Kebun anggrek alami *Coelogyne Pandurata* (Anggrek Hitam) Desa Siong bukanlah hasil dari rekayasa manusia, melainkan merupakan hasil persetujuan seluruh masyarakat Desa Siong yang telah secara bersama-sama menjadikannya kebun anggrek. Anggrek-anggrek ini telah tumbuh secara alami di sana selama beberapa puluh tahun tanpa campur tangan manusia. Taman Anggrek Hitam Desa Siong sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik, yang tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Selain anggrek hitam, tanaman obat dan kayu yang sangat bermanfaat, dan ada juga wahana yang bisa dicoba, seperti jungle trekking menjelajah taman wisata yang luas untuk melihat berbagai macam anggrek, di mana di dalamnya memiliki berbagai macam anggrek, tanaman obat dan pepohonan yang masih alami dan mempesona, camping ground yang terletak di tengah hutan di taman wisata anggrek, menara pandang atau menara pantau sebagai tempat wisata multi fungsi menara pandang tak hanya sekedar tempat istirahat, menara pandang juga tempat sebagai edukasi dan melihat keindahan bermacam anggrek, rumah pohon yang tinggi yang berlantai dua bisa untuk sekedar istirahat atau jadi spot foto yang bagus. Untuk fasilitas di taman wisata anggrek, yaitu kamar mandi umum, selfie area atau spot foto, areal parkir yang luas, balai pertemuan dan mushola (Taman Konservasi Anggrek Hitam - Berwisata, 2022).

Dalam pengembangan wisata Taman Anggrek, peran Pemerintah desa sangat penting. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, mengatur infrastruktur, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan wisata. Dengan terjalinnya kerjasama yang solid antara pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya, potensi wisata Taman Anggrek dapat dimaksimalkan dengan baik. Pemerintah desa yang memiliki sikap jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis akan menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi

secara aktif dalam pengambilan keputusan, demi mencapai hasil yang memberi manfaat bagi kepentingan bersama. Masyarakat desa diposisikan sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan desa dan diharapkan Pemerintah desa menjadi garda terdepan untuk pengembangan wisata taman anggrek hitam, sehingga mampu menyukseskan program pembangunan khususnya wisata taman anggrek hitam.

Peran penting pemerintah desa dalam keberlangsungan industri pariwisata merupakan hal yang perlu dikaji secara mendalam terlebih dalam konteks desa-desa kecil seperti Desa Siong ini peran pemerintah desa sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan industri wisata. Taman Anggrek Hitam memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata yang menarik. Namun, pengembangannya belum optimal, kondisi taman anggrek hitam sepi pengunjung sehingga imbasnya pemecatan terhadap masyarakat desa yang berjaga atau sebagai pegawai untuk pintu masuk loket pembayaran taman anggrek hitam, pengembangan pariwisata seringkali membutuhkan dana yang besar, sementara anggaran desa yang mungkin terbatas dan kurangnya promosi taman anggrek hitam sehingga banyak orang luar daerah Desa Siong yang tidak mengetahui keberadaan wisata taman anggrek hitam, dibutuhkannya sosialisasi lebih lanjut tentang cara promosi dan strategi pemasaran sehingga taman anggrek hitam ini dapat dikenal khalayak ramai dan pengunjung dari luar daerah Desa Siong tertarik untuk mengunjungi tempat wisata. Keterlibatan masyarakat desa sangat diperlukan untuk mendukung program-program yang direncanakan bersama dapat berjalan dengan lancar.

Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pengembangan wisata ini tampaknya menjadi faktor yang menentukan, tetapi belum jelas bagaimana kontribusi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan pengelolaan wisata yang masih kurang efektif sehingga belum bisa memaksimalkan pendapatan. Perlu adanya penggalan lebih dalam mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam. Dengan memahami kesediaan politik (*political will*) mereka secara lebih mendalam, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat diadopsi untuk

meningkatkan kontribusi pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata di wilayah Desa Siong tersebut. Peran pemerintah desa memiliki andil yang besar dalam mengatasi dan membantu dalam penyelenggaraan Wisata Taman Anggrek Hitam agar menjadi wisata yang berkelanjutan dan berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Taman Anggrek Hitam Desa Siong dengan berjudul “*Political Will* Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam (Penelitian di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kesiediaan pemerintah desa dalam pengembangan wisata.
2. Komitmen pemerintah desa dalam pengembangan wisata.
3. Tindakan pemerintah desa dalam pengembangan wisata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana *political will* pemerintah Desa Siong dalam pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam Desa Siong ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mendesripsikan dan menjelaskan *political will* pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam Desa Siong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis, terutama sebagai sumber referensi dan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema sejenis, khususnya yang berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah desa dalam upaya pengembangan wisata taman anggrek hitam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bagi para pembaca terkait perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan ekonomi desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini membantu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintahan Desa Siong sebagai titik penyelenggara pemerintah desa dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata lokal yang juga memiliki implikasi langsung pada pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

F. Literatur Review

Literatur Review memuat uraian tentang sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam Desa Siong. Adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Muhammad Mutjaba Habibi (2022) yang berjudul “Sinergi Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, menggunakan data berupa data primer dan data sekunder, serta pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan desa wisata mencakup dua aspek utama, yaitu pembangunan fisik seperti penyediaan sarana dan prasarana, serta pembangunan non-fisik berupa pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan dari program ini sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang harmonis antara pemerintah desa yang menggali potensi local dan masyarakat yang berperan sebagai koordinator, fasilitator, pelaksana, sekaligus penggerak dalam proses pembangunan. Pengembangan desa wisata juga dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya pendapatan, lingkungan pemukiman yang lebih sehat, akses pendidikan yang lebih baik, serta terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 7 No 2, Juli 2022.

2. Penelitian oleh Amantha (2021) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Way Urang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, hingga saat ini belum mampu secara optimal menjalankan peran strategisnya sebagai penstabil, inovator, pelopor, serta agen modernisasi dalam pengelolaan potensi Sumber Mata Air Panas di desa tersebut. Kondisi ini turut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih belum mengalami peningkatan signifikan. Indikator kesejahteraan seperti standar hidup yang layak, pemberdayaan masyarakat, serta perluasan akses terhadap peluang dan kebebasan yang sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai kemanusiaan masih belum tercapai. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah belum terwujudnya sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten

dalam hal pembangunan, pengelolaan, serta pemberdayaan potensi wisata air panas yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), Juni 2021.

3. Penelitian yang dilakukan Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti (2013) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui serangkaian program pemberdayaan meliputi: aktivasi kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, lomba-lomba desa, musrenbang desa dan pembangunan fisik, kemudian peningkatan ekonomi produktif dengan memberikan pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya peran serta masyarakat, budaya bermalas-malasan, dan minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pemberdayaan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 5 2013.
4. Penelitian oleh Ahmad. H, Abdul Rajab, Muh. Marwan Malik (2023) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara secara terstruktur. sementara itu, pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian pembangunan infrastruktur di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan dan keamanan dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Tasokko lebih memfokuskan pada pemanfaatan alokasi dana desa secara optimal sebagai anggaran yang tepat guna mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan prioritas yang sesuai

kebutuhan mendesak masyarakat. Perencanaan pembangunan ini dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen. Vol. 19 No. 3 (2023).

5. Penelitian oleh Dian Ayuningtyas, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih (2023) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Edukasi Gerabah”. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengembangan pariwisata meliputi beberapa aspek penting, yaitu sebagai penggerak sosial dengan memberikan peluang luas bagi BUMDes dan karang taruna, serta mendukung program pengembangan pariwisata melalui mediasi dan negosiasi seperti mengadakan rembug desa dan sosialisasi. Pemerintah desa juga memberikan dukungan berupa pembinaan serta dukungan moral kepada masyarakat, membangun fasilitas kelompok dengan menyediakan infrastruktur, serta memanfaatkan sumber daya dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, peran pengorganisasian juga dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap organisasi masyarakat desa. Meskipun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan sebagian warga, keterbatasan dana, dan belum adanya peraturan desa yang mendukung. Jurnal Of Public and Management Review. Vol. 12 No. 3 (2022).
6. Penelitian oleh Alesandro Pendong, Frans Singkoh, Fanley Pagemanan (2020) yang “Berjudul Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Popo berupaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menampilkan tarian budaya yang dibawakan oleh warga Desa Popo sendiri. Obyek dan daya tarik wisata tersebut termasuk produk wisata yang

menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata Gunung Payung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 5 (2020).

7. Penelitian oleh Rismayanti Tohir, Hanny Purnamasari, Indra Aditya (2023) yang berjudul peran “Pemerintah Desa : Pengembangan Umkm Di Desa Wisata Lebak Muncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi display data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Desa Wisata Lebak Monkham berkembang dengan baik, terbukti dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Dinas Koperasi Kabupaten Bandung dan Dinas Pelayanan UMKM yang memberikan fasilitasi koperasi, pelatihan, pembinaan, permodalan dan pemasaran produk. Namun demikian, desa wisata tersebut masih menghadapi beberapa kendala dalam mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, seperti jumlah wisatawan yang masih sedikit dan kesulitan dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lebakmuncang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola UMKM serta memperluas akses pasar bagi produk yang dihasilkan. Jurnal Trias Politica, Vol. 7 No. 2 (2023)
8. Penelitian oleh Herfan Sabandi, Masyhudi, M. Iswadi Athar (2023) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara”. Penelitian ini menggunakan deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola daya tarik wisata sangat penting dalam hal kemampuan pemerintah dalam menata desa karang bajo. Peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan sangat terlihat baik sebagai akselerator. Peran penting pemerintah desa dalam pengelolaan tempat wisata di desa karang bajo sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya di desa karang bajo. Journal Of Responsible Tourism. Vol. 3 No. 1, Juli 2023.

9. Peneliti oleh Moch Yusuf Syaifudin & Muhamad Farid Ma'ruf (2022) yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata". Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian peran Pemerintah Desa Jurug, teknik analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian ini didasarkan indikator yang dirumuskan oleh Sahyana (2017) peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan kebijakan, peran pemerintah sebagai pelaksanaan program, peran pemerintah sebagai pembina. Peran pemerintah desa Jurug merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah cukup baik, namun dalam hal pelaksanaan program dan pembinaan, masih terdapat kekurangan pada pemerintah desa Jurug. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut antara lain adalah kurangnya tindak lanjut dalam sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alokasi dana, serta masalah pencemaran aliran sungai akibat limbah kotoran hewan. Jurnal Publika. Vol. 10 No. 2, 23 Januari 2022.
10. Penelitian oleh Eet Saeful Hidayat & R Didi Djadjuli (2020) yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya". Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Raksabaya dalam mengembangkan potensi wisata Curug Kembar sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya penataan tempat wisata yang dilengkapi berbagai fasilitas serta peningkatan prasarana pendukung lainnya. Peran komite desa dalam pembangunan ini meliputi fungsi stabilisator, inovator dan pelaksana. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan potensi pariwisata antara lain regulasi yang mendukung, ketersediaan sumber daya alam, dan bantuan yang diberikan pemerintah. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7, No. 2 (2020).

Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini. Pada dasarnya rata-rata penelitian terdahulu memiliki kesamaan topik yakni “Peran Pemerintah Desa”, memiliki hubungan dengan kepariwisataan dan semua menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa penelitian pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini karena dari penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya memiliki objek yang berbeda dan kebanyakan menggunakan teori yang berbeda yaitu menggunakan teori yang berbeda seperti teori *Government*, *Governability*, *Governance*, *Governmentality* sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori *Governing* dengan fokus penelitian membahas tentang *Political Will* pemerintah desa. Selain itu penelitian terdahulu Sebagian besar berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peran, tindakan dan kesediaan pemerintah dalam pengembangan wisata

Penelitian terdahulu sebagian besar menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan, sementara penelitian ini lebih menyoroti peran, tindakan, dan komitmen pemerintah dalam pengembangan wisata. Penelitian ini meneliti praktik *Political Will* pemerintah desa dalam mendukung pariwisata di Desa Siong, dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang ada. Di sisi lain, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengembangan fisik dan nonfisik, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa secara umum. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis *Political Will* pemerintah desa dalam konteks pengembangan wisata, yang membedakan diri dari penelitian sebelumnya yang lebih terdiversifikasi dalam pendekatan dan fokusnya yang lebih mengarah pada desa atau masyarakat desa serta program pembangunan desa.

G. Kerangka Konseptual

1. *Political will*

Political will seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam proses pencetusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam suatu negara.

Political will tidak hanya menjadi komitmen oleh pengambil keputusan di pemerintah pusat, namun juga harus dijalankan oleh pemangku kebijakan tingkat daerah. juga mencerminkan tekad pemerintah untuk mengatasi isu-isu mendasar yang memerlukan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan atau kebijakan publik. Kemauan politik adalah kemampuan dan keberanian untuk membuat keputusan sulit dalam menghadapi masalah kompleks yang memerlukan transformasi besar dalam sistem pemerintahan atau kebijakan publik. Brinkerhoff dalam (Fauzy, 2015) memberikan pengertian secara teoritis, bahwa *political will* merupakan kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam aksi atau tindakan yang berguna untuk menggapai seperangkat tujuan dan diiringi dengan keberlanjutan usaha. *Political will* memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, sangat penting bagi pemimpin pemerintah dan masyarakat untuk menunjukkan komitmen terhadap *political will* yang kuat, guna memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang signifikan dan berdampak positif. *Political will* melibatkan kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang tegas dan berani terkait kebijakan publik, meskipun keputusan tersebut mungkin kontroversial atau menghadapi tekanan politik, tidak hanya tentang embuat keputusan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan efektif, mencakup alokasi sumber data, pengelolaan program, dan koordinasi di antara lembaga-lembaga terkait, *political will* juga mencakup konsistensi dalam pendekatan pemerintah terhadap masalah tertentu serta komitmen untuk mempertahankan kebijakan dalam jangka panjang, tidak hanya sebagai respon singkat terhadap tekanan atau peristiwa tertentu.

Ditetapkannya UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa, apabila dikaji dan diamati secara mendasar sebenarnya merupakan langkah konkret pemerintah dalam menerapkan asas *good governance* dan sekaligus juga *political will* pemerintah. Setiap kebijakan yang dirumuskan seharusnya selaras dengan norma dan ideologi yang telah disepakati oleh suatu bangsa. Selain itu,

kebijakan tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan mampu mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Menurut Van Der Blies seperti dikutip dalam (Krisnayuda, 2016), Terdapat beberapa asas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan adalah baik atau tidak. Prinsip pertama adalah adanya tujuan yang jelas, di mana setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik, dan setiap pernyataan yang disampaikan harus diungkapkan secara eksplisit. Asas kedua adalah urgensi, yang berfungsi untuk mencegah penerbitan kebijakan yang tidak berguna atau tidak diperlukan. Asas ketiga adalah kemungkinan pelaksanaan, yang berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dan ditegakkan dalam praktik.

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1, pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintah desa di sebuah wilayah hakekatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tentunya desa memiliki urusan-urusan untuk menjalankan fungsi dari pemerintahnya. Adapun urusan tata pemerintah, urusan pemberdaya masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sementara ini urusan pemerintah desa tersebut, menjadi unit dalam organisasi pemerintah desa (Zainudin, 2016).

Pemerintah, sebagai bagian dari alat perlengkapan negara, dapat dipahami dalam dua pengertian. Secara luas, pemerintah mencakup semua alat kelengkapan negara yang ada dalam cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan yuridis, serta alat kelengkapan negara lainnya yang bertindak atas nama negara. Sementara itu, dalam pengertian sempit, pemerintah merujuk pada pejabat yang menjalankan tugas eksekutif atau, lebih penting lagi, sebagai

penyelenggara administrasi negara (Manan, 1993). Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut peraturan tersebut, pemerintah memberikan kebebasan kepada desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Di samping itu, pemerintah desa juga dapat menerima tugas atau pendelegasian dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu.

Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Namun, regulasi dan pengaturan desa setelah beberapa amandemen konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membawa perspektif baru dalam pengelolaan desa. Menurut (Sarundajang, 2002) untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Salah satu cara pengelolaan tersebut adalah melalui lembaga ekonomi di tingkat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini menjadi bagian dari program yang dilaksanakan oleh desa sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan desa. Dilanjutkan pada pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kewenangan desa meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai wilayah yang memiliki otonomi, desa berhak untuk mendapatkan sumber pendapatan.

Sumber pendapatan desa mencakup: pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Semua sumber pendapatan ini merupakan aset desa. Tentu saja, pengelolaan kekayaan desa harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Tujuannya adalah agar pengelolaan kekayaan desa dapat menjadi sarana untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. Potensi Desa

Potensi desa mencakup daya, kekuatan, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa, yang memiliki peluang untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang ada di suatu wilayah sangat mempengaruhi perkembangan daerah tersebut, tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pedesaan. Desa dengan potensi tinggi

biasanya terletak di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi datar, dan dilengkapi dengan sistem irigasi yang baik, sehingga memiliki kemampuan lebih besar untuk berkembang. Di sisi lain, desa dengan potensi sedang umumnya berada di daerah dengan lahan pertanian yang kurang subur, topografi berbukit, dan sistem irigasi yang sebagian teknis atau semi-teknis, yang masih memiliki kemampuan untuk berkembang. Sementara itu, desa dengan potensi rendah terletak di daerah dengan lahan pertanian yang tidak subur, topografi yang kasar (perbukitan), dan bergantung pada curah hujan untuk sumber air, sehingga sulit untuk berkembang. Secara umum, potensi desa dapat dibedakan menjadi dua kategori: potensi fisik, yang mencakup tanah, air, iklim, lingkungan geografis, hewan ternak, dan sumber daya manusia; serta potensi non-fisik, yang meliputi masyarakat dengan karakter dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. (Sholeh, 2017).

Potensi fisik desa adalah segala sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Sumber daya yang termasuk dalam potensi fisik desa mencakup lahan, yang tidak hanya digunakan untuk tempat tumbuhnya tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki berbagai tipe tanah yang berfungsi sebagai media untuk tanaman tertentu. Contohnya, tanah aluvial yang cocok untuk padi, jagung, dan kacang, serta tanah berkapur yang ideal untuk tanaman jagung dan tebu. Selain itu, lahan juga dapat dimanfaatkan untuk sumber daya alam lainnya, seperti bahan tambang, misalnya batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, dan marmer. Tanah adalah salah satu elemen vital dalam kehidupan masyarakat desa karena mengandung berbagai kekayaan alam, seperti hasil pertanian, bahan tambang, dan mineral. Selain tanah, air juga merupakan sumber daya penting yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Desa umumnya memiliki potensi air yang melimpah dan bersih, yang diperoleh dari sumur, mata air, atau proses pemompaan, yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Manusia, dalam konteks ini, dipandang sebagai tenaga kerja yang menjadi sumber daya penting dalam proses pengelolaan lahan pertanian. Dengan demikian, manusia berperan sebagai potensi berharga dalam mengelola sumber daya alam di suatu wilayah. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan semangat hidup masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, faktor cuaca dan iklim juga memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Iklim, yang berhubungan dengan suhu dan curah hujan, memengaruhi kondisi setiap daerah secara berbeda. Di ketinggian tertentu, desa bisa berkembang pesat berkat kecocokan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman atau pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu. Misalnya, iklim yang sesuai untuk perkebunan buah-buahan, destinasi wisata, atau tempat peristirahatan (rest area). Dengan demikian, karakteristik iklim memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat desa. Ternak mempunyai kegunaan untuk sumber tenaga hewan, dan sumber gizi untuk masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak dapat menjadi pemodelan dan sumber pupuk. (Sholeh, 2017)

Potensi non fisik di desa mencakup semua sumber daya sosial dan pola perilaku masyarakat yang ada di desa tersebut, termasuk lembaga desa dan aparaturnya. Adat istiadat dan budaya juga merupakan bagian dari potensi non fisik. Suatu masyarakat yang telah lama berkembang akan menciptakan tata kehidupan yang khas, yang juga dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa tersebut. Potensi non fisik yang sangat penting antara lain adalah masyarakat desa yang bekerja sama dalam gotong-royong untuk mencapai tujuan produksi dan pembangunan desa. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi kelangsungan rencana pembangunan serta kekuatan dalam membangun pedesaan. Aparatur desa, atau pamong desa, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif menjadi motor penggerak utama dalam proses pembangunan desa. Seperti kepala desa, kepala dusun, kepala adat. Berdasarkan perkembangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada, desa dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Salah

satunya adalah desa tradisional, yang biasanya terletak di daerah pedalaman. Di desa ini, penduduk cenderung bersifat tertutup dan komunikasi antarwarga terbatas, karena sistem transportasi dan sarana komunikasi belum berkembang. Kehidupan masyarakat di desa tradisional sangat bergantung pada alam (Sholeh, 2017).

Desa sebagai entitas yang memahami potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi. Menurut (Abdurokhman, 2014) pengembangan potensi desa dapat mendorong kemandirian masyarakat desa atau kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari pengembangan potensi desa adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang bersifat terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha serta menciptakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antara dinas atau instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan para pemangku kepentingan lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program. Potensi desa dapat diidentifikasi melalui karakteristik fisik yang dimiliki desa, seperti tanah, air, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga ekonomi, serta aparatur dan pamong desa, yang semuanya sudah ada di desa tersebut.

Desa swadaya ditandai adanya kegiatan penduduknya untuk mencukupi kebutuhan subsisten (Sholeh, 2017). Karakteristik kehidupan dan dinamika sosial-ekonomi penduduk di desa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan alam tempat mereka bermukim. Lokasinya yang umumnya berada di wilayah terpencil dengan aksesibilitas terbatas mengakibatkan minimnya interaksi dengan komunitas luar, yang berdampak pada lambatnya proses transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi di desa tersebut. Dalam hirarki perkembangan desa, desa swakarya berada pada tingkatan menengah dengan kapasitas pembangunan yang lebih progresif dibandingkan desa

swadaya. Desa pada kategori ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dimilikinya. Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, desa swakarya juga telah mencapai tahap surplus produksi yang memungkinkan adanya aktivitas perdagangan dengan wilayah sekitar. Indikator penting dari desa swakarya adalah berfungsinya kelembagaan desa dan perangkat pemerintahan desa secara efektif, disertai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan, yang tercermin dalam diversifikasi mata pencaharian penduduk.

Desa swasembada merepresentasikan tahap paling maju dalam evolusi pembangunan desa, dengan kapabilitas komprehensif dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pemanfaatan teknologi dan peralatan modern. Desa pada kategori ini telah mencapai kemandirian ekonomi yang memungkinkannya memenuhi seluruh spektrum kebutuhan warganya, dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan sekunder dan tersier. Interkonektivitas dengan wilayah lain berlangsung intensif dan efisien berkat sistem transportasi dan komunikasi yang berkembang baik, yang difasilitasi oleh pengakuan formal dan hubungan institusional antar daerah. Tingkat kemandirian dan pembangunan yang dicapai oleh desa swasembada mencerminkan keberhasilan integrasi antara inisiatif lokal, dukungan pemerintah, dan adaptasi teknologi dalam konteks pembangunan perdesaan berkelanjutan

Lembaga sosial desa berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Lembaga-lembaga ini menjadi wadah yang membangun dan mengatur kehidupan masyarakat desa sehari-hari. Beberapa contoh lembaga desa yang terlibat dalam pembangunan antara lain Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tim penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Karang Taruna. Selain itu, lembaga pendidikan seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencacah dan pemantau informasi (kelompencapir), serta kegiatan penyuluhan dan simulasi juga berperan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Lembaga kesehatan, seperti

puskesmas, posyandu, dan BKIA. Lembaga ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa. (Sholeh, 2017).

4. *Governing*

Governing pemerintah desa merupakan sistem tata kelola yang melibatkan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengelola urusan publik dan kepentingan masyarakat lokal. Sistem ini berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap hak asal-usul dan tradisi adat setempat, sambil tetap beroperasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks demokrasi yang dianut Indonesia, pemerintahan tidak sekadar berfungsi administratif (*ordering the state*), tetapi juga memiliki peran aktif dalam mengelola negara (*governing the state*) memastikan kehadiran negara dalam menyediakan layanan, memberikan perlindungan kepada warga, dan menegakkan kepatuhan hukum. Teori pemerintahan yang efektif menekankan pentingnya pengakuan terhadap peran pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat dan membangun kapasitas sipil yang efisien. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan beryarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Margaret Levi, 2006).

Perbuatan pemerintah disebut *governing* (G2). G2 adalah sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep *rulling*, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Steven A. Cook (2007) dalam "*Ruling but Not Governing*" mengilustrasikan bagaimana entitas dapat mendominasi politik dan mengontrol berbagai ruang namun tidak melaksanakan fungsi pemerintahan sejati. *Governing* melekat pada otoritas yang legitimate untuk menjalankan pemerintahan, merujuk pada penggunaan kewenangan politik untuk mengatur dan mengurus kepentingan publik.

Dalam diskursus resmi pemerintahan Indonesia, istilah "menyelenggarakan pemerintahan" lebih umum digunakan daripada "memerintah" mencerminkan pengaruh tradisi Belanda yang menekankan fungsi mengatur dan mengurus. Perbandingan berbagai konsep seperti *ruling* (menguasai), *governing* (mengatur dan mengelola), *ordering* (menata), dan *steering* (mengarahkan) menjadi penting dalam studi pemerintahan. Robert

Dahl dalam "*Who Governs?*" (1961) berfokus pada otoritas politik yang terlembagakan, sementara William Domhoff dalam "*Who Rules?*" (1967) mengkaji kekuatan di luar struktur formal yang memengaruhi pengambilan keputusan.

Governing sebagai proses mengatur dan mengelola mencakup aspek politik, hukum, dan administrasi dengan fungsi-fungsi esensial: ekstraksi sumber daya, distribusi kesejahteraan, perlindungan masyarakat, dan penerapan sanksi. Tindakan utama dalam governing meliputi pembentukan hukum dan kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap negara, warga, dan masyarakat secara komprehensif.

Konsep *governing* tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang merupakan tindakan utama pemerintah. Fungsi dasar pemerintah adalah melindungi (*protecting*), bukan hanya mempromosikan (*promoting*). Perlindungan yang dimaksud di sini adalah menjaga hukum dan ketertiban (*law and order*), sementara distribusi kesejahteraan (*distributing welfare*) juga menjadi salah satu tugas utama pemerintah. Pemerintah menjalankan proses yang mencakup politik, hukum, dan administrasi yang didukung oleh teknik serta pendekatan yang tepat. Selain itu, pemerintahan juga melibatkan proses *connecting* (menghubungkan), *crafting* (menciptakan), dan *transforming* (mengubah), yang mengarah pada pengembangan kebijakan, hukum, dan berbagai regulasi lainnya. Kebijakan itu sendiri adalah inti dari pemerintahan dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian ilmu pemerintahan, pembahasan kebijakan mencakup seluruh proses dari hulu ke hilir secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan konteks, kontestasi, konstitusionalitas, isi (konten), konsistensi, dan konsekuensinya. Bahkan, kajian ini juga dapat mencakup pembahasan tentang kontradiksi yang mungkin muncul dalam kebijakan tersebut. Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus dan secara responsible mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) dan

pendistribusian (*distributing*) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Sutoro Eko, 2021).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi dan mengungkap objek penelitian serta hasil yang ditemukan. Metode kualitatif dipilih karena menyediakan instrumen yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap makna yang terkait dengan fenomena kompleks dan proses-proses yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali esensi pengalaman subjek penelitian dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti dalam konteks naturalnya.

(Moleong, 2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan menggunakan deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alami, dengan berbagai metode alamiah. Sementara menurut Hendryadi & Zannati, R, (2019) penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Menurut (Creswell, 2009) pendekatan fenomenologi adalah menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Penelitian fenomenologi berupaya mengeksplorasi dan mengartikan makna dari konsep atau fenomena berdasarkan pengalaman yang dialami dan disadari oleh beberapa individu. Esensi dari pendekatan ini adalah melakukan reduksi terhadap pengalaman-pengalaman individual tersebut untuk mengidentifikasi dan mengungkap elemen-elemen fundamental yang mendasari fenomena yang diteliti. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melampaui deskripsi permukaan dan menyelami struktur terdalam dari pengalaman manusia terkait fenomena tertentu. (Giorgi & Giorgi, 2003).

Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas daripada kuantitas, serta menggunakan data dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi terkait serta menekankan pada proses penyelidikan daripada hasil akhirnya, karena hubungan antar bagian-bagian yang diteliti akan lebih jelas terlihat melalui proses tersebut menggunakan pendekatan fenomenalogi. Pendekatan fenomenalogi ini akan mencari pola-pola makna yang muncul dari pengalaman dan persepsi responden terhadap *political will* pemerintah desa dalam konteks pengembangan wisata taman anggrek hitam.

Analisis ini juga akan mengidentifikasi tema-tema utama, persamaan, dan perbedaan dalam pandangan mereka serta Penelitian akan berfokus pada peran dan persepsi subjektif dari pemerintah desa, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya mengenai bagaimana kebijakan atau keputusan atau peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata tersebut. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman mendalam terhadap pengalaman hidup dan persepsi para pemangku kepentingan (seperti pemerintah desa, masyarakat setempat, pengelola wisata) terkait dengan pengembangan wisata taman anggrek hitam Desa Siong.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer dapat diperoleh menggunakan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini. Data primer meliputi transkrip hasil wawancara serta observasi dan hasil-hasil temuan saat proses pelaksanaan penelitian.

2. Unit Analisis

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini menjadi panduan bagi peneliti untuk pengembangan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Objek dalam penelitian ini ialah *political will*, peran, dan kebijakan pemerintah Desa Siong dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam.

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan yang menjadi sumber informasi mengenai situasi dan kondisi desa sesuai dengan masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2017:138) purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu sesuai dengan permasalahan untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan topik penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Siong yang meliputi kepala desa serta perangkat desa, pihak-pihak lainnya yang terkait seperti karang taruna, masyarakat desa, serta pengelola wisata. Berbagai pihak yang terlibat akan memberikan perspektif yang lebih lengkap dengan berbagai macam sudut pandang terhadap *political will* pemerintah Desa Siong dalam usaha pengembangan taman anggrek hitam.

Tabel 1. 1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1	Meiyanto	Kepala desa	SLTA	Laki-Laki
2	Dina Mariana	Sekretaris desa	SLTA	Perempuan
3	Nadilla	Kepala Urusan Umum Desa	SLTA	Perempuan
4	Setyoningsih, S.Pd	Kepala Seksi Pemberdayaan	S-1 Pendidikan	Perempuan
4	Yenni Anugrahni, S.Kom	Karang taruna	S-1 Sistem Informasi	Perempuan

5	Raedy Andrang, A.Md	Kepala Badan Permusyawaratan Desa	D-3 Pertanian	Laki-Laki
6	Derman	Masyarakat lokal	SD	Laki-Laki

Sumber: Data Penelitian Tahun 2024 (Diolah)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku dan aktivitas individu-individu dalam konteks penelitian (Creswell, 2009). Metode ini melibatkan proses pengamatan sistematis terhadap fenomena yang dilandasi oleh pengetahuan dan gagasan konseptual tertentu. Tujuan utamanya adalah memperoleh informasi komprehensif terkait fenomena atau peristiwa yang telah atau sedang berlangsung dalam lingkungan penelitian. Melalui pengamatan langsung ini, peneliti dapat menangkap dinamika sosial, interaksi, dan konteks situasional yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya. Menurut Margono (2007) Observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat perubahan dalam fenomena sosial yang muncul dan berkembang, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk melakukan perubahan berdasarkan penilaian tersebut. Bagi pelaksana observasi, hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada momen tertentu dan membedakan antara informasi yang relevan dengan yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk melihat bagaimana *political will* pemerintah Desa Siong dalam pengembangan taman wisata anggrek hitam, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Siong. Peneliti mengamati bagaimana keadaan objek wisata dan bagaimana peran pemerintah

desa dalam pengembangan, kemudian mengobservasi *political will* pemerintah Desa Siong dan memperhatikan pola *political will* yang dimiliki pemerintah Desa Siong. Peneliti juga melakukan pemahaman yang mendalam terkait praktik pengembangan wisata anggrek hitam Desa Siong dan mengamati faktor eksternal seperti bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan wisata taman anggrek hitam Desa Siong. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, panduan wawancara (*interview guide*), serta catatan lapangan (*field note*).

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi objek wisata Taman Anggrek Hitam yang terletak di Desa Siong. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan masyarakat atau pemerintah desa, namun hanya mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan wisata. Dalam observasi ini, peneliti mencatat berbagai hal seperti kondisi fisik taman wisata, fasilitas pendukung yang tersedia, aktivitas masyarakat sekitar, serta keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan lokasi. Peneliti juga memperhatikan adanya papan informasi, tanda-tanda promosi wisata, serta infrastruktur penunjang seperti akses jalan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. Selain itu peneliti juga memperhatikan cara pemerintah desa dalam menanggapi permasalahan yang ada pada taman anggrek dan bagaimana solusi-solusi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa Taman Anggrek Hitam memiliki potensi yang besar secara alamiah, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Beberapa fasilitas terlihat masih sederhana, kurang perawatan, dan promosi wisata belum dilakukan secara maksimal. Kehadiran pemerintah desa dalam kegiatan langsung di lokasi wisata juga belum terlalu terlihat secara intensif.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, masyarakat lokal. Tujuan peneliti melakukan wawancara dengan lebih dari satu orang adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan beragam, tidak hanya dari satu atau dua sumber, sehingga dapat memperoleh berbagai

perspektif dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun menurut Stainback dalam (Sugiyono, 2017) Wawancara didefinisikan sebagai interaksi antara dua individu yang melibatkan pertukaran informasi dan ide melalui proses tanya jawab. Teknik pengumpulan data ini memberikan kedalaman informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi semata. Melalui wawancara, peneliti dapat mengakses pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana partisipan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang mereka alami. Proses dialog ini memungkinkan peneliti menggali perspektif, pengalaman, dan makna subjektif yang diberikan oleh partisipan terhadap realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan dan jawaban secara langsung antara pewawancara dan responden. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban, dalam sebuah percakapan terstruktur antara dua orang atau lebih sehingga didapatkan data dan jawaban yang dapat menjelaskan sebuah masalah.

Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka di Desa Siong selama beberapa kali kunjungan penelitian. Peneliti membawa pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi pokok-pokok pertanyaan mengenai *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto, Sekretaris Desa Ibu Dina Mariana, Ketua BPD Bapak Raedy Andrang, Kaur Umum Ibu Nadilla, Kasi Pemberdayaan Ibu Setyoningsih dan mewakili warga desa dan lansia yaitu Bapak Derman. Proses wawancara berlangsung di kantor desa, rumah informan, dan di area sekitar objek wisata. Selama wawancara, peneliti mencatat dan merekam percakapan dengan seizin informan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai sejauh mana komitmen dan langkah nyata pemerintah desa dalam mendukung pengembangan wisata, termasuk rencana strategis, kebijakan yang telah diambil, serta bentuk kerja sama dengan masyarakat. Di lapangan, ditemukan bahwa pemerintah desa memiliki niat baik dalam mengembangkan wisata,

yang terlihat dari penyusunan rencana awal dan penyediaan lahan. Namun, pelaksanaannya masih minim karena keterbatasan dana, kurangnya pelatihan untuk pengelola, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Sebagian informan juga mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah terhadap tindak lanjut program masih rendah, dan promosi wisata belum berjalan secara optimal. Ditemukan juga bahwa beberapa program pengembangan belum berjalan maksimal, dan sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2017) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan perolehan informasi dari berbagai sumber tertulis dan visual seperti buku, arsip, dokumen resmi, data numerik, dan material bergambar yang dapat berfungsi sebagai laporan atau keterangan pendukung penelitian. Metode ini menyediakan akses terhadap data sekunder yang telah terdokumentasikan sebelumnya dan memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi historis maupun kontemporer yang relevan. Setelah dikumpulkan, material dokumentasi ini kemudian menjadi subjek analisis dan telaah sistematis untuk mengekstrak informasi yang bernilai bagi tujuan penelitian. Robert E. Cole mendefinisikan dokumentasi sebagai proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengembangan pengetahuan, dan penyebaran informasi. Dokumentasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang terstruktur dalam mengumpulkan, mencari, menyelidiki, menggunakan, dan menyediakan dokumen untuk memperoleh informasi, penjelasan, pengetahuan, serta bukti, dan untuk menyebarkannya. Dokumentasi juga berperan dalam mengidentifikasi dan melacak perubahan informasi serta memastikan keandalan dan keabsahan dokumen. Dokumentasi yang didapatkan digunakan untuk memperoleh sumber informasi sebagai acuan, beberapa jenis dokumentasi yang digunakan antara lain informasi web, profil desa, laporan-laporan, hasil penelitian sebelumnya, surat kabar, dokumen, data statistik serta dokumen dokumen lainnya.

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen resmi serta bukti visual yang berkaitan dengan pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam di Desa Siong. Peneliti memperoleh dokumen dari internet seperti dokumen sejarah dan berita terkait taman anggrek, peneliti juga memperoleh profil desa, dan rancangan peraturan desa dan pembentukan pokdarwis yang masih belum ditetapkan. Selain dokumen tertulis, peneliti juga melakukan dokumentasi dalam bentuk foto-foto di lapangan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara. Objek yang didokumentasikan meliputi lokasi fisik Taman Anggrek Hitam, kondisi fasilitas wisata, papan nama dan informasi wisata, akses jalan menuju lokasi, serta kegiatan warga yang berkaitan dengan wisata, dokumentasi keadaan taman anggrek dulu dan sekarang. Peneliti juga mendokumentasikan narasumber saat proses wawancara untuk keperluan arsip. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun beberapa dokumen perencanaan telah ada seperti pembentukan peraturan desa dan pokdarwis tetapi belum ditetapkan, dokumen yang tersedia masih terbatas dan belum tertata dengan rapi. Beberapa rencana pengembangan belum terdokumentasi secara formal dalam bentuk laporan kegiatan atau evaluasi. Foto-foto yang diambil menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung masih minim, dan kondisi taman belum tertata secara maksimal. Dokumentasi ini menjadi bukti pendukung untuk menilai sejauh mana *political will* pemerintah desa telah diimplementasikan secara nyata.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses terstruktur untuk mengorganisir dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar dapat dipahami dan disampaikan dengan jelas (Sugiyono, 2017). Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa analisis ini melibatkan pengaturan, pengelompokan, pemberian kode, dan kategorisasi data untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui langkah-langkah ini, data kualitatif yang awalnya kompleks dapat disederhanakan untuk

memudahkan pemahaman. Proses ini mencakup pengumpulan dan pengorganisasian transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya secara sistematis, serta melibatkan pengolahan, pemecahan, dan sintesis data, pencarian pola, penemuan informasi penting, dan penentuan aspek yang akan dilaporkan. Tujuan utamanya adalah agar data dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan pihak lain.

Menurut Miles dkk., (2014), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, fokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus, terutama selama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Tahapan reduksi data meliputi merangkum, mengkode, mengidentifikasi tema, membentuk kategori, membuat kelompok, serta menulis catatan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan, dan mengorganisir data agar kesimpulan yang valid dapat ditarik dan diuji. Proses reduksi ini berlanjut bahkan setelah penelitian lapangan selesai, hingga laporan akhir selesai disusun. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, seperti seleksi yang ketat, merangkum atau menyusun uraian singkat, serta mengelompokkan dalam pola yang lebih besar. Teknik ini melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pemerintah desa, dokumentasi program pengembangan wisata, dan sumber lainnya. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menghilangkan data yang tidak relevan, mengidentifikasi tema atau pola utama, dan menyoroti elemen-elemen penting untuk analisis lebih lanjut. Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempersempit, mengelompokkan, mengarahkan,

menghilangkan yang tidak relevan, dan mengorganisasi data sehingga dapat diambil kesimpulan akhir.

Proses reduksi data dilakukan setelah seluruh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berhasil dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menyortir, memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data-data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kasi Pemberdayaan, Kaur Umum, dan warga sekitar, peneliti mencatat dan merekam semua informasi yang diperoleh. Setiap hasil wawancara kemudian di tulis secara manual, lalu dibaca berulang-ulang untuk memahami makna isi pembicaraan. Dari transkrip tersebut, peneliti mulai mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti bagian mana yang termasuk kesediaan, komitmen atau tindakan sehingga dapat menjelaskan hasil wawancara menjadi paragraf. Informasi dari tiap narasumber kemudian dipilah dan dimasukkan ke dalam indikator kesediaan, komitmen atau tindakan. Sementara itu, hasil observasi seperti kondisi taman yang kurang terawat, minimnya regulasi, penutupan sementara dimasukkan ke pokok bahasan tantangan yang dihadapi. Selama proses ini, peneliti juga menghapus data yang tidak relevan, seperti cerita pribadi narasumber yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian. Reduksi data ini sangat penting untuk menyusun narasi hasil penelitian yang fokus, tidak melebar, dan mampu menjawab rumusan masalah secara jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis. Ini mencakup mengatur data yang telah disusun menjadi format yang mudah dipahami, misalnya dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi yang mendukung untuk menjelaskan temuan-temuan utama yang ditemukan dari analisis data. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang temuan-temuan yang telah diperoleh dari

analisis. Penyajian data mengacu pada cara bagaimana hasil atau temuan dari analisis data disajikan kepada pembaca atau audiens dan dapat disusun dalam berbagai format. Ini melibatkan penyusunan dan penyajian informasi yang telah dianalisis dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan. Penyajian data dapat meliputi penggunaan catatan lapangan, tabel, grafik, narasi, atau kutipan langsung untuk mengilustrasikan atau mendukung temuan-temuan tersebut. Penyajian data dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Tabel dan Diagram

Menyusun data dalam bentuk tabel atau diagram dapat membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara berbagai konsep atau temuan. Misalnya, penggunaan diagram untuk menunjukkan pola dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan pengembangan wisata. Peneliti membuat tabel dan diagram dalam profil desa untuk menjelaskan kondisi desa seperti jumlah penduduk, agama, mata pencaharian penduduk dll.

2. Narasi Deskriptif

Menggunakan narasi untuk menjelaskan secara rinci temuan-temuan utama dari analisis. Hal ini sering kali melibatkan penjelasan tentang bagaimana temuan tersebut berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan implikasinya bagi teori atau praktik. Peneliti menjelaskan hasil wawancara dengan narasi untuk menjelaskan kembali maksud dan makna dalam penelitian

3. Kutipan Langsung

Menyertakan kutipan langsung dari data kualitatif dapat memberikan dukungan konkret untuk menyatakan temuan yang didapatkan. Kutipan langsung digunakan peneliti dalam hasil wawancara tiap narasumber.

Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dipilah ke dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan sebelumnya, seperti komitmen pemerintah desa, bentuk kebijakan, peran masyarakat, serta hambatan dalam pengembangan wisata. Data disajikan

berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) komitmen pemerintah desa, (2) kebijakan dan perencanaan, (3) bentuk implementasi di lapangan, dan (4) hambatan yang dihadapi.. Peneliti membuat ringkasan wawancara dari setiap informan dan menuliskan kutipan langsung yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan seperti peneliti menemukan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya memiliki niat untuk mengembangkan Taman Anggrek Hitam sebagai objek wisata unggulan desa. Hal ini terlihat dari adanya pernyataan langsung dalam wawancara dan beberapa dokumen perencanaan desa yang menyebutkan potensi tersebut. Namun, penyajian data juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi nyata. Misalnya, meskipun dalam RPJMDes disebutkan adanya pengembangan wisata berbasis potensi lokal, namun di lapangan belum terlihat kegiatan yang berjalan secara konsisten. Data hasil observasi, seperti kondisi fisik taman yang belum maksimal, juga ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat yang disertai foto lapangan sebagai bukti visual. Penyajian data ini membantu peneliti dan pembaca melihat pola dan keterkaitan antar temuan, serta memperkuat argumentasi dalam pembahasan. Semua bentuk ini dirancang untuk menyusun informasi secara sistematis, memudahkan pemahaman, dan membuat data lebih mudah diakses.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Saat pengumpulan data berlangsung, seorang peneliti kualitatif mulai mencari makna dari berbagai objek yang ada, mengidentifikasi pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi potensial, serta hubungan sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir akan muncul berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah catatan lapangan yang terkumpul, cara pengkodean dan penyimpanan data, metode pencarian ulang, keterampilan peneliti, serta tuntutan dari pemberi dana. Namun, kesimpulan tersebut sering kali sudah mulai dipikirkan atau dirumuskan sejak awal penelitian

berlangsung. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh dari analisis data. Proses penarikan kesimpulan melibatkan beberapa langkah:

1. Interpretasi Data

Peneliti menafsirkan arti dari temuan-temuan yang telah diidentifikasi.

Ini melibatkan analisis mendalam tentang implikasi *political will*

pemerintah desa terhadap pengembangan wisata anggrek hitam.

2. Hubungan dengan Teori atau Literatur

Kesimpulan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan atau literatur yang mendukung dalam *political will* pemerintah Desa Siong.

3. Relevansi dengan Konteks

Kesimpulan dijelaskan dalam konteks kasus spesifik dari Desa Siong, yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang *political will* pemerintah Desa Siong dalam pengembangan wisata Taman Anggrek.

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Proses penarikan kesimpulan juga mencakup interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut, khususnya dalam konteks *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata anggrek hitam di Desa Siong. Suyitno (2018) mengatakan bahwa data dari lapangan yang telah terhimpun dari penelitian akan menuju ke arah kesimpulan. Dengan menerapkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terstruktur dan sistematis dalam skripsi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peran *political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam di Desa Siong.

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data kualitatif di mana data diverifikasi untuk menemukan makna, pola, dan hubungan sebab-akibat yang mungkin menjadi dasar untuk menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menyimpulkan bahwa *political will* pemerintah Desa Siong dalam

pengembangan wisata taman anggrek hitam memang ada, namun masih bersifat awal dan belum menyeluruh dalam hal implementasi. Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, peneliti menganalisis data secara tematik untuk menemukan pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari pernyataan informan dan kondisi nyata di lokasi penelitian. Kesimpulan ini diperoleh dari konsistensi jawaban para informan yang mengakui adanya niat dan rencana pengembangan, tetapi juga mengungkapkan kendala serius. Hasil observasi juga memperkuat kesimpulan tersebut, di mana fasilitas wisata masih sangat sederhana dan promosi belum terlihat. Peneliti membandingkan informasi dari beberapa narasumber, seperti kepala desa, sekretaris desa, ketua pokdarwis, dan warga, dengan hasil observasi langsung di taman anggrek hitam serta dokumen-dokumen resmi desa. Proses ini dilakukan untuk melihat konsistensi antara ucapan, tindakan, dan bukti fisik yang ada. Misalnya, meskipun pemerintah desa menyatakan adanya rencana pengembangan wisata, namun peneliti tidak menemukan banyak kegiatan konkret di lapangan yang menunjang rencana tersebut.

Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan data yang berulang dan konsisten dari berbagai sumber. Peneliti juga melakukan triangulasi untuk memastikan validitas data, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari proses ini, peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa *political will* pemerintah desa memang ada, tetapi masih terbatas pada tataran niat dan belum diikuti oleh implementasi yang nyata dan berkelanjutan. Untuk memastikan validitas temuan, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika ketiga sumber data mendukung satu temuan yang sama, maka peneliti meyakini bahwa kesimpulan tersebut memiliki keabsahan yang kuat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN WISATA TAMAN ANGGREK HITAM

DESA SIONG

A. Sejarah Desa Siong

Desa Siong merupakan sebuah desa yang berada pada kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan tengah. Secara administratif, Desa Siong merupakan desa pemekaran dari Desa Telang Siong yang juga disebut pengembalian dua desa, dan kemudian dibagi menjadi dua desa yaitu desa telang (sendiri) dan Desa Siong pada tahun 2008. Desa ini juga memiliki kawasan transmigrasi yang dihuni oleh berbagai macam penduduk didalamnya yang merupakan program pemerintah kurang lebih 10 Tahun yang lalu. Saat Ditetapkan menjadi Desa Siong, desa ini dipimpin oleh PJ Kepala Desa 1 Dermawan yang kemudian dilanjutkan oleh PJ 2 Hartato, PJ 3 Janitha dan kemudian berdasarkan keputusan bupati nomor 206 Tahun 2010 mengenai pengesahan kepala desa di wilayah Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur masa bakti 2010 – 2016 maka diadakan pemilihan Kepala Desa tanggal 05 April 2010, terpilih oleh masyarakat Desa Siong Bpk. Sidiyanto sebagai kepala desa yang dilantik tanggal 5 Mei 2010 oleh Camat Paju Epat dan pada tahun 2023 terpilih Bpk. Meiyanto sebagai kepala Desa Siong Tahun 2023-2029.

Tabel 2. 1
Urutan Pejabat Kepala Desa Sampai Dengan Tahun 2024

NO	Nama	Tahun 2008 s/d 2023
1	Dermawan	2008
2	Hartato	2009
3	Janitha	2010
4	Yenra Sakti	2016
5	Sidiyanto	2017
6	Sidiyanto	2023

7	Meiyanto	2023-2029
---	----------	-----------

Sumber : Profil Desa Siong (2024)

Sejarah pembangunan Desa Siong adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sejarah Pembangunan Desa

Tahun	Kejadian yang baik (positif)	Kejadian yang buruk (negatif)
1995	Pemilihan Kepala Desa	
1997	Pemilihan Kepala Desa	
2008	Penunjukan Pj Kepala Desa	
2009	Penunjukan Pj Kepala Desa	
2010	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	
2012	Penambahan warga Siong dengan datangnya warga transmigrasi	
2015 & 2019		Kemarau Panjang yang mengakibatkan kebakaran dan kekeringan
2020- 2023		Terjadinya wabah virus Covid-19

Sumber : Profil Desa Siong (2024)

B. Kondisi Geografis Desa Siong

Desa Siong memiliki luas wilayah 250.000 Ha, yang terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan batas-batas sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Batas Desa Siong

No	Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Sebelah utara	Tampulangit	Paju epat	Barito timur
2	Sebelah selatan	Balawa	Paju epat	Barito timur
3	Sebelah timur	Telang	Paju epat	Barito timur

4	Sebelah barat	Bangkuang	Karau kuala	Barito selatan
---	---------------	-----------	-------------	----------------

Sumber : Profil Desa Siong (2024)

Jarak dari Desa Siong ke ibu kota Kecamatan Paju Epat adalah 1,5 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Barito Timur adalah 17 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Palangka Raya adalah 275 Km. Desa Siong merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah, dengan ketinggian $\pm 160 - 200$ meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/sawah/tegalan dengan permukaan tanah dasar 75%, berbukit-bukit 0,1% dan lereng 0,1%. Suhu rata-rata harian mencapai $35 - 40^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan rata-rata 25 – 35 Mm/tahun. Luas Desa Siong adalah sekitar 25 Km dan Luas lahan wilayah menurut penggunaan yaitu permukiman seluas 20 Ha, lahan pertanian seluas 70,2 Ha, Perkantoran seluas 2 Ha, lahan perkebunan seluas 6500 Ha. Sumber daya air di Desa Siong terdiri dari air permukaan dan air tanah.

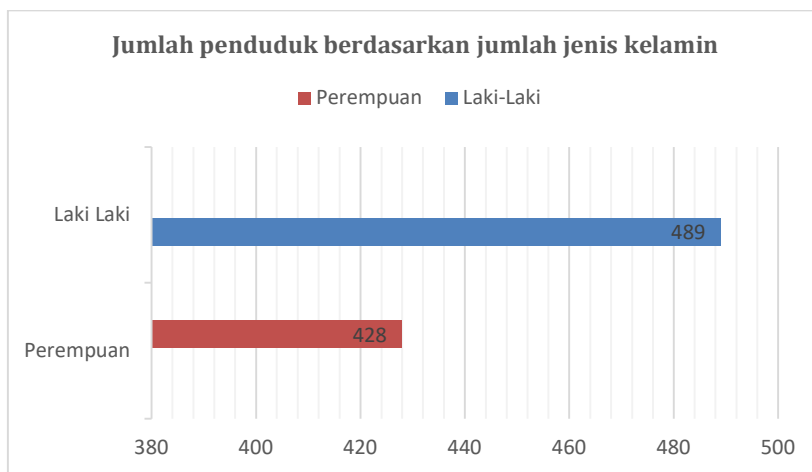
Air permukaan berasal dari aliran sungai yang digunakan sebagai sumber utama irigasi sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga, warga memanfaatkan sumur gali serta sumur pompa atau sumur bor. Secara klimatologis, Desa Siong yang terletak di Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, mengalami dua musim dalam setahun, yakni musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, lahan yang terdapat di Desa Siong dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat, terutama karena kesuburannya yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Hanya sebagian kecil lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Kondisi ini mencerminkan bahwa Desa Siong merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi yang memadai untuk mendukung kehidupan serta kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

C. Kondisi Demografis Desa Siong

Kondisi demografis/kependudukan, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Siong, berjenis kelamin laki = 489 jiwa, berjenis kelamin perempuan = 428

jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan akan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Siong.

Grafik 2. 1
Jumlah Penduduk Desa Siong



Sumber : data BPS Kab. Barito Timur (2023)

Tabel 2. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Presentase (%)
1	0-4	31	21	52	5,6
2	5-9	44	39	83	9,05
3	10-14	49	40	89	9,71
4	15-19	49	47	96	10,47
5	20-24	41	33	74	8,07
6	25-29	31	25	56	6,11
7	30-34	28	35	63	6,8
8	35-39	26	49	71	7,74
9	40-44	60	40	100	10,91
10	45-49	46	41	87	9,49

11	50-55	46	26	72	7,85
12	55-59	17	17	34	3,71
13	>60	21	19	40	4,36
Jumlah		489	428	917	100

Sumber : data BPS Kab. Barito Timur (2023)

D. Kondisi kesehatan masyarakat Desa Siong

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di tingkat desa adalah terpenuhinya aspek kesehatan masyarakat. Jika kesehatan warga terjamin dan hak-hak dasar mereka dalam bidang kesehatan dapat dipenuhi, maka pelaksanaan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah desa memiliki peluang besar untuk berhasil. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, keberadaan tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat desa sangat penting. Namun, untuk wilayah yang luas seperti Desa Siong, jumlah tenaga kesehatan tersebut masih dirasa kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024–2029, pengembangan fasilitas kesehatan diusulkan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan. Meskipun belum sepenuhnya menjadi prioritas utama tingkat desa, rencana ini akan diajukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Saat ini, Desa Siong memiliki 10 posyandu balita dan 4 posyandu lansia yang berperan penting dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan, khususnya untuk kelompok usia rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Keuntungan lain yang dimiliki Desa Siong adalah lokasinya yang strategis, karena berada dekat dengan Puskesmas Kecamatan Paju Epat serta satu rumah sakit swasta di wilayah desa. Kedekatan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan primer secara cepat dan tepat ketika dibutuhkan.

E. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan desa dan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya tingkat pendidikan warga secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendorong munculnya keterampilan, inovasi, dan jiwa kewirausahaan. Ketika masyarakat memiliki kecakapan dan kreativitas yang baik, maka potensi untuk membuka lapangan kerja baru akan semakin besar, sehingga persoalan seperti pengangguran dapat diminimalisir secara alami. Di era digital seperti sekarang, peran pendidikan menjadi semakin krusial. Masyarakat yang memiliki akses dan pemahaman yang baik terhadap pendidikan akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta mampu memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mendukung produktivitas dan kreativitas mereka. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan di desa tidak hanya berdampak pada aspek individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Tabel 2. 5

Jumlah Penduduk tamat sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak/belum sekolah	52	15,03
2	Belum tamat SD/ sederajat	83	23,99
3	Tamat SD/ sederajat	89	25,72
4	SLTP/ sederajat	48	13,87
5	SLTA/ sederajat	48	13,87
6	Diploma I/II	4	1,16
7	Akademisi/ Diploma III/ S. Muda	2	0,58
8	Diploma IV/ Sastra I	20	5,78
JUMLAH		346	100

Sumber : data BPS Kab.Barito Timur (2023)

F. Mata pencaharian

Dengan kondisi sosial yang berbeda antara dusun yang berada di Desa Siong, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Siong sangat beragama, dan berdasarkan karakteristik yang berbeda. Penduduk Desa Siong kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani karet dan petani di perkebunan sawit.

Tabel 2. 6
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	252
2	Mengurus rumah tangga	80
3	Pelajar/mahasiswa	192
4	Pensiun	4
5	Pegawai negeri sipil (PNS)	2
6	Kepolisian RI (polri)	2
7	Perdagangan	15
8	Petani/perkebunan	232
9	Konstruksi	9
10	Karyawan honorer	9
11	Buruh harian lepas	23
12	Buruh tani/perkebunan	26
13	Tukang batu	14
14	Tukang kayu	2
15	Tukang las/pandai besi	3
16	Tukang jahit	2
17	Mekanik	2
18	Guru	3
19	Bidan	1
20	Sopir	30

21	Pedagang	10
22	Perangkat desa	4
	Jumlah	917

Sumber : data BPS Kab.Barito Timur 2023 (Diolah)

G. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Siong termasuk masyarakat yang homogen, hal ini dibuktikan bahwasanya masyarakat Desa Siong mayoritas beragama Islam (603 Orang) yang disusul oleh masyarakat beragama kristen (265 Orang) kemudian agama hindu (42 Orang) dan Agama Katholik (7 orang). Tingkat kemayoritasan agama islam di Desa Siong sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Desa Siong, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang. *Political will* pemerintah desa dalam pengembangan wisata di Desa Siong tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial dan budaya masyarakat, termasuk aspek keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat secara tidak langsung membentuk cara pandang, sikap, serta partisipasi mereka terhadap kebijakan desa, termasuk dalam hal pengembangan wisata.

H. Budaya

Kehidupan budaya masyarakat di Desa Siong masih sangat kental dan terjaga, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Hal ini wajar mengingat mayoritas penduduk Desa Siong memeluk agama Islam. Nilai-nilai budaya yang berlandaskan kearifan lokal masih dipelihara dengan baik oleh sebagian besar warga, serta tetap dijadikan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tradisi adat yang berkembang di desa ini banyak dipengaruhi oleh praktik keagamaan serta warisan kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur. Pengaruh budaya timur yang sarat dengan nilai-nilai keislaman pun menjadi bagian penting dalam membentuk pola hidup dan tata nilai masyarakat Desa Siong hingga saat ini.

Salah satu contoh nyata adalah tradisi "Haulan", yaitu ritual peringatan kematian yang diselenggarakan pada hari ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan setiap tahunnya setelah kematian anggota keluarga. Dalam tradisi ini, warga berkumpul untuk membaca Yasin dan Tahlil serta berbagi makanan sebagai bentuk sedekah. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan keagamaan, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi antar warga desa. Selain itu, budaya gotong royong dalam bentuk masih sangat kental di Desa Siong. Praktik ini terlihat jelas ketika ada kegiatan pembangunan fasilitas umum, persiapan pernikahan, atau bahkan dalam pengembangan Taman Anggrek Hitam. Warga secara sukarela menyumbangkan tenaga dan pikiran tanpa mengharapkan imbalan langsung.

Nilai kebersamaan ini menjadi modal sosial yang kuat dalam setiap program pembangunan desa, termasuk inisiatif konservasi anggrek hitam. Selain itu juga masih banyak terdapat budaya-budaya adat Dayak yang masih dilakukan oleh beberapa warga desa untuk melestarikan budaya adat Dayak. Masyarakat yang beragama kaharingan biasanya pada waktu tertentu mengadakan acara mira kaayat yaitu sebuah pesta syukuran setelah panen ketika masa panen padi tiba yang disebut "masi". Mira kaayat diisi dengan memasak makanan bersama sama dan membuat kue "wadai rawek" sebagai makanan khas nya. Selain itu, ada tradisi balian yaitu biasanya diisi dengan tarian dan musik tradisional serta pertemuan adat. Ada pula upacara "Balian" yang dipimpin oleh Balian (dukun adat) untuk berbagai keperluan seperti penyembuhan penyakit atau tolak bala. Filosofi masyarakat Dayak tentang keseimbangan alam sangat relevan dengan upaya pelestarian anggrek hitam, di mana tanaman ini dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan lingkungan yang harus dijaga keberlangsungannya. Perpaduan budaya Islam dan adat Dayak ini menciptakan harmoni sosial yang unik di Desa Siong. Masyarakat menjalankan ritual keagamaan Islam sambil tetap menghormati dan bertoleransi dengan tradisi leluhur Dayak. Sinergi budaya ini menjadi fondasi kuat bagi *political will* pemerintah desa dalam mengembangkan Taman Anggrek Hitam, karena keputusan-keputusan pembangunan selalu

mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

I. Kondisi Ekonomi Desa Siong

Struktur perekonomian Desa Siong menunjukkan pola yang umum terjadi di daerah pedesaan dengan karakteristik agrikultur dominan. Pada tingkat dasar, kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat dipenuhi oleh sektor perdagangan skala kecil yang tersebar dalam bentuk warung-warung sembako. Warung-warung ini menjadi penyangga yang memfasilitasi kebutuhan pokok masyarakat, meskipun dengan skala usaha yang terbatas dan jangkauan pasar yang cenderung lokal. Sementara itu, tulang punggung ekonomi desa sesungguhnya bertumpu pada sektor pertanian dengan fokus pada budidaya tanaman perkebunan berupa kelapa sawit dan karet.

Kedua komoditas ini menjadi "primadona" atau prioritas ekonomi masyarakat karena beberapa faktor karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang relatif stabil di pasar dan kondisi geografis dan iklim Desa Siong sangat mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan tersebut serta pengelolaan perkebunan sawit dan karet telah menjadi pengetahuan turun-temurun yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Dominasi sektor perkebunan ini menunjukkan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap lahan, yang menjadi karakteristik masyarakat agraris. Mayoritas penduduk menggantungkan pendapatan utama mereka dari hasil perkebunan, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai pekerja perkebunan. Pola ekonomi ini menciptakan siklus pendapatan yang umumnya mengikuti pola panen dan fluktuasi harga komoditas di pasar global. Sektor ekonomi lainnya seperti pedagang dengan skala yang lebih besar (toko, waserda) hanya menyerap sebagian kecil dari populasi penduduk.

J. Kondisi Infrastruktur Desa

Desa Siong memiliki berbagai macam infrastruktur yang tidak dapat dipungkiri, infrastruktur di Desa Siong terdapat yaitu jalan, jembatan titian

usaha tani, internet desa, listrik, drainase air bersih untuk masyarakat serta pendidikan dan sarana prasarana lainnya.

1. Transportasi dan Perhubungan

Panjang Jalan Desa Siong Pada Tahun 2017 ini untuk Jalan Desanya±5 Km (5000M) yang terdiri dari Jalan Kabupaten 32Km, Jalan Desa 5 Km serta Jalan Lingkungan 5 Km.

2. Telekomunikasi dan Informasi

jaringan komunikasi di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur telah berlangsung sejak era 1990-an. Pada masa itu, bentuk komunikasi yang digunakan meliputi layanan telekomunikasi dari Telkom, sambungan telepon kabel, interkom, serta surat-menyurat melalui Kantor Pos. Memasuki tahun 2000-an, perkembangan teknologi mulai merambah desa ini, ditandai dengan masuknya jaringan telepon seluler (HP) seperti Telkomsel dan beberapa penyedia layanan lainnya. Bahkan, akses terhadap jaringan internet juga telah tersedia, sehingga membuka peluang komunikasi dan informasi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Siong. Sedangkan Listrik Negara (PLN) itu sendiri ke Desa Siong sudah masuk sejak Tahun 1980-an, meskipun baru sebagian kecil yang memasang Listrik sebagiannya lagi masih menggunakan penerangan Lampu dan lainnya tetapi pada masa sekarang semua rumah telah mempunyai listrik.

3. Energi

Secara umum, hampir 90% masyarakat Desa Siong sudah menikmati pasokan listrik, karena jaringan listrik telah menjangkau daerah-daerah RW yang terpencil sekalipun. Meskipun masih ada sebagian warga yang belum bisa memasang sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi, namun berkat rasa kekeluargaan dan kerukunan yang kuat di antara warga, keluarga yang belum memasang listrik dapat memanfaatkan listrik dengan menyambung dari tetangga yang sudah memiliki sambungan listrik.

Dengan demikian, hampir seluruh warga Desa Siong kini sudah dapat menggunakan listrik.

K. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Siong : 25.000 Ha

Perkebunan : 10.32 Ha

Pekarangan : 1.075 Ha

Tegalan : 800 Ha

Sarana umum lainnya :12.800 Ha

Desa Siong terdiri dari : 02 RW dan 06 RT

· RW 01 : RT. 01 – RT.03

· RW 02 : RT.04 – RT.06

L. Pemerintah Desa Siong dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pemerintah Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, antara lain:

a. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Bendahara Desa.

b. Pelaksana Teknis, terdiri dari:

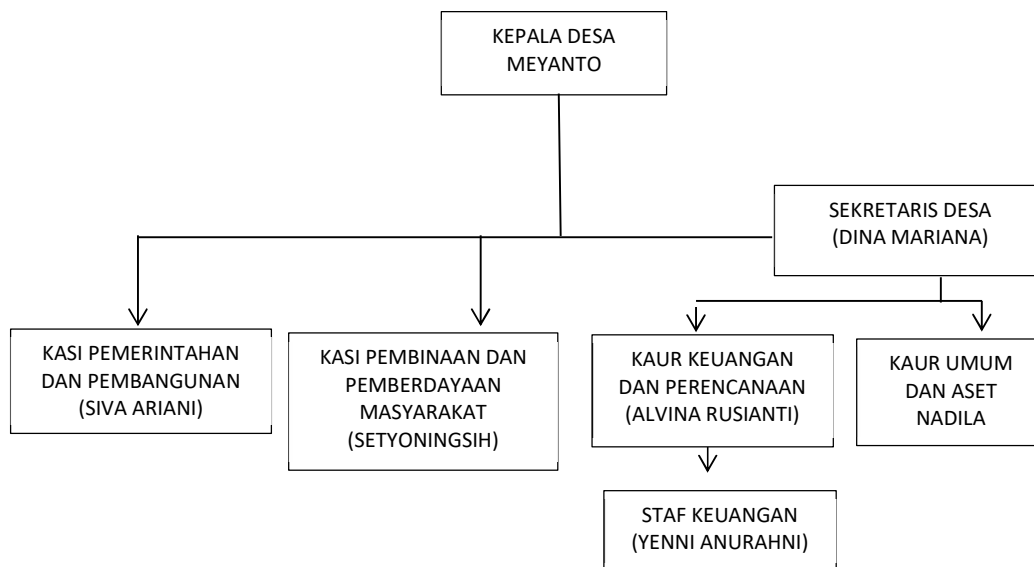
1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Pelaksana Kewilayahan/RW & RT

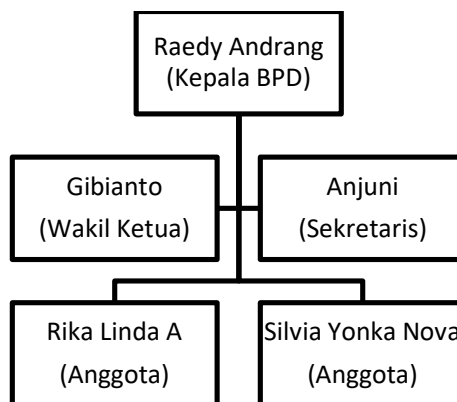
1. SOTK desa

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi



Sumber : Profil Desa Siong (2024)

Gambar 2. 2
Struktur Badan Permusyawaratan Desa



Sumber : Profil Desa Siong (2024)

b. Sumber Daya Kelembagaan

Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Siong, Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Majelis Ulama Indonesia Desa

(MUID), Karang Taruna, PKK, Linmas, BUMDes, PSM, Gapoktan, RT/RW, Organisasi Pemuda, Organisasi Kesenian, dan lembaga-lembaga yang lainnya. untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 7
Kelembagaan dan Organisasi Data Desa Siong 2017

No	Jenis Organisasi/Kelembagaan	Jumlah Anggota/ Lembaga	Lokasi
1	Badan Permusyawaratan Desa	2	Siong
2	LPMD/LKMD	1	Siong
3	MUI	1	Siong
4	PKK	1	Siong
5	Linmas	2/1	Siong
6	Karang Taruna	1	Siong
7	BUMDES	1	Siong
8	Posyandu	20/2	Siong
9	Polindes	2	Siong
10	RW	2	Siong
11	Kelompok Tani	6	Siong
12	DKW Masjid	1	Siong
13	Partai Politik	3	Siong
14	Kelompok Senam	1	Siong
15	Unit Simpan Pinjam	3	Siong
16	Koperasi	2	Siong

Sumber : Profil Desa Siong (2024)

c. Sarana Lainnya

Saat ini, sarana yang tersedia di Desa Siong mencakup berbagai fasilitas, antara lain sarana pelayanan umum, sarana keagamaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana sosial, sarana olahraga, infrastruktur jalan, serta

sarana ekonomi dan informasi. Kepemilikan sarana-sarana ini terdiri dari aset desa, milik masyarakat, serta sebagian dimiliki oleh pihak swasta dan yayasan lainnya.

L. Profil Taman Anggrek Desa Siong

Taman anggrek hitam (*Coelogyne Pandurata*) Desa Siong adalah kebun anggrek alami. Keunikan taman ini terletak pada keberadaan anggrek yang tumbuh secara alami tanpa rekayasa sejak puluhan tahun silam, maka dari itu ditentukan oleh seluruh masyarakat Desa Siong secara mufakat menjadi kebun anggrek tanpa adanya rekayasa pembuatan, tapi anggrek sudah tumbuh secara alami. penetapan kebun anggrek ini dilakukan atas pemikiran pengurus desa dan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki kegemaran terhadap tanaman anggrek tentang peluang besar kawasan ini dijadikan aset Desa Siong dan sumber PADes serta dapat dijadikan wisata anggrek. Penetapan ini juga dilakukan atas dasar terbatasnya tempat pelestarian anggrek, keprihatinan atas merajalelanya pengambilan anggrek orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi serta keprihatinan akan terancamnya kelestarian anggrek atas pembukaan lahan sawit atau tambang yang tidak terkendali (Kemenparekraf,2022)

Lokasi lahan ini terletak di dalam wilayah Desa Siong, sekitar 4 km dari pusat desa, tepatnya di jalan negara yang mengarah ke Desa Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Barito Selatan. Berdasarkan pengukuran menggunakan GPS, kawasan pelestarian ini memiliki luas sekitar 9,8 hektar, yang terdiri dari hutan alami dan sebagian kecil area basah atau rawa. Wilayah kebun anggrek dan konservasi ini sudah dikenal oleh masyarakat Desa Siong dengan nama “Magaram” sejak lama, diwariskan secara turun-temurun. Di tengah-tengah kebun anggrek hitam tersebut terdapat jalan setapak yang digunakan oleh warga desa untuk pergi ke ladang atau kebun mereka, yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Berdasarkan cerita dari tetua desa, tanaman anggrek di wilayah ini sudah tumbuh dengan subur dan alami sejak waktu itu, tanpa adanya campur tangan manusia dalam perawatannya.

Keberadaan anggrek di kawasan ini telah ada sejak tahun 1950-an, tumbuh subur secara alami tanpa campur tangan manusia. Pada masa itu, anggrek dianggap sebagai tanaman biasa dan tidak menarik perhatian. Namun, seiring waktu, terutama sejak tahun 2007, anggrek hutan mulai diburu untuk dikoleksi dan diperdagangkan. Meskipun terjadi pengambilan besar-besaran, populasi anggrek di kawasan ini justru semakin bertambah, menunjukkan kekuatan alam yang luar biasa. Pada tahun 2008, kesadaran masyarakat dan aparat desa untuk melestarikan kawasan ini mulai tumbuh. Momentum ini semakin kuat ketika pada pertengahan tahun 2008, Kecamatan Paju Epat terbentuk secara definitif dengan camat pertama, Ibu Ina Karuniani Gandrung, yang merupakan pecinta anggrek. Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kepala desa yang baru terpilih pada tahun 2009, Bapak Sidiyanto, menjadi titik balik dalam pengembangan Taman Anggrek Hitam.

Pada tahun 2010, melalui rapat desa, masyarakat sepakat menjadikan kawasan ini sebagai kebun anggrek primadona desa. Keputusan ini disambut antusias oleh camat dan masyarakat. Pada pertengahan tahun 2009, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya berakhir, dan yang terpilih sebagai kepala desa baru untuk periode 2009-2015 di Desa Siong adalah Sidiyanto, seorang yang memiliki ketertarikan dalam mengelola anggrek. Pada tahun 2010, atas inisiatif bersama dengan kepala desa Sidiyanto, muncul keinginan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kebun anggrek unggulan desa. Dalam sebuah rapat desa, niat tersebut disampaikan dan diterima dengan sangat baik oleh seluruh masyarakat. Wilayah kebun anggrek ini tidak menjadi milik Desa Siong dan tetap merupakan aset desa selamanya. Pembangunan awal kebun anggrek ini dilakukan secara swadaya, mengandalkan gotong royong masyarakat serta alokasi dana desa yang masih terbatas. Seiring berjalannya waktu, kepemilikan lahan ini secara de facto tetap berada dalam pengawasan komunitas adat, tetapi secara administratif telah menjadi aset desa yang dikelola di bawah kewenangan Pemerintah Desa Siong. Status ini kemudian diperkuat dengan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) sekitar tahun 2017, yang mengatur pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan taman untuk kepentingan

konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Dan sekarang berada dibawah peraturan desa baru karena adanya pergantian kepala Desa Siong. Taman Anggrek Hitam ini berada di bawah pengelolaan desa. Awalnya taman ini dikelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) namun kemudian statusnya diatur dalam Peraturan Desa (Perdes), yang mengindikasikan bahwa taman ini merupakan aset desa di bawah tanggung jawab pemerintah desa, meskipun pengelolaannya melibatkan Pokdarwis. Setelah diberlakukannya Perdes, taman ini diharapkan dapat mandiri secara finansial. Saat ini taman sedang ditutup sementara, pengesahan Perdes justru membawa tantangan baru. Setelah taman dimasukkan dalam Perdes, dana dari hasil wisata masuk ke dalam kas desa, dan tidak bisa digunakan langsung untuk operasional taman. Sebelum adanya Perdes, operasional taman bisa ditunjang oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk untuk menggaji penjaga taman. Namun setelah Perdes disahkan, sumber dana tersebut tidak lagi dapat digunakan secara fleksibel dan pengeluarannya harus melalui prosedur resmi. Seiring waktu, karena dana tidak tersedia dan kunjungan sepi, pengelolaan menjadi pasif. Kini, taman tidak memiliki struktur pengelola aktif. Pemerintah desa merencanakan akan menghidupkan kembali Pokdarwis agar pengelolaan bisa dilanjutkan.

Taman Anggrek Desa Siong dimulai pada tahun 2015, dengan tujuan utama untuk melestarikan anggrek hitam yang langka. Pada tahap awal, taman ini mendapatkan dukungan dari perusahaan Adaro, yang menyumbangkan beberapa fasilitas seperti pagar keliling, rumah pohon, dan tempat bunga. Bentuk bantuan ini adalah sumbangan dalam bentuk natura, bukan uang tunai, yang diberikan secara per proyek. Pada periode 2018 hingga 2020, taman anggrek ini berkembang dengan cukup baik dengan adanya dukungan dari Dinas Pariwisata. Namun, setelah disahkannya Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan taman anggrek, pengelolaan dana yang berasal dari hasil wisata taman ini mengalami pembatasan Pengelola/Organisasi. Pada awalnya sebelum adanya peraturan desa, taman anggrek ini dikelola oleh beberapa masyarakat Desa Siong. Taman ini memiliki peraturan desa dan pada awalnya

rekrutmen masih dengan cara manual memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa yang dipercaya dan di rekrut untuk mengelola taman anggrek ini sebelum adanya pengelola yang resmi. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan Taman Anggrek Hitam adalah terbatasnya anggaran yang tersedia, baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Sebelum disahkannya Peraturan desa, dana yang diperoleh dari hasil kunjungan wisata ke taman ini dapat langsung digunakan untuk pengelolaan, termasuk membayar gaji penjaga taman. Namun, setelah Peraturan desa disahkan, pengelolaan dana menjadi lebih terikat oleh peraturan, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan dana yang ada. Meskipun demikian, taman ini sempat menghasilkan pendapatan pada tahun 2018-2019, yang digunakan untuk membiayai pengelolaan taman. Namun, setelah disahkannya Peraturan desa, taman anggrek hitam dianggap harus mandiri dalam hal pembiayaan dan pengelolaan kegiatan wisata. Semua kegiatan dan pengelolaan dilaksanakan di bawah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan melibatkan karang taruna. Bantuan terhadap taman ini berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam desa maupun dari luar.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Desa Siong secara rutin mengalokasikan anggaran dari Dana Desa sekitar Rp150 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk pembangunan fisik seperti pos jaga, jalur wisata, papan informasi, dan gazebo, serta pelatihan bagi pengelola taman. Selain itu, terdapat juga bantuan dari Dinas Pariwisata dalam bentuk pelatihan, pemasaran digital, dan promosi dalam event tingkat provinsi maupun nasional. Proses pemberian bantuan umumnya diawali dengan musyawarah desa, penyusunan rencana kerja tahunan (RKPDDes), kemudian disusul dengan penyusunan proposal kepada instansi terkait. Program yang diusulkan juga selaras dengan visi pembangunan jangka menengah desa, khususnya dalam sektor lingkungan dan pariwisata. Bantuan dari perusahaan seperti Adaro diberikan secara tidak rutin, tergantung program CSR mereka. Bentuk bantuannya berupa natura, seperti pagar, rumah pohon, dan fasilitas taman. Bantuan tersebut tidak diberikan setiap tahun, dan bersifat spontan sesuai inisiatif perusahaan. Selain itu taman ini mendapat

pembinaan, dukungan promosi dan dukungan untuk branding melalui Jadesta dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Siong, pengembangan Taman Anggrek Hitam ditetapkan sebagai salah satu program bidang pariwisata dan lingkungan. Berdasarkan dokumen APBDes yang tercatat pada 2017 alokasi dana mencapai sekitar Rp150 juta per tahun, yang digunakan untuk infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan, dan promosi wisata. Selain itu, desa juga membuka ruang untuk kemitraan swasta dan dukungan dari program-program kementerian. Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya sempat dilakukan sebelum pengesahan Perdes, yaitu untuk membayar gaji penjaga taman atau mendukung kegiatan gotong royong. Namun setelah taman dinyatakan sebagai aset desa melalui Peraturan desa, seluruh pendapatan taman wajib masuk ke kas desa (PADes), dan pengeluaran untuk taman tidak dapat dilakukan secara fleksibel kecuali telah tercantum dalam APBDes tahunan.

Stakeholder dalam pengelolaan taman anggrek Desa Siong adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Siong

Pemerintah Desa Siong berperan sebagai Inisiator dan penggerak utama pengembangan taman wisata. Mengalokasikan Dana Desa sejak 2017 untuk mendukung pembangunan fasilitas, pelestarian anggrek, serta promosi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berbasis konservasi. Pemerintah Desa Juga berperan sebagai pemegang kewenangan utama yang mengatur arah kebijakan dan anggaran. Pemerintah desa juga menjadi fasilitator bagi masyarakat dan kelompok wisata. Pemerintah Desa Siong sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan dan pengembangan. Pemerintah Desa Siong memiliki peran penting sebagai inisiator, pengarah kebijakan, sekaligus fasilitator dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam. Pada tahap awal, pemerintah desa menunjukkan niat dan dukungan terhadap potensi wisata berbasis lokal, dengan menginisiasi pembentukan Pokdarwis

sekitar tahun 2015 sebagai lembaga pengelola taman. Pemerintah juga berperan dalam menyediakan lahan taman yang secara legal memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama desa. Selain itu, taman telah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJMDes dan RKPDes, serta diperkuat melalui Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur status taman sebagai aset desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terlibat dalam pembuatan Peraturan Desa Siong.

2. Masyarakat Desa Siong dan Karang Taruna

Masyarakat berperan sebagai Pemilik lahan dan pelaku utama konservasi yang berkontribusi Menjaga hutan dan habitat anggrek hitam secara turun-temurun. Menjadi pemandu wisata, penjaga taman, dan penjual produk lokal. Masyarakat Desa Siong memiliki peran yang cukup penting dalam tahapan awal pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam, meskipun keterlibatan tersebut belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Pada masa awal berdirinya taman sekitar tahun 2015, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan gotong royong, terutama dalam pembersihan lahan, penanaman bunga, serta pembangunan fasilitas awal seperti pagar dan jalan setapak. Kegiatan ini diprakarsai oleh Pokdarwis dan didukung oleh tokoh masyarakat serta aparat desa. Semangat gotong royong mencerminkan adanya antusiasme awal dari warga terhadap pengembangan potensi wisata lokal. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam kegiatan promosi, pengelolaan event, edukasi wisata, maupun sebagai tenaga relawan yang aktif di lapangan.

3. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Magaram Persada

Pokdarwis Magaram Persada pada dasarnya adalah ujung tombak pengelolaan lapangan dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam. Keberadaannya sangat penting sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam pariwisata desa, sekaligus agen perubahan dalam membangun kesadaran ekologis dan potensi ekonomi lokal. Untuk itu, revitalisasi Pokdarwis menjadi langkah strategis yang perlu segera

dilakukan demi keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas di Desa Siong. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Magaram Persada merupakan salah satu stakeholder utama dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Anggrek Hitam Desa Siong. Pokdarwis berperan sebagai pengelola langsung kegiatan wisata dan konservasi yang berlangsung di taman, terutama pada masa awal berdirinya objek wisata tersebut. Tugas utama Pokdarwis meliputi penyediaan jasa pemandu wisata (guide), pengelolaan fasilitas wisata seperti *camping ground*, serta penyelenggaraan kegiatan edukatif berbasis lingkungan bagi pengunjung. Anggota Pokdarwis terdiri dari pemuda desa dan warga lokal yang memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi alam. Mereka secara sukarela terlibat dalam berbagai kegiatan operasional, seperti merawat tanaman, membersihkan area taman, membangun sarana sederhana (seperti jalan setapak dan papan informasi), serta menyambut dan mendampingi wisatawan yang datang. Dalam pelaksanaannya, Pokdarwis tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

4. Pemerintah Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten

Berperan Pendukung dalam pengembangan destinasi wisata dengan Memberikan pelatihan, bantuan promosi, dan fasilitas pendukung wisata yang bertujuan Mendorong potensi lokal agar masuk dalam jaringan destinasi unggulan daerah. Dinas Pariwisata berwenang dalam hal perencanaan, pendampingan, promosi, serta fasilitasi pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.

5. Sektor Swasta : Perusahaan Pama (Adaro) dan Sawit

Berperan Investor potensial dalam pengembangan wisata, Pelaku usaha lokal yang menyediakan jasa pendukung wisata dan memberikan bantuan bantuan dalam bentuk natura kepada Desa Siong. Perusahaan

swasta PAMA (PT Pamapersada Nusantara), yang bergerak di sektor pertambangan dan beroperasi di sekitar wilayah Desa Siong, merupakan salah satu stakeholder eksternal yang sempat berkontribusi dalam pengembangan awal Taman Anggrek Hitam. Peran PAMA terwujud melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), meskipun sifat keterlibatannya tidak berlangsung secara rutin maupun berkelanjutan. Kontribusi konkret yang diberikan oleh PAMA berupa bantuan natura, yaitu dalam bentuk pembuatan pagar taman, rumah pohon, dan tempat bunga, yang seluruhnya diberikan sebagai upaya mendukung pembangunan wisata alam berbasis potensi lokal. Bantuan tersebut menjadi fondasi awal dalam mempercantik kawasan taman dan menarik minat kunjungan masyarakat sekitar. Namun demikian, dalam kenyataannya, keterlibatan PAMA tidak terjalin secara berkelanjutan. Bantuan bersifat insidental dan tidak terikat pada program tahunan. Artinya, perusahaan memberikan dukungan sesuai dengan waktu dan agenda internal mereka, bukan berdasarkan kebutuhan strategis jangka panjang taman. Hal ini mengindikasikan bahwa peran PAMA sebagai stakeholder bersifat pendorong awal, tetapi bukan penggerak utama dalam pengelolaan taman. Hingga kini, tidak ada nota kesepahaman (MoU) atau rencana kerja sama formal antara PAMA dan Pemerintah Desa Siong terkait pengembangan wisata secara khusus.

Taman Anggrek Hitam Desa Siong memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keunikan utama Taman Anggrek Hitam Desa Siong terletak pada keberadaan anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*) yang tumbuh secara alami di kawasan ini. Anggrek hitam dikenal sebagai salah satu spesies anggrek langka dengan karakteristik bunga yang memiliki kombinasi warna hijau dan hitam yang unik. Keindahan bunga anggrek hitam, yang umumnya mekar pada musim tertentu, menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Beberapa jenis anggrek yang dapat ditemui di sini antara lain:

- *Coelogyne Pandurata* (Anggrek Hitam): Spesies primadona yang menjadi ikon taman.

- Anggrek Merah (Anggrek Rirung): Menambah keindahan dengan warna yang mencolok.
- Kantong Semar (Gintuwung): Tanaman karnivora yang unik dan langka.
- Spesies Anggrek Lainnya: Masih ada beberapa jenis anggrek yang belum teridentifikasi namanya.

Selain itu juga terdapat tanaman obat di sekitar wilayah taman anggrek hitam, yaitu pasak bumi, sirih merah. untuk kayu nya seperti kayu resak, merantik, lelutung (pantung) dan aneka rotan hutan. Saat ini, Taman Anggrek Hitam Desa Siong memiliki luas sekitar 9,8 Ha hektar, dengan sebagian besar area masih berupa hutan alami yang menjadi habitat anggrek hitam. Beberapa fasilitas dasar yang telah tersedia antara lain:

- Jalan setapak sepanjang 100 meter untuk akses ke area taman
- Beberapa gazebo sederhana sebagai tempat istirahat pengunjung
- Papan informasi tentang anggrek hitam dan keanekaragaman hayati sekitar
- Area pembibitan anggrek yang dikelola secara sederhana oleh kelompok masyarakat

Meskipun telah memiliki potensi besar, pengembangan Taman Anggrek Hitam masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait fasilitas pendukung yang belum memadai dan pengelolaan yang belum optimal

Taman Anggrek Hitam Desa Siong menawarkan berbagai aktivitas wisata yang menarik, antara lain:

1. Jungle Tracking

Pengunjung dapat menjelajahi hutan alami dengan tiket masuk mulai dari Rp10.000. Aktivitas ini memungkinkan pengunjung menikmati keindahan anggrek, tanaman obat, dan pepohonan yang masih asri.

2. Mancakrida (Outbound)

Dengan harga mulai Rp10.000, pengunjung dapat menikmati wahana outbound yang dirancang untuk melatih keseimbangan dan keberanian, baik untuk anak-anak maupun dewasa.

3. Camping Ground

Terletak di tengah hutan, area camping ini menawarkan pengalaman bermalam di alam bebas dengan harga mulai Rp10.000.

4. Menara Pantau/Menara Pandang

Menara ini tidak hanya menjadi tempat istirahat, tetapi juga spot edukasi dan pemandangan alam. Dari sini, pengunjung dapat melihat keindahan anggrek, pepohonan, dan arena ketangkasan dengan tiket mulai Rp10.000. menara pandang juga dapat dikunjungi sebagai tempat edukasi, selain semilir angin dan pemandangan alam, pengunjung juga bisa menyaksikan arena ketangkasan dan melihat keindahan bermacam anggrek, kekayaan dengan jarak selang mata memandang

5. Bike Zipline (Sepeda Gantung)

Wahana sepeda gantung sepanjang 75 meter ini menawarkan sensasi adrenalin dengan harga Rp15.000. Pengunjung akan melayang di ketinggian 3 meter di atas tanah, dilengkapi tali pengaman dan helm untuk keamanan.

6. Fasilitas Pendukung

Taman ini dilengkapi dengan lahan parkir luas, mushola, toilet, tempat istirahat, dan grand house untuk acara besar.

BAB III

***POLITICAL WILL* PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA TAMAN ANGGREK HITAM**

A. Ketersediaan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Taman Anggrek Hitam

Taman Anggrek Hitam, yang terletak di wilayah hutan atau kebun masyarakat, merupakan aset milik pemerintah desa, yang menambah dimensi lain dalam upaya konservasi tanaman langka tersebut. Dalam hal ini, ketersediaan pemerintah desa tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lingkungan yang penting bagi kelestarian alam. Pemerintah desa juga berupaya untuk memastikan bahwa pengembangan wisata di Taman Anggrek Hitam tetap mengikuti peraturan yang berlaku, salah satunya adalah perlindungan terhadap anggrek hitam sebagai tanaman yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Tumbuhan yang Dilindungi, anggrek hitam masuk dalam kategori tanaman yang harus dilindungi dari eksploitasi yang berlebihan. Dengan demikian, ketersediaan pemerintah desa dalam mengembangkan wisata Taman Anggrek Hitam juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian flora yang ada di wilayah mereka. Pemerintah Desa Siong tidak hanya mengembangkan wisata untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam dan mematuhi regulasi yang ada (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1999).

Inisiatif merupakan langkah awal yang menunjukkan niat politik pemerintah desa yang bertujuan untuk mengembangkan wisata taman anggrek hitam Desa Siong. Inisiatif ini mencerminkan *political will* yang ada, di mana pemerintah desa mengambil langkah pertama untuk menggerakkan proses pengembangan. Niat awal yang kuat ini adalah fondasi penting dalam menggambarkan komitmen politik. Berawal dari habitat anggrek hitam yang tumbuh berkembang di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, namun kini menyusut akibat pembukaan lahan untuk kebutuhan perkebunan. Inisiatif pemerintah desa untuk mengembangkan wisata taman anggrek berawal dari

kesadaran dan keprihatinan kepala desa dan pemerintah desa serta beberapa tokoh. anggrek hitam itu tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, pemerintah desa merasa prihatin karena saat boomingnya anggrek hitam, banyak terjadi pencurian dan pengambilan sembarangan.

Dari hasil wawancara bersama Ketua BPD Siong Bapak Raedy Andrang yang merupakan salah satu pelopor berdirinya taman anggrek hitam Desa Siong sebagai berikut :

“Awalnya Pemerintah desa merasa prihatin karena orang berbondong-bondong memakai motor dan pickup mengambil bahkan menjarah anggrek hitam sembarangan tanpa seijin pemerintah desa Desa Siong, anggrek yang diambil dipamerkan di event-event dari hasil jarahan di Desa Siong. Pada masa itu pemerintahan masih belum terlalu jelas karena baru terbentuk sehingga belum dapat dikelola secara maksimal. karena kejadian penjarahan tersebut pemerintah Desa Siong prihatin serta melihat bahwa taman anggrek ini dapat menjadi aset lokal yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Setelah itu Pemerintah desa melakukan kavling daerah lahan taman anggrek hitam yang bertujuan untuk melestarikan anggrek hitam yang langka serta jenis anggrek lainnya. selain itu tujuan pemerintah desa dalam pengembangan ini adalah agar taman anggrek ini dapat menjadi simbol desa atau ikon Desa Siong dan keinginan pemerintah Desa Siong juga adalah mungkin suatu saat wisata taman anggrek hitam ini bisa menjadi aset desa yang menguntungkan atau menghasilkan dan dijadikan PADes (Pendapatan Asli Desa).” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ada bapak Raedy Andrang yang merupakan ketua BPD Desa Siong merupakan pribadi yang aktif dalam kegiatan pengembangan taman anggrek sekitar mulai dari tahun awal pembuatan taman anggrek Desa Siong. Inisiatif mengembangkan taman anggrek hitam ini yang memiliki tujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat dan menambah penghasilan masyarakat melalui destinasi wisata. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa adalah untuk melindungi flora dan fauna di Taman Anggrek Hitam, termasuk menjaga kelestarian anggrek hitam yang merupakan spesies langka yang berada di wisata taman anggrek hitam Desa Siong. Pengembangan wisata yang dikembangkan berbasis ekowisata, di mana wisatawan diarahkan untuk lebih menghargai alam tanpa merusak ekosistem yang ada, sehingga wisata taman anggrek hitam ini

terlihat natural tanpa merubah tanaman anggrek yang dulunya tumbuh di tengah wisata taman anggrek hitam ini. Pemerintah desa prihatin dengan kondisi taman anggrek yang terbengkalai dan sering dijarah anggrek nya, tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah Desa Siong. Keputusan pemerintah desa yang secara langsung mendukung inisiatif dan kesediaan pengembangan wisata.

Pemerintah Desa Siong dalam hal pengembangan wisata taman anggrek hitam memiliki kesediaan untuk mengembangkan wisata taman anggrek hitam, tetapi memiliki kendala dalam pendanaan sehingga tidak bisa mengeluarkan 100% dana desa untuk perbaikan atau pengembangan wisata taman anggrek hitam, karena tidak hanya wisata taman anggrek hitam yang menjadi skala prioritas pembangunan Desa Siong. Pemerintah Desa Siong sangat terbuka apabila bisa menjalin kerjasama, sehingga wisata taman anggrek hitam bisa lebih diperhatikan lagi dan banyak dikenal masyarakat luar daerah dengan catatan tidak merubah kondisi anggrek atau tumbuh-tumbuhan yang hidup alami di taman wisata anggrek hitam, pemerintah Desa Siong ingin mempertahankan sifat kealamian wisata taman anggrek hitam tanpa merubah walaupun taman anggrek hitam akan di perbaiki atau di kembangkan lagi.

Seperti wawancara berikut dari kepala Desa Siong Meiyanto sebagai berikut :

“Desa bersedia untuk memperbaiki atau mengelola taman anggrek hitam kembali dengan catatan ada dukungan dana atau dukungan dari pihak lain, seperti bantuan dari perusahaan maupun bantuan dari pemerintah pusat karena dari Desa Siong sendiri ada prioritas lain yang lebih penting.”
(Wawancara, 27 Agustus 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Siong Dina Mariana sebagai berikut :

“Pemerintah Desa Siong serta masyarakat Desa Siong bersedia gotong royong untuk memperbaiki wisata taman anggrek hitam yang terbengkalai dan bersedia untuk memperbaiki, mengelola wisata taman anggrek hitam dengan catatan ada dukungan dana atau dukungan dari pihak ketiga. Pemerintah Desa Siong juga bersedia mempergunakan dana desa untuk memperbaiki wisata taman anggrek hitam, tetapi tidak semua tercover oleh dana desa, sehingga perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat dan pihak lain. Bantuan dari pihak lain seperti Pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas pendukung wisata (toilet, area parkir, dll.), dan

fasilitas konservasi untuk menjaga kelestarian anggrek hitam yang dibantu oleh pihak ketiga. Pemerintah Desa Siong bersedia bekerja sama dengan dinas pariwisata, dengan tujuan meningkatkan minat kunjung masyarakat Desa Siong itu sendiri atau dari masyarakat luar daerah dan Melibatkan masyarakat Desa Siong dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam pengembangan wisata dan bisa ikut serta mengawasi jalannya pengelolaan”. (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Kesediaan dalam mengembangkan wisata taman anggrek juga dilihat dari kesediaan pihak melalui dinas pariwisata yang selalu mendukung dan pihak ketiga yang mendukung pengembangan taman anggrek hitam. Menurut hasil wawancara pemerintah Desa Siong berkeinginan untuk mengembangkan objek wisata taman anggrek, hal ini terlihat dari keinginan untuk bisa merencanakan rancangan pembangunan kedepannya dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan objek wisata taman anggrek serta melakukan pembenahan sarana prasarana dan akses menuju taman anggrek hitam Desa Siong. Tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan keinginan tersebut tetapi juga dibantu oleh pemerintah desa dan tentunya pihak ketiga agar bisa mengembangkan secara optimal dan menjadikan taman anggrek sebagai wisata ikonik Desa Siong.

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki kesediaan yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan taman anggrek hitam Desa Siong, tetapi mereka memiliki beberapa masalah yang menghambat dan ingin segera diselesaikan oleh pemerintah dengan harapan wisata ini dapat dibuka kembali dan dijalankan serta menjadi wisata unggulan di daerah kecamatan Paju Epat. Pemerintah Desa Siong menunjukkan kesediaan dalam melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Taman Anggrek Hitam. Partisipasi masyarakat dalam event atau kegiatan yang terkait dengan pengelolaan wisata memperlihatkan komitmen pemerintah desa untuk membangun dukungan kolektif dan memastikan bahwa masyarakat memiliki andil dalam pengembangan ini. Ini mencerminkan bahwa pemerintah desa tidak mampu hanya bertindak sendiri, tetapi juga berusaha mengajak

masyarakat untuk mendukung dan terlibat aktif dalam upaya ini. Pemerintah Desa Siong mengambil peran penuh dalam pengelolaan wisata Taman Anggrek Hitam. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Desa Siong selalu melibatkan masyarakat sekitar serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa, yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata memiliki suara dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesediaan pemerintah Desa Siong bukan hanya soal menerima tawaran kerja sama, tetapi juga tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi mereka.

Meskipun niat inisiatif dan kesediaan sudah ada, realisasi dari kebijakan dan tindakan konkrit masih belum sepenuhnya terlaksana dan dari pemerintah desa belum ada Langkah konkrit. Selain itu, dana desa untuk pengembangan taman anggrek hitam selalu masuk ke dalam RPJMDes hanya saja dana itu berhenti diberikan karena taman anggrek sempat memberikan keuntungan dan hasil untuk pendapatan asli desa sehingga dari pemerintah daerah melepas anggaran tersebut karena merasa taman anggrek telah menghasilkan PADes dan tidak perlu bantuan lagi, tapi ternyata hal tersebut membuat kemunduran pada objek wisata sehingga turunnya pemasukan sampai berimpas tidak bisa membayar para pembersih dan penjaga taman.

Hal ini diterangkan dalam wawancara Bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) selalu menyertakan anggaran proyek-proyek pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam. Dulu Pemerintah kabupaten yang menyediakan pendanaan sehingga wisata taman anggrek hitam ini bisa di kembangkan lebih baik, tetapi dalam beberapa tahun ini pendanaan tersebut tidak ada dikarenakan taman anggrek sempat menghasilkan PADes, tetapi ternyata hal tersebut menjadi bumerang kemunduran wisata taman anggrek tersebut, sehingga taman anggrek terpaksa tutup sementara. Pemasukan dana yang masuk ke dana desa dari

hasil taman anggrek hitam sebenarnya tidak sebanyak itu, itupun untuk membayar pengelola dan penjaga taman anggrek dan kadang masing sering minus dan dulu ada beberapa bantuan Lembaga swasta atau investor yang tertarik untuk mengembangkan pariwisata di Desa Siong melalui investasi atau kerjasama untuk meningkatkan wisata taman anggrek hitam tetapi dalam beberapa tahun ini belum ada bantuan lagi. Kades sekarang akan membuat aturan yang memuat pembagian dana ke pengelola atau ke desa supaya jelas pembagiannya dan ada dasar dalam melakukan hal tersebut.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Untuk mewujudkan ide tersebut pemerintah desa berusaha meminta bantuan dari pihak ketiga untuk bisa membantu pembuatan dan pengelolaan taman anggrek. sebagaimana diungkap pada wawancara bersama Sekretaris Desa Siong Ibu Dina Mariana berikut :

“Pemerintah desa berbicara dengan pihak ketiga yang membantu wisata taman anggrek hitam, pertama perusahaan sawit mengisolasi area lahan anggrek karena terjadi kemarau panjang agar tidak terjadi kebakaran, karena pihak perusahaan sawit ini dekat dengan Desa Siong sehingga mereka membantu, kedua dari pihak adaro membantu membuat pagar kawat keliling, juga ada beberapa bantuan dari CSR, PT Sawit dan juga beberapa bantuan anggrek dari komunitas pecinta anggrek bahkan dari masyarakat desa atau pengunjung dari luar. bantuan dari adaro team, melalui PT.Pama dan diganti oleh BUMA dan bantuan mereka sampai sekarang tapi hanya tidak bisa dibantu setiap tahun karena daerah kalimantan selatan, tabalong dan daerah lainya banyak mereka bantu, misalkan bantuan tahun ini Desa Siong, mungkin tahun depan Desa Siong tidak dapat bantuan, karena perusahaan membantu di tempat wisata-wisata yang lain. Dari adaro mereka akan datang ke Desa Siong dan melihat apa yang diperlukan dan berkonsultasi dengan pemerintah Desa Siong, apa yang bisa diperbuat oleh perusahaan adaro atau apa yang perlu dibuat, bukannya semua perusahaan adaro tapi bertumpu pada data, kemarin perusahaan adaro membuat pagar besi untuk keluar masuk pengunjung. Perusahaan berkomitmen dengan pemerintah desa Desa Siong membantu wisata taman anggrek hitam, PT sawit dengan bantuan CSR, dengan bantuan memperbaiki jalan, karena pemerintah desa juga tidak bisa menarik bantuan dari PT sawit. Disamping itu ada juga anggaran desa yang dikeluarkan untuk wisata taman anggrek hitam ini, kurang lebih 2 tahun pemerintah desa menghentikan perbaikan di dalam taman anggrek hitam, karena jalan menuju wisata taman anggrek hitam ini putus, dan pemerintah desa desa membenahi dari luar dulu baru ke dalam”. (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara dapat menjelaskan bahwa kesediaan pemerintah desa dalam pengembangan cukup serius pada masa itu. dapat disimpulkan

bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak ketiga telah memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam pada beberapa tahun silam. Dukungan dari perusahaan sawit, PT Adaro, program CSR, serta komunitas pecinta anggrek dan masyarakat menunjukkan komitmen kolektif untuk melindungi dan mengembangkan kawasan wisata ini. *Political will* pemerintah desa terlihat dari kemauan mereka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dan mencari solusi atas keterbatasan yang ada. Pemerintah Desa Siong menunjukkan kesediaan dalam mengembangkan wisata Taman Anggrek Hitam. Kesediaan ini tercermin dalam sikap terbuka mereka terhadap berbagai bentuk kerjasama dan investasi yang dapat meningkatkan sektor pariwisata desa.

Namun, meskipun desa bersedia untuk bekerja sama dengan pihak luar, mereka juga sangat menjaga agar kontrol terhadap aset tanah tersebut tetap berada di tangan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sikap ini menunjukkan bahwa kesediaan yang dimiliki pemerintah desa bukanlah bentuk pembebasan kontrol sepenuhnya, tetapi lebih kepada kerjasama yang tidak melibatkan ikatan perjanjian yang mengikat secara formal. Kesediaan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah desa yang mengutamakan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa menyadari bahwa pengembangan wisata bukan hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelompok Pokdarwis. Kesediaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki pandangan yang inklusif dan demokratis terhadap pembangunan wisata, yang memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses tersebut.

Adanya respon positif pemerintah Desa Siong yang baru dalam mengembangkan taman anggrek hitam walaupun kondisi yang sedang terjadi yaitu taman anggrek tutup sementara dikarenakan permasalahan dana. Pemerintah Desa Siong yang sekarang mengusahakan perbaikan taman

anggrek hitam yang terbengkalai menjadi beroperasi kembali, serta membentuk kepengurusan yang baru dan terstruktur, sehingga nantinya taman anggrek hitam setelah di perbaiki dengan baik seperti pada wawancara dengan Kepala Desa Siong Meiyanto sebagai berikut :

“Taman anggrek ini sementara ditutup dan dari pemerintah desa mulai merencanakan perbaikan dan pembaharuan agar taman anggrek hitam ini bisa dikunjungi oleh masyarakat dan juga masih dalam proses untuk kepengurusan yang jelas untuk mengurus taman anggrek hitam supaya tidak terbengkalai lagi seperti dulu dan bisa menjadi PADes yang sangat menguntungkan bagi Desa Siong, pemerintah Desa Siong sangat berkomitmen untuk mengembangkan kembali wisata taman anggrek hitam, karena wisata anggrek hitam adalah ikon sekaligus aset Desa Siong yang sangat bagus bila di pamerkan ke berbagai kalangan masyarakat, pemerintah desa mengupayakan kepada PJ Bupati yang baru untuk meminta bantuan berupa dana untuk mengembangkan taman anggrek hitam menjadi hidup kembali”. (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Saat ini, Taman Anggrek Hitam sementara ditutup. Penutupan ini dilakukan untuk memberi waktu bagi pemerintah desa dalam merencanakan perbaikan dan pembaruan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari perlunya pembenahan yang signifikan untuk menarik kembali minat pengunjung. Faktor-faktor yang mungkin menjadi alasan penutupan sementara ini antara lain Kondisi fisik taman yang mungkin mengalami penurunan sehingga memerlukan perbaikan infrastruktur atau perawatan kembali, permasalahan dana dan kurangnya pengelolaan yang jelas. Dalam wawancara, disebutkan bahwa pemerintah desa masih mengusahakan adanya kepengurusan yang jelas untuk mengelola taman. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada masalah dalam manajemen, yang mungkin menjadi salah satu penyebab taman ini tidak beroperasi dengan baik. Teori tentang *political will* (Brinkerhoff, 2000) menyatakan bahwa kesediaan politik (*Political Will*) tidak hanya berbicara soal komitmen, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan nyata yang dapat diukur dalam bentuk kebijakan yang diambil dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam konteks ini, meskipun ada komitmen dan inisiatif dari pemerintah desa untuk mengembangkan taman anggrek, pengelolaannya belum sepenuhnya terealisasi secara efektif, terutama terkait

dengan pengelolaan keuangan dan koordinasi dengan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *political will* pemerintah desa kuat, faktor-faktor keterbatasan sumber daya dan kurangnya struktur organisasi yang jelas menjadi penghalang utama dalam pencapaian tujuan pengembangan taman anggrek hitam. Kepala Desa Siong menyebutkan bahwa taman anggrek ini merupakan ikon sekaligus aset penting bagi desa.

Selain itu pemerintah juga berusaha membentuk pokdarwis untuk pengelolaan taman anggrek yang lebih terstruktur seperti pada wawancara dengan Kepala Desa Siong Meiyanto sebagai berikut :

“Pemerintah desa sedang mengusahakan pembentukan kelompok pengelola wisata seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), yang bertanggung jawab atas operasional harian Taman Anggrek Hitam. Sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar karena adanya kepengurusan yang jelas. Pemerintah desa juga telah berencana bersama dinas lingkungan hidup untuk Memberikan dukungan administratif dan pendampingan teknis kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata, seperti pelatihan terkait manajemen wisata, pemasaran, hingga cara merawat ekosistem anggrek hitam tetapi masih belum direalisasikan. Kepengurusan harus dibentuk supaya pengelolaan wisata taman anggrek hitam jelas dan ada orang yang khusus mengurus di dalam wisata taman anggrek hitam, sehingga menghindari terbengkalai lagi karena ada pengurus yang jelas.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Dalam hal melibatkan Masyarakat diperkuat dalam Wawancara dengan Yenni Anugrahni berikut :

“Pemerintah desa selalu melibatkan karang taruna dalam pengembangan dan karang taruna bersedia bila ada ada program pemerintah Desa Siong untuk pengembangan wisata taman anggrek menjadi lebih baik lagi”. (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemerintah Desa Siong menunjukkan kesediaan untuk melibatkan masyarakat, termasuk karang taruna, dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Anggrek Hitam. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemberdayaan masyarakat agar terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan wisata. Kesediaan ini juga terlihat dari rencana pembentukan Pokdarwis sebagai kelompok pengelola wisata harian. Melalui pelibatan masyarakat dan

penyediaan informasi, pemerintah desa berupaya menciptakan kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga. Namun, keberhasilan inisiatif ini tetap bergantung pada realisasi dan pelaksanaan program secara nyata di lapangan. Pemerintah desa memahami pentingnya adanya struktur organisasi yang jelas dalam mengelola wisata agar operasionalnya berjalan lancar karena pada sebelumnya belum ada kepengurusan yang jelas sehingga sistem pengelolaannya juga menjadi kurang jelas. Namun, wawancara juga menunjukkan bahwa kepengurusan ini belum terbentuk, yang berarti pelaksanaan kegiatan wisata belum sepenuhnya optimal dan dijalankan dengan baik. Meskipun pemerintah desa memiliki niat kuat untuk mendukung, proses pembentukan kelompok pengelola yang jelas menjadi hambatan dalam realisasi kesediaan yang dikemukakan pemerintah desa. Kesediaan pemerintah desa terlihat dari niat mereka untuk mendukung, tetapi langkah konkret seperti pembentukan kepengurusan dan kelompok pengelola wisata menjadi kunci agar pengelolaan dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Dengan adanya pengurus yang khusus menangani operasional wisata, pengelolaan taman anggrek tidak akan terbengkalai lagi. Kesediaan pemerintah desa untuk mendukung kepengurusan yang lebih terorganisir menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan wisata dalam jangka panjang. Namun, tantangan utama adalah pembentukan kelompok pengelola tersebut, yang belum terealisasi secara penuh. Kesediaan pemerintah desa sangat terlihat dalam hal rencana pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembentukan kelompok pengelola wisata seperti Pokdarwis. Kendala dalam realisasi rencana dan pembentukan kelompok pengelola wisata (Pokdarwis) menjadi tantangan yang menghambat implementasi sepenuhnya dari *political will* tersebut. Seperti pada wawancara dengan Raedy Andrang Ketua BPD Siong sebagai berikut :

“Faktor utama pemerintah Desa Siong dalam mendukung lahan anggrek yaitu dibentuk atau dikelola oleh pemerintah Desa Siong sendiri dan pihak kecamatan sangat mendukung usulan pemerintah Desa Siong dalam pembentukan wisata taman anggrek hitam, manajemen, promosi dan pengelolaan nya adalah kewenangan oleh pemerintah Desa Siong dan

diperlukan kepengurusan yang jelas, pemerintah Desa Siong sangat mendukung dan masyarakat Siong mengikuti dukungan tersebut dan ada event atau kegiatan masyarakat dilibatkan juga.“ (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Adanya dukungan dari pihak kecamatan terhadap usulan pemerintah Desa Siong menunjukkan bahwa pengembangan wisata ini mendapatkan dukungan di luar tingkat desa. Dukungan dari tingkat kecamatan ini memperkuat kesediaan pemerintah Desa Siong karena mereka tidak hanya beroperasi dalam batas internal desa tetapi juga mendapat dukungan lintas tingkat pemerintahan. Hal ini bisa dipandang sebagai indikasi bahwa pengembangan Taman Anggrek Hitam bukan hanya prioritas lokal, tetapi juga bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas. Terkait alokasi anggaran, pemerintah Desa Siong tidak menetapkan anggaran yang pasti untuk pengembangan Taman Anggrek Hitam. Alokasi dana bergantung pada ketersediaan anggaran desa dan urgensi kegiatan lain. Keberhasilan pengembangan pariwisata sering kali bergantung pada kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pemerintah Desa Siong menunjukkan kesediaan untuk melibatkan masyarakat, seperti karang taruna, dalam pengelolaan taman, yang mencerminkan pemahaman bahwa partisipasi lokal dapat memperkuat keberlanjutan pengelolaan wisata. Namun, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang bertanggung jawab atas operasional taman anggrek masih dalam proses.

Kesediaan pemerintah Desa Siong dalam mendukung pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Kepemilikan taman sebagai aset desa menjadi faktor dominan, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Meiyanto bahwa pemerintah tidak akan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak ketiga karena statusnya sebagai aset milik desa. Potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengembangan wisata ini, meskipun sebelumnya tidak terlalu besar, tetap dipandang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor partisipasi masyarakat juga

berperan penting, terlihat dari pelibatan warga melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kegiatan gotong royong yang mencerminkan adanya dukungan kolektif. Aspek keberlanjutan pariwisata menjadi pertimbangan strategis, dimana pemerintah desa memandang pengembangan wisata sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi dan ekologis berkelanjutan. Dukungan eksternal dari Dinas Pariwisata dalam hal promosi wisata juga memperkuat kesediaan pemerintah untuk terus mengembangkan taman ini. Meskipun terdapat berbagai program pembangunan di desa dengan skala prioritas yang dinamis, pemerintah desa tetap menempatkan pengelolaan Taman Anggrek Hitam sebagai salah satu program utama yang dapat disesuaikan berdasarkan urgensi dan kebutuhan yang ada di desa.

Meskipun demikian, pemerintah desa berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran setiap tahun bagi pengembangan taman anggrek, meskipun jumlahnya mungkin tidak pasti, meskipun ada kendala finansial, kesediaan Pemerintah desa untuk tetap mendukung wisata tersebut tetap ada, walaupun mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama dalam anggaran karena banyak hal lain yang lebih prioritas dan memerlukan dana juga. Meskipun ada keterbatasan dalam hal anggaran, Pemerintah Desa Siong berusaha untuk tetap mengalokasikan dana bagi pengembangan taman anggrek setiap tahun. Tetapi dana tersebut cenderung kurang karena belum bisa membiayai para penjaga, pembersih dan lainnya. Itulah yang mengakibatkan taman anggrek tutup sementara. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesediaan politik (*Political Will*) untuk memprioritaskan pengembangan wisata, walaupun mungkin harus berhadapan dengan berbagai urgensi lain dalam pembangunan desa.

Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan desa dengan pengembangan pariwisata. Fleksibilitas anggaran yang mencerminkan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya bagi pengembangan pariwisata, meskipun disesuaikan dengan ketersediaan dana dan prioritas pembangunan

lain. Desa Siong menyadari bahwa dana desa tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk pengembangan Taman Anggrek Hitam karena terdapat prioritas lain yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa. Namun, kesediaan untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti perusahaan atau pemerintah pusat menunjukkan kesediaan untuk tetap mendorong pengembangan wisata, meski dengan keterbatasan internal. Ini mencerminkan salah satu karakteristik *political will* yang fleksibel, di mana pemerintah desa bersedia mengupayakan solusi lain untuk mencapai tujuan. Selain itu pemerintah desa berusaha Menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial, Bermitra untuk pengembangan konservasi anggrek hitam dan Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait di Desa Siong, terdapat kesediaan dari pemerintah desa untuk mendukung pengembangan taman Anggrek Hitam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana dan infrastruktur yang rusak, pemerintah desa menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan dan mengembangkan taman anggrek hitam sebagai salah satu aset desa yang potensial. Pemerintah desa berupaya mencari berbagai sumber dana, baik melalui anggaran desa, gotong royong masyarakat, maupun dukungan dari pihak ketiga seperti perusahaan swasta. Walaupun dana dari kabupaten telah dihentikan dan pengelolaan taman anggrek hitam tidak dapat berjalan optimal tanpa dana yang jelas, Pemerintah desa tetap bersedia untuk mengupayakan perbaikan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan yang rusak agar akses menuju taman menjadi lebih mudah. Selain itu, ada juga rencana untuk memperbaiki pengelolaan taman anggrek hitam dengan melibatkan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang akan mengambil alih pengelolaan taman. Pemerintah desa juga berusaha menjadikan taman anggrek hitam sebagai salah satu sumber manfaat ekonomi bagi desa.

Dukungan dari pemerintah desa sangat penting, terutama dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga dan perbaikan manajemen agar

pengelolaan taman anggrek hitam bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan. Konsep partisipasi masyarakat yang melibatkan Pokdarwis dan kelompok-kelompok lokal lainnya sangat relevan dalam pembangunan berkelanjutan, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti taman anggrek hitam, dapat mendukung proyek wisata tersebut..

Pemerintah desa sebenarnya telah menunjukkan inisiatif awal yang cukup positif. Pemerintah desa menyambut baik kehadiran bantuan dari pihak ketiga seperti perusahaan tambang Adaro dan Dinas Pariwisata, yang menunjukkan keterbukaan terhadap dukungan eksternal. Namun, kesediaan ini belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sosialisasi tentang pentingnya wisata dan potensi Taman Anggrek Hitam belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga partisipasi masyarakat pun menjadi lemah. Dalam praktiknya, sebagian warga menganggap taman ini sebagai proyek sementara tanpa arah keberlanjutan yang jelas, sehingga kesediaan pemerintah tampak belum membuahkan gerakan kolektif yang solid. Pemerintah Desa Siong menunjukkan kesediaan awal dengan membuka ruang musyawarah bersama masyarakat dalam mendiskusikan potensi wisata Taman Anggrek Hitam. Hal ini menunjukkan adanya minat untuk menggali potensi lokal yang bisa berdampak pada pembangunan desa.

Namun, kesediaan ini masih bersifat normatif dan belum maksimal. Pemerintah desa belum secara intensif menyosialisasikan potensi wisata ini kepada seluruh elemen masyarakat. Sehingga, meskipun ada kesediaan, namun belum diiringi dengan keterlibatan aktif seluruh pihak dan belum ada strategi yang konkret. Kesediaan pemerintah desa tampak dari sikap terbuka mereka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pariwisata, perusahaan swasta, dan tokoh masyarakat, tanpa menghilangkan kontrol atas aset desa. Mereka secara aktif melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan mengenai tata kelola taman. Meskipun secara normatif Pemerintah Desa Siong menyatakan memiliki *political will* berupa kesediaan dalam mengembangkan wisata Taman Anggrek Hitam, namun pernyataan tersebut tidak cukup

dibuktikan secara empiris di lapangan. Ketersediaan yang dimaksud seharusnya terwujud dalam bentuk kebijakan yang terukur, tindakan yang konsisten, dan hasil yang bisa dievaluasi secara objektif. Namun dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang jelas yang secara spesifik dan konsisten mencantumkan pengembangan Taman Anggrek Hitam sebagai prioritas pembangunan. Bahkan Peraturan Desa yang disebut-sebut sebagai bentuk ketersediaan tidak disertai dengan mekanisme implementasi dan evaluasi yang memadai dan masih dalam proses. Peraturan Desa yang dijadikan sebagai simbol komitmen tersebut, pada kenyataannya hanya memuat susunan kepengurusan Pokdarwis tanpa disertai uraian tugas, strategi pengembangan, indikator keberhasilan, maupun rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa kebijakan tersebut bersifat administratif, bukan refleksi dari kemauan politik yang serius dan menyeluruh.

Keterbatasan anggaran yang terus-menerus dijadikan alasan oleh pihak pemerintah desa memperlihatkan belum adanya usaha konkret untuk mengalokasikan dana secara proporsional bagi pengembangan wisata tersebut. Padahal, jika benar ada *political will*, pemerintah desa seharusnya mampu mengupayakan skema pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan pihak ketiga yang lebih aktif, pemanfaatan BUMDes, atau dana CSR dari perusahaan sekitar. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya ini tidak dijalankan secara maksimal, bahkan nyaris tidak ada inisiatif progresif yang bisa dicatat kecuali pada proses perbaikan jalan menuju taman. Di sisi lain, Pokdarwis yang telah dibentuk pun hanya sebatas struktur formal tanpa dukungan penguatan kapasitas atau pembiayaan yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Akibatnya, pengelolaan taman kurang berkembang, masyarakat yang semula dilibatkan justru diberhentikan dari peran mereka. Keterlibatan masyarakat hanya bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan. Ketika partisipasi masyarakat tidak dipertahankan dan fasilitas taman terbengkalai, maka ketersediaan pemerintah desa lebih tepat disebut sebagai bentuk retorika politik ketimbang kesungguhan niat. Hasil temuan menjelaskan

bahwa *political will* yang diklaim oleh Pemerintah Desa Siong tidak lebih dari sekadar wacana tanpa substansi. Kesiediaan yang diucapkan tidak diiringi oleh komitmen anggaran, program kerja yang konkret, pelibatan masyarakat yang konsisten, ataupun pengambilan kebijakan yang berdampak nyata. *political will* Pemerintah Desa Siong dalam konteks ini bersifat semu, tidak mencerminkan kehendak politik yang sejati dan masih kurang optimal dikarenakan masih belum adanya progres atau tindak lanjut dari kesiediaan pemerintah Desa Siong.

B. Komitmen Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata

Secara umum, komitmen dalam konteks pemerintahan mengacu pada kesiediaan pemerintah untuk secara konsisten berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tertentu. Komitmen ini mencakup dukungan dalam bentuk kebijakan, sumber daya, dan tindakan nyata yang diambil untuk mencapai visi atau misi yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Siong berkomitmen untuk memberdayakan taman anggrek agar dapat menjadi wisata yang berkelanjutan. Ini ditunjukkan melalui rencana dan tindakan ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata. Suparsa dan Widnyana (2020) mengemukakan bahwa pengelolaan pariwisata yang sukses membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa untuk pengembangan wisata serta dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan wisata, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas wisata tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi aktif warga desa.

Komitmen pemerintah Desa Siong tercermin dari wawancara bersama kepala Desa Siong Meiyanto sebagai berikut :

"Pemerintah Desa Siong berkomitmen untuk mengatur ulang pengelolaan Taman Anggrek Hitam agar dapat diperbaharui dan dikelola dengan lebih baik. Sebelum memulai perbaikan, pemerintah desa berencana untuk mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) guna membahas langkah-langkah yang akan diambil dalam pengelolaan

wisata tersebut. Kepala Desa menekankan pentingnya pembentukan struktur kepengurusan yang jelas dan terorganisir dengan baik agar koordinasi antar pihak yang terlibat dapat berjalan lancar. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar Taman Anggrek Hitam tidak kembali terbengkalai seperti sebelumnya.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Dalam perencanaan dan pengelolaan juga diperjelas oleh sekretaris Desa Siong dina mariana berikut:

“Pemerintah Desa Siong mendukung penuh berbagai kegiatan atau event yang dilaksanakan di Taman Anggrek Hitam. Selain itu, mereka juga bersedia untuk meminjamkan fasilitas yang ada di wisata tersebut untuk kegiatan besar yang diadakan oleh pihak luar. Namun, untuk pengelolaan langsung kegiatan tersebut, pemerintah desa akan menyerahkan tanggung jawab kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dengan syarat bahwa Pokdarwis telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan yang terstruktur melalui Musdes. Setelah Pokdarwis memiliki kepengurusan yang jelas dan terstruktur, pemerintah desa akan menyerahkan pengelolaan langsung kepada mereka, khususnya dalam menjalankan kegiatan dan event besar yang diselenggarakan di Taman Anggrek Hitam.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Siong berkomitmen untuk mengambil peran utama dalam pengelolaan wisata Taman Anggrek Hitam mengingat taman anggrek ini merupakan aset Desa Siong. Mereka bertanggung jawab atas manajemen harian, promosi, dan pengembangan destinasi wisata ini. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Desa Siong, karena Taman Anggrek Hitam adalah aset berharga bagi desa dan layak dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Salah satu langkah awal yang akan diambil adalah mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas secara rinci langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan wisata. Kepala Desa menekankan pentingnya pembentukan struktur kepengurusan yang jelas dan terorganisir agar koordinasi antar pihak yang terlibat dapat berjalan dengan baik. Komitmen ini bertujuan untuk menghindari kejadian sebelumnya, yaitu terbengkalainya taman anggrek, yang disebabkan oleh ketidakjelasan pengelolaan dan kurangnya pengawasan yang efektif. Dengan adanya Musdes, diharapkan keputusan dan langkah pengelolaan dapat diambil secara bersama-sama,

melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta membangun kesepahaman yang lebih solid tentang peran masing-masing dalam pengelolaan wisata. Sementara itu, pernyataan Sekretaris Desa Siong, Dina Mariana, memperjelas bahwa Pemerintah Desa Siong mendukung penuh berbagai kegiatan atau event yang dilaksanakan di Taman Anggrek Hitam. Pemerintah desa tidak hanya mendukung kegiatan tersebut, tetapi juga bersedia meminjamkan fasilitas yang ada di wisata tersebut untuk kegiatan besar yang diadakan oleh pihak luar. Pengelolaan pariwisata yang sukses memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, yang tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan tetapi juga dalam implementasi kebijakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Komitmen pemerintah yang jelas akan memastikan kelangsungan dan keberlanjutan pariwisata, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (Suparsa & Widnyana, 2020, p. 50).

Selain itu, Pemerintah desa juga sedang dalam proses pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk membantu pengelolaan harian, Pemerintah desa menganggap pembentukan kelompok pengelola adalah langkah yang perlu untuk memastikan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata secara langsung. Pokdarwis hanya akan diberi tanggung jawab penuh setelah mereka memiliki kepengurusan yang jelas dan terstruktur, yang akan disepakati dalam Musyawarah desa. Meskipun pemerintah desa memberikan kebebasan bagi Pokdarwis untuk mengelola kegiatan, mereka tetap memegang kendali dalam memastikan adanya struktur yang tepat dan transparansi dalam pengelolaan. Pembentukan Pokdarwis dengan kepengurusan yang jelas bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dan kejelasan dalam pengelolaan jangka panjang, sekaligus menghindari ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah desa. Hasil wawancara menunjukkan political will yang kuat dari Pemerintah Desa Siong untuk memastikan pengelolaan Taman Anggrek Hitam dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dalam upaya mereka untuk membentuk struktur pengelolaan yang terorganisir, melibatkan masyarakat

secara aktif, dan bekerja sama dengan kelompok lokal untuk mengelola kegiatan wisata. Pemerintah Desa Siong juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan pihak luar, dengan tetap memastikan bahwa pengelolaan tetap berada dalam kerangka yang jelas dan terkontrol. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa berharap Taman Anggrek Hitam dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Dalam usaha menjadikan taman anggrek ini berkelanjutan dan diminati pengunjung dijelaskan dalam wawancara bersama Kaur Umum Nadilla sebagai berikut:

“Pemerintah desa berusaha mempromosikan wisata taman anggrek hitam di sosial media, dan dinas pariwisata juga turut membantu promosi wisata taman anggrek hitam di sosial media, dengan tujuan wisata taman anggrek hitam bisa ramai pengunjung” (Wawancara, 26 Agustus 2024)

Pemerintah Desa Siong berusaha mempromosikan wisata taman anggrek hitam supaya menarik pengunjung dari luar daerah untuk mengunjungi wisata taman anggrek hitam ini, pemerintah Desa Siong meminjamkan fasilitas kepada dinas pariwisata untuk diadakannya event dan dinas pariwisata juga ikut andil dalam hal mempromosikan wisata taman anggrek hitam, sehingga nantinya harapan pemerintah Desa Siong untuk wisata taman anggrek hitam ini ada pengunjung yang datang untuk sekedar menonton atau memainkan wahana yang tersedia di wisata taman anggrek hitam. Komitmen ini juga mencakup dukungan terhadap promosi melalui media sosial, yang diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung. Melalui kolaborasi ini, pemerintah desa tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga membuka peluang untuk memanfaatkan jaringan luar dalam upaya memajukan sektor pariwisata desa. Komitmen Pemerintah desa untuk mendukung operasional wisata melalui kerja sama dengan dinas pariwisata menunjukkan *political will* untuk membangun pengelolaan wisata yang berkelanjutan, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi kelestarian ekosistem.

Selain pada pengembangannya pemerintah Desa Siong juga berkomitmen dalam melengkapi fasilitas wisata seperti pada wawancara dengan kepala Desa Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

“Pemerintah Desa Siong berkomitmen melengkapi fasilitas di wisata taman anggrek hitam dan memperbaiki yang tidak layak digunakan dan pemerintah Desa Siong berkomitmen mengatur ulang kepengurusan atau pengelola wisata taman anggrek hitam, supaya jelas struktur kepengurusan wisata taman anggrek hitam.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pernyataan dari Pemerintah Desa Siong ini menggambarkan komitmen yang kuat dalam pengembangan dan pengelolaan Taman Anggrek Hitam. Dengan berfokus pada perbaikan fasilitas yang sudah ada, pemerintah desa menunjukkan keseriusannya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata tersebut. Komitmen untuk memperbaiki fasilitas yang tidak layak digunakan mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi pengunjung. Selain itu, pemerintah desa juga menyadari pentingnya adanya kepengurusan yang terstruktur dengan jelas. Pengaturan ulang pengelolaan wisata ini menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan koordinasi yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih efektif di masa depan, dengan membentuk struktur organisasi yang jelas dan terorganisir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wisata Taman Anggrek Hitam dapat dikelola secara berkelanjutan, menghindari kebingungan dalam pembagian tugas, dan memastikan keberlanjutan program wisata tersebut.

Terkait keputusan dan pengembangan taman anggrek dimuat dalam wawancara dengan Kepala Desa Meiyanto sebagai berikut :

“Pemerintah Desa Siong tidak akan menyerahkan pengelolaan Taman Anggrek Hitam kepada pihak ketiga secara penuh, karena taman anggrek ini merupakan aset milik Desa Siong. Meskipun demikian, pemerintah desa terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, asalkan koordinasi dilakukan dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Semua keputusan terkait pengelolaan harus diambil secara bersama-sama, tanpa ada tindakan sepihak. Pemerintah desa menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam pembentukan dan pengelolaan wisata ini sangat penting, dan mereka berkomitmen untuk terus menjaga serta mengawasi jalannya pengembangan Taman Anggrek Hitam agar tetap

berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi desa.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Hasil wawancara menjelaskan komitmen Pemerintah Desa Siong untuk tetap mempertahankan kendali atas pengelolaan Taman Anggrek Hitam sebagai aset desa. Walaupun terbuka untuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah desa menegaskan bahwa pengelolaan taman anggrek tidak akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak luar. pemerintah desa berusaha untuk menjaga kelangsungan dan kedaulatan destinasi wisata tersebut, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan tujuan desa. Pemerintah desa juga menegaskan peran sentral mereka dalam proses pengawasan dan pengelolaan taman anggrek, yang menunjukkan komitmen mereka untuk mengembangkan wisata ini, tidak hanya dari aspek operasional, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat setempat. pemerintah Desa Siong sangat mengharapkan adanya kerjasama sehingga nantinya wisata taman anggrek hitam ini bisa berkembang terus-menerus, fasilitasnya juga akan terpenuhi dan lengkap. Pemerintah desa menyadari pentingnya memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan wisata, dan komitmen mereka tercermin dalam upaya untuk membentuk kelompok pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kepengurusan yang jelas.

Meskipun kelompok ini masih dalam proses pembentukan, keseriusan pemerintah desa untuk memastikan adanya manajemen yang terstruktur menjadi indikator penting dari komitmen mereka dalam pengelolaan jangka panjang. Pemerintah desa ingin memastikan bahwa taman wisata tidak akan terbengkalai di masa depan. Pemerintah desa juga menunjukkan komitmen melalui pelibatan masyarakat dalam event dan kegiatan wisata. Hal ini memperlihatkan *political will* pemerintah desa yang ingin membangun dukungan kolektif dari masyarakat untuk menyukseskan pariwisata desa.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Pemerintah desa ingin menciptakan rasa memiliki di antara warga, sehingga pengelolaan wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat itu sendiri.

Dalam pengembangan taman ,terdapat permasalahan yang terjadi dalam Upaya berkomitmen pada pemerintah Desa Siong seperti pada wawancara dengan kepala Desa Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

"Pemerintah Desa Siong memiliki komitmen untuk melengkapi atau menambah fasilitas di wisata Taman Anggrek Hitam. Namun, karena terbatasnya dana, rencana tersebut belum dapat direalisasikan. Bantuan dari pemerintah pusat tidak ada, karena pada masa lalu, saat wisata Taman Anggrek Hitam masih dibuka, tempat tersebut memang menghasilkan keuntungan meskipun tidak terlalu besar. Oleh karena itu, laporan yang diajukan oleh Pemerintah Desa Siong ke pusat menunjukkan bahwa wisata ini sudah dianggap menghasilkan. Akibatnya, pemerintah pusat tidak lagi memberikan dana untuk pengelolaan wisata Taman Anggrek Hitam. Seiring berjalannya waktu, karena keterbatasan dana, pengelolaan wisata ini mulai terabaikan dan akhirnya terbengkalai. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Siong memutuskan untuk menutup sementara wisata Taman Anggrek Hitam." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemerintah Desa Siong menunjukkan komitmen untuk meningkatkan fasilitas wisata Taman Anggrek Hitam, namun mereka terhambat oleh keterbatasan dana. Walaupun tempat wisata ini pernah menghasilkan keuntungan, jumlahnya tidak signifikan, sehingga pemerintah daerah merasa bahwa tidak perlu lagi memberikan bantuan dana untuk pengelolaannya. Akibat keputusan tersebut, pemerintah pusat menghentikan aliran dana yang sebelumnya diberikan. Keputusan pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan dana didasari oleh fakta bahwa Taman Anggrek Hitam sudah dianggap sebagai tempat yang menghasilkan, meskipun hanya sedikit. Namun, keterbatasan dana yang dialami oleh pemerintah Desa Siong menyebabkan tempat wisata tersebut tidak lagi terurus, yang pada akhirnya berujung pada penutupan sementara. Meskipun ada potensi untuk mengembangkan wisata Taman Anggrek Hitam, faktor keuangan menjadi kendala utama. Pemerintah Desa Siong menghadapi kesulitan dalam mengelola wisata ini tanpa adanya dukungan dana yang memadai, baik dari pemerintah daerah maupun sumber

lain. Penutupan sementara Taman Anggrek Hitam menjadi langkah untuk mengevaluasi ulang kelangsungan dan potensi pengelolaan yang lebih baik di masa depan, dengan harapan bisa membuka kembali tempat tersebut jika ada dukungan yang lebih besar. Komitmen pemerintah dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari kebijakan yang mendukung keterlibatan semua pemangku kepentingan dan alokasi anggaran yang cukup untuk meningkatkan kapasitas pengelola pariwisata lokal." (Gössling, Scott, & Hall, 2015, p. 175). Sehingga komitmen ini bisa dikatakan terhambat karena permasalahan keuangan dan berimbas pada pengembangan wisata taman anggrek.

Tetapi walaupun mengalami permasalahan, pemerintah desa tetap selalu mengingat komitmen dan berusaha dalam pengembangan wisata seperti pada wawancara Bersama sekretaris Desa Siong Dina Mariana sebagai berikut :

“Pemerintah Desa Siong berusaha kembali mengajukan dana untuk wisata taman anggrek hitam kepada pj bupati yang baru nantinya untuk penjaga dan pemeliharaan wisata taman anggrek hitam dan nantinya akan melaksanakan gotong royong bersama masyarakat dan karang taruna untuk keberlanjutan taman anggrek.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Hasil wawancara menunjukan bahwa walau dalam permasalahan yang cukup serius, Pemerintah Desa Siong berusaha untuk bangkit kembali dan memberikan perhatian terhadap keberlangsungan wisata Taman Anggrek Hitam. Dengan adanya pergantian bupati, mereka berharap mendapatkan perhatian dan dukungan finansial dari pejabat yang baru agar bisa menjaga serta merawat wisata tersebut. Selain pengajuan dana, Pemerintah Desa juga mengandalkan semangat gotong royong dari masyarakat dan Karang Taruna sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan dan merawat Taman Anggrek Hitam. Gotong royong ini mengindikasikan bahwa masyarakat setempat ingin berperan aktif dalam menjaga wisata ini agar tetap berjalan dan berkembang, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Pemerintah Desa Siong berharap dana tersebut bisa dicairkan untuk pengembangan wisata taman anggrek hitam lebih lanjut, dengan bantuan dana tersebut bisa membayar penjaga dan pemeliharaan wisata taman anggrek hitam, supaya wisata taman

anggrek hitam terhindar dari sampah ranting-ranting pohon kering atau dedaunan kering yang jatuh, khususnya di wahana permainan atau sampah-sampah yang ada di pendopo bekas pengunjung, supaya wisata taman anggrek hitam ini bisa terlihat selalu bersih walaupun berada di dalam hutan.

"Komitmen politik terhadap sektor pariwisata berkelanjutan memerlukan integrasi antara kebijakan publik, alokasi anggaran, serta pengelolaan yang berbasis pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal." (Hall, 2007, p. 68). Artinya komitmen dalam pengembangan wisata taman anggrek ini memerlukan integrasi dan koordinasi antara kebijakan, anggaran dan kerjasama pemerintah dan masyarakat lokal, sehingga hal ini tidak terpisahkan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dan juga memerlukan komitmen nyata dan usaha lebih dari pemerintah desa.

Komitmen pemerintah Desa Siong dalam pengembangan wisata juga tercermin dalam alokasi sumber daya, terutama anggaran desa. Meskipun alokasi anggaran untuk Taman Anggrek Hitam tidak memiliki ketetapan pasti dan bergantung pada ketersediaan dana desa dan urgensi kegiatan lainnya, Pemerintah desa berkomitmen untuk mengupayakan alokasi anggaran setiap tahun untuk mendukung pengembangan wisata. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa Ibu Dina Mariana sebagai berikut :

"Komitmen pemerintah Desa Siong terhadap pengelolaan lahan Taman Anggrek Hitam merupakan salah satu program utama dan termasuk dalam skala prioritas. Namun, skala prioritas ini bisa berubah tergantung pada urgensi dan kebutuhan yang ada. Meskipun demikian, pemerintah Desa Siong juga harus mempertimbangkan berbagai program lain yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, meskipun perbaikan dan pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam sangat penting, ada juga berbagai aspek lain yang harus ditangani, sehingga pemeringkatan prioritas dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di desa." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pernyataan ini menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Siong dalam merencanakan program-program pembangunan. Mereka menyadari bahwa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki atau ditangani di desa, tidak hanya terkait dengan wisata Taman Anggrek Hitam. Ini menunjukkan bahwa pemerintah

desa memiliki pemahaman yang holistik terhadap berbagai kebutuhan yang ada, dan tidak memaksakan satu program untuk menjadi prioritas utama tanpa mempertimbangkan urgensi atau kondisi lain. Keputusan untuk mengubah prioritas ini menunjukkan kesiapan pemerintah desa untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, baik itu dalam hal anggaran, sumber daya, atau kebutuhan masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa meskipun wisata Taman Anggrek Hitam penting, pemerintah desa juga menyadari bahwa keberhasilan pembangunan di desa memerlukan perhatian terhadap berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan program lainnya. Prioritas ini bersifat dinamis dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang lebih mendesak atau lebih relevan pada saat tertentu.

Pemerintah Desa Siong menyatakan komitmennya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata Taman Anggrek Hitam dan bekerja sama dengan pihak luar seperti Dinas Pariwisata. Namun, hingga saat ini belum terlihat bukti konkret atau realisasi nyata dari komitmen tersebut di lapangan. Tidak ada pengelolaan yang terorganisir, kegiatan promosi belum berjalan secara konsisten, dan partisipasi masyarakat belum difasilitasi secara aktif. Komitmen yang disampaikan masih sebatas pernyataan tanpa tindak lanjut yang jelas, sehingga pengembangan wisata belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Meskipun menghadapi keterbatasan dana, Pemerintah Desa Siong tetap berkomitmen untuk menjaga dan merawat Taman Anggrek Hitam. Mereka berencana untuk mengajukan kembali dana kepada pihak yang berwenang untuk meningkatkan fasilitas dan melakukan pemeliharaan. Selain itu, mereka juga mengandalkan semangat gotong royong masyarakat dan Karang Taruna untuk menjaga kebersihan dan kelestarian wisata ini. Komitmen politik pemerintah desa tetap menjadi fondasi penting bagi pengembangan wisata ini, sebagaimana ditegaskan Mowforth dan Munt (2016) bahwa "Tanpa *political will* yang kuat dari pemerintah, sektor pariwisata tidak akan bisa berkembang dengan baik" Komitmen pemerintah desa untuk terus berupaya meningkatkan fasilitas dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan menunjukkan tekad mereka untuk menjadikan Taman Anggrek

Hitam sebagai sumber daya yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi desa. Hanya saja komitmen ini belum berjalan konsisten, hal ini terlihat dari tidak adanya tindak lanjut program secara berkelanjutan, minimnya koordinasi lintas sektor, serta belum dibentuknya struktur kelembagaan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan wisata secara resmi. Beberapa informan menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan pun belum cukup dan sering dialihkan ke program lain yang lebih prioritas.

Komitmen Pemerintah Desa Siong dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam secara normatif memang telah dinyatakan, bahkan dapat terlihat dari beberapa inisiatif seperti pelibatan masyarakat melalui pembentukan Pokdarwis dan upaya promosi wisata melalui media sosial atau kegiatan desa. Namun, komitmen semacam ini sejatinya masih berada dalam tahap permukaan dan belum menyentuh esensi substantif dari apa yang disebut sebagai komitmen pembangunan berbasis *political will* yang kuat. Tidak ada bukti empiris yang cukup untuk menunjukkan bahwa promosi tersebut dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berdampak luas. Demikian pula pelibatan masyarakat yang terkesan belum maksimal, karena tidak didukung oleh pendampingan, pelatihan, dan pembagian peran yang jelas. Padahal, dalam konteks desa wisata, keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai pelengkap simbolik, tetapi harus diinisiasi, difasilitasi, dan dikawal langsung oleh pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan kewenangan formal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki semangat untuk terlibat, mereka tetap bergantung pada dorongan awal dari pemerintah desa. Tanpa komando, arahan, dan dukungan nyata dari pemangku kebijakan desa, partisipasi masyarakat cenderung pasif. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa belum diterjemahkan dalam bentuk kebijakan afirmatif atau tindakan konkret seperti penyusunan program kerja jangka menengah, penganggaran khusus di APBDes, atau pembentukan unit kerja desa yang fokus menangani pengembangan wisata. Dengan kata lain, komitmen sudah diucapkan, tetapi belum dijalankan. Tidak adanya indikator

keberhasilan yang terukur, minimnya aksi konkret di lapangan, serta absennya evaluasi dan tindak lanjut dari program-program yang sudah pernah dicoba, menjadi bukti bahwa komitmen tersebut belum sampai pada level tindakan politik yang serius dan strategis. Oleh karena itu, meskipun Pemerintah Desa Siong telah menunjukkan indikasi komitmen awal dalam pengembangan Taman Anggrek Hitam, namun lemahnya implementasi dan ketiadaan bukti nyata di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum cukup kuat. Komitmen politik yang sejati menuntut lebih dari sekadar deklarasi tetapi harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, pengambilan risiko, alokasi sumber daya, dan keberanian untuk menjadikan sektor wisata sebagai prioritas pembangunan desa secara berkelanjutan.

C. Tindakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata

Pengembangan potensi wisata berbasis kekayaan hayati lokal, seperti Taman Anggrek Hitam, merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dikaitkan dengan upaya pelestarian, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menginisiasi, merancang, dan melaksanakan berbagai program yang menunjang optimalisasi potensi wisata tersebut. Tindakan-tindakan yang diambil mencerminkan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya dan memobilisasi partisipasi masyarakat. *Political Will* merujuk pada kemauan politik dari aktor pemerintahan untuk mewujudkan kebijakan publik, bahkan dalam kondisi sumber daya yang terbatas (Brinkerhoff, 2000). *Political Will* terhadap pengembangan Taman Anggrek Hitam tampak melalui sejumlah inisiatif awal yang cukup konsisten dan disertai dengan tindakan yang diusahakan oleh pemerintah desa dan memperlihatkan adanya keselarasan antara visi pembangunan desa, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi endemik tetapi pada kenyataannya belum dijalankan secara nyata. Peran pemerintah desa sebagai motor penggerak perubahan dapat terus dikembangkan melalui sinergi dengan stakeholder lain untuk menjadikan

taman ini sebagai contoh praktik baik pengelolaan wisata desa yang adaptif terhadap nilai konservasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

1. Langkah awal Pemerintah

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah melakukan identifikasi potensi lokal secara partisipatif melalui musyawarah desa atau forum-forum dialog antara tokoh masyarakat, kelompok tani, karang taruna, dan perangkat desa. Dalam konteks Taman Anggrek Hitam, pengenalan nilai ekologis dan ekonomi dari anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*) menjadi landasan utama. Langkah awal ini dijelaskan dalam wawancara bersama Sekretaris Desa Siong Ibu Dina Mariana sebagai berikut :

"Taman anggrek hitam masih punya pemerintah Desa Siong tetapi Pemerintah Desa tetap ikut campur tangan dengan memantau perkembangan wisata taman anggrek hitam, karena masih milik desa. Pemerintah Desa Siong berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan wisata taman anggrek hitam ini dengan dana desa dan juga melaksanakan musyawarah desa untuk membahas pengelolaan taman anggrek serta dalam RPJMDes banyak yang diusulkan walaupun tidak semua bisa direalisasikan, karena melihat banyak prioritas lain yang jauh lebih penting." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Hal ini juga diperjelas dalam wawancara bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

"Pemerintah Desa menyerahkan kepada Pokdarwis untuk pengurusan taman anggrek hitam, tetapi program yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa yaitu 5 orang untuk pengelola, pembersih, dan penjaga. Dana tersebut masih bisa dijalankan dengan dana desa karena anggaran masuk di APBDes." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat Desa Siong pada 27 Agustus 2024, dapat diinterpretasikan bahwa pengelolaan Taman Anggrek Hitam menunjukkan model kemitraan antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat lokal, dengan tetap mempertahankan kepemilikan aset oleh desa. Taman Anggrek Hitam merupakan aset milik Pemerintah Desa Siong, sehingga pemerintah desa tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangannya meskipun pengelolaan operasional telah diserahkan kepada

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sistem pengelolaan ini mencerminkan pendekatan desentralisasi terbatas, di mana pemerintah desa mendelegasikan wewenang operasional namun tetap mempertahankan kontrol strategis. Dari segi pendanaan, Pemerintah Desa Siong telah mengalokasikan dana desa melalui APBDes untuk menggaji lima orang pengelola yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembersihan, dan pengamanan taman. Kebijakan ini menunjukkan komitmen finansial pemerintah desa dalam memastikan keberlanjutan destinasi wisata tersebut. Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman anggrek dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melaksanakan musyawarah desa, yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan wisata ini. Taman Anggrek Hitam juga telah dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), menandakan adanya pengakuan formal terhadap nilai strategisnya bagi desa. Meskipun demikian, tidak semua usulan pengembangan taman dapat direalisasikan karena adanya pertimbangan prioritas lain yang dinilai lebih urgen dalam konteks pembangunan desa secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan realitas penganggaran desa yang harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas.

Program pengelolaan Taman Anggrek Hitam tidak hanya bertujuan untuk pengembangan pariwisata tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial-ekonomi. Seperti pada Pernyataan yang diberikan saat wawancara Ketua BPD Siong Bapak Raedy Andrang berikut :

"Ketika ada pembersih dan penjaga, taman rutin dibersihkan 3 kali seminggu, dan itu memberdayakan orang tua, janda, yang tidak berpenghasilan." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua BPD Siong, program ini secara khusus memprioritaskan pemberdayaan kelompok rentan seperti orang tua dan janda yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan penjadwalan pembersihan rutin tiga kali seminggu, program ini memberikan kesempatan kerja bagi kelompok marginal di desa, sehingga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial sekaligus mendukung pemeliharaan infrastruktur

pariwisata. Namun, seiring waktu, alokasi anggaran dihentikan karena taman dianggap sudah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Persepsi ini berasal dari pemerintah kabupaten, yang menyebabkan stopnya anggaran untuk taman dalam dokumen perencanaan desa. Seperti pada wawancara bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Ibu Setyoningsih sebagai berikut :

“Dana dari kabupaten langsung distop karena taman dianggap sudah menghasilkan, padahal kenyataannya taman ini belum bisa berjalan mandiri.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Setyoningsih, terdapat kesenjangan persepsi antara pemerintah kabupaten dan realitas di lapangan terkait keberlanjutan finansial Taman Anggrek. Pemerintah kabupaten telah menghentikan aliran dana ke taman tersebut dengan asumsi bahwa destinasi wisata ini telah mencapai tahap kemandirian finansial dan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk operasional sendiri. Namun, kenyataan di lapangan bertolak belakang dengan asumsi tersebut. Menurut pernyataan narasumber, taman belum mencapai tingkat kemandirian operasional yang diharapkan dan masih membutuhkan dukungan finansial eksternal untuk pengelolaannya. Penghentian dana ini menciptakan situasi sulit di mana potensi pengembangan taman terhambat karena kurangnya sumber daya keuangan. Kesenjangan ini menggambarkan tantangan umum dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan, di mana sering terjadi ketidakselarasan antara ekspektasi pemerintah tingkat atas mengenai kecepatan pencapaian kemandirian finansial dengan realitas pertumbuhan objek wisata di tingkat desa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kemandirian finansial.

2. Pengelolaan dan Pemerintah Desa

Pemerintah desa membentuk kelembagaan pengelola yang bersifat inklusif, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelembagaan ini bertugas merancang model bisnis wisata, menetapkan tata kelola operasional taman anggrek. Kelembagaan yang dibentuk juga bertugas mengintegrasikan aspek

pelestarian lingkungan, pengelolaan ekowisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam kasus taman anggrek hitam, pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan koleksi anggrek, pengembangan fasilitas edukasi, serta penataan kawasan agar layak dikunjungi. *Political Will* juga harus disertai dengan tindakan institusional, yaitu pembentukan regulasi, struktur pengelola, serta mekanisme akuntabilitas. Dalam wawancara disebutkan bahwa kepengurusan taman anggrek sedang proses pembentukan secara formal, agar Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaan kepada Pokdarwis, serta Karang Taruna. Namun, legalitas belum rampung karena SK dari pusat belum diterbitkan. Hal ini dijelaskan didalam wawancara bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

“Kami sudah wacanakan menyerahkan ke Pokdarwis atau Karang Taruna dan akan melaksanakan Musyawarah Desa, tapi SK pusat masih belum keluar, jadi belum legal.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Ini merupakan bentuk delegasi kewenangan dan pelibatan kelembagaan desa, meskipun terkendala oleh regulasi administratif dari pusat. Pemerintah Desa ingin membagi tanggung jawab, bukan melepaskan aset desa begitu saja. Sebagai bentuk komitmen fiskal, Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa untuk mendukung kegiatan operasional taman. Dana tersebut digunakan untuk menggaji petugas kebersihan dan penjaga taman. Namun, alokasi ini tidak berlangsung lama karena terjadi penghentian pemasukan dari taman dan pencoretan anggaran oleh kabupaten. Pernyataan ini juga ditambahkan oleh Sekretaris Desa Siong Ibu Dina Mariana berikut :

“Pemerintah desa berusaha memperbaiki tanpa bantuan dari pusat, tetapi tidak bertahan lama, karena tidak ada lagi pemasukan dua tahun kebelakang, dana desa dihentikan untuk memperbaiki wisata taman anggrek hitam. Karena tidak ada pemasukan, dan dianggap sudah menghasilkan, dana dari kabupaten langsung distop. Pengelola tidak lagi digaji dan taman tidak terurus.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Ketiadaan dana mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan pemeliharaan dan operasional taman, sehingga fasilitas menjadi terbengkalai. Hal ini menunjukkan bahwa *Political Will* dalam bentuk alokasi anggaran desa belum

dapat dipertahankan secara berkelanjutan karena tergantung pada keputusan eksternal dan pemasukan daerah. Namun, sejak dua tahun terakhir, tidak ada lagi dana yang bisa dialokasikan karena taman dianggap telah menghasilkan PAD sendiri oleh pemerintah kabupaten. Akibatnya, pembiayaan dari APBDes dihentikan, dan taman mengalami keterbengkelain karena tidak ada operasional rutin.

Pemerintah Desa Siong mengambil langkah alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan operasional taman. Dana ini digunakan untuk membayar petugas kebersihan, penjaga taman, serta untuk kebutuhan pemeliharaan rutin kawasan wisata. Namun, pengalokasian anggaran tersebut tidak berlanjut karena dana dari pemerintah kabupaten dihentikan, dengan alasan bahwa taman sudah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Padahal, secara aktual taman belum mampu menghasilkan pendapatan yang stabil dan signifikan. Akibatnya, kegiatan operasional terhenti, dan taman menjadi terbengkalai. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Political Will* dalam bentuk alokasi fiskal desa masih sangat bergantung pada intervensi kebijakan tingkat atas dan belum sepenuhnya mandiri.

Tindakan konkret berikutnya yang menunjukkan adanya *Political Will* adalah pengalokasian dana desa untuk mendukung operasional taman. Dalam tahap awal, Pemerintah Desa menetapkan anggaran melalui APBDes untuk menggaji petugas kebersihan, penjaga taman, dan pengelola teknis lainnya. Alokasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memandang taman bukan sekadar objek konservasi, tetapi sebagai entitas ekonomi yang memerlukan dukungan institusional dan fiskal. Akan tetapi, karena pemasukan dari taman tidak stabil dan pemerintah kabupaten menganggap taman telah mandiri, dana desa untuk pengelolaan taman dihentikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa *Political Will* di tingkat desa masih sangat rentan terhadap keputusan vertikal dari pemerintah daerah. Hal ini memperkuat argumen bahwa *Political Will* memerlukan otonomi fiskal yang kuat agar dapat berkelanjutan. Dalam hal ini, komitmen fiskal yang tidak konsisten justru melemahkan keberlangsungan proyek yang telah dirintis.

3. Infrastruktur

Pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk pembangunan sarana dasar seperti jalan akses menuju lokasi, papan informasi, pusat informasi wisata, gazebo, toilet umum, serta jalur interpretasi ekowisata. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, yaitu tidak merusak habitat asli anggrek hitam dan ekosistem sekitarnya. Pemerintah desa juga sering bermitra dengan Dinas Pariwisata Kabupaten untuk memperoleh bantuan teknis ataupun pelatihan. Taman Anggrek Hitam awalnya merupakan lahan masyarakat yang memiliki koleksi alami anggrek endemik Kalimantan. Pemerintah desa kemudian melakukan pemetaan dan kapling lahan untuk dijadikan kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata edukatif. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas sederhana seperti jalur wisata, grand house, gazebo, dan akses terbatas untuk kendaraan. Pengelolaan taman sempat berjalan secara aktif hingga dua tahun terakhir, sebelum terjadi stagnasi akibat kendala anggaran dan infrastruktur.

Permasalahan aksesibilitas menjadi salah satu faktor teknis yang paling menghambat keberlanjutan taman. Jalan menuju lokasi wisata mengalami kerusakan parah akibat longsor, dan kendaraan tidak bisa menjangkau area inti taman. Pemerintah desa telah merespons dengan mengajukan permintaan alat berat, tetapi peralatan yang dibutuhkan rusak dan tidak dapat segera digunakan. Akibatnya, pengunjung harus berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh, yang tentu menurunkan minat kunjungan, hal ini berdampak langsung terhadap turunnya jumlah kunjungan, sekaligus memperburuk kondisi ekonomi pengelolaan wisata tersebut. Di sisi lain, pengelolaan operasional menjadi lebih sulit karena mobilisasi sumber daya logistik terhambat. Dalam hal ini, meskipun terdapat *Political Will* dari Pemerintah Desa, keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada peralatan milik instansi lain menjadikan kemauan politik tersebut tidak dapat direalisasikan secara optimal. Ini sesuai dengan pandangan bahwa *Political Will* memerlukan dukungan sumber daya agar dapat efektif, sebagaimana dinyatakan oleh Brinkerhoff (2000) dalam

indikator keberhasilan kemauan politik: adanya kapasitas, otoritas, dan insentif.

Situasi ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun Pemerintah Desa memiliki kemauan untuk bertindak, dan mengupayakan solusi untuk perbaikan seperti diuraikan dalam wawancara bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto berikut :

“Karena jalan longsor sehingga berdampak kendaraan tidak dapat masuk, Pemerintah desa sudah meminta bantuan alat berat untuk memperbaiki jalan masuk menuju wisata taman anggrek hitam, tetapi masih dalam proses dikarenakan alat berat masih dalam keadaan rusak.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Kendala infrastruktur ini sangat mempengaruhi mobilitas pengunjung dan operasional taman secara umum. Meski akses masih dapat ditempuh dengan berjalan kaki, keterbatasan ini menjadi hambatan bagi pengelolaan dan pengembangan wisata yang lebih profesional. Kondisi ini menggambarkan salah satu tantangan klasik dalam pengembangan pariwisata di daerah pedesaan atau terpencil, di mana infrastruktur pendukung sering menjadi faktor kritis yang menentukan keberlanjutan destinasi wisata. Keterbatasan sumber daya dan peralatan untuk penanganan bencana di tingkat desa menjadi hambatan dalam merespons secara cepat terhadap kerusakan infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada kelangsungan operasional destinasi wisata.

4. Upaya Konservasi

Taman Anggrek Hitam tidak sekadar dijadikan tempat rekreasi, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat edukasi dan konservasi. Pemerintah desa berperan dalam merancang program pelatihan bagi pemandu wisata lokal, menyusun kurikulum konservasi yang bisa ditawarkan ke sekolah-sekolah, serta mengembangkan paket kunjungan berbasis kegiatan belajar untuk menciptakan nilai tambah wisata yang bersifat edukatif dan sekaligus mendukung konservasi jangka panjang. Hal ini juga bertujuan untuk

perlindungan terhadap spesies endemik agar tidak dirambah atau dieksploitasi oleh pihak luar. Sebagai tindak lanjut dari kepedulian itu, pemerintah desa melakukan tindakan dengan melakukan kapling terhadap wilayah taman, menjaga agar tidak terjadi perambahan atau kebakaran akibat musim kemarau. Kapling ini tidak hanya dilakukan untuk pelestarian flora, tapi juga mengatur tata ruang wilayah desa secara ekologis. Seperti pada wawancara bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto berikut :

“Kami melakukan kapling wilayah taman anggrek supaya bisa dilestarikan dan tidak mudah dirambah orang luar.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Langkah ini memperkuat *Political Will* dalam bentuk pengambilan kebijakan mikro di tingkat desa. Pemerintah Desa tidak hanya pasif menunggu bantuan dari luar, tetapi aktif mengatur pemanfaatan ruang untuk kepentingan jangka panjang. supaya nantinya wilayah tersebut bisa dilestarikan lebih baik lagi dan anggrek-anggrek yang tumbuh bisa dirawat dengan baik oleh penjaga atau pengelola wisata taman anggrek hitam, masih banyak lagi tanaman obat-obatan atau kayu yang bermanfaat di sekitar wilayah wisata taman anggrek hitam ini, sehingga pemerintah Desa Siong menjaga wilayah tersebut supaya terhindar dari terjadinya kebakaran hutan yang bisa menyebabkan anggrek dan tanaman obat-obatan ikut terbakar.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Bapak Raedy Andrang sebagai berikut :

“Pemerintah Desa Siong melakukan kapling daerah lahan taman anggrek hitam untuk melestarikan anggrek hitam yang langka dan menjadikannya simbol desa.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemerintah Desa Siong tidak hanya mengelola taman dalam kerangka ekonomi dan pelestarian, tetapi juga menjadikannya sebagai simbol identitas kultural desa. Melalui kegiatan promosi, penyediaan fasilitas umum seperti grand house, serta dukungan terhadap event komunitas, Pemerintah Desa berusaha menjadikan taman sebagai ikon desa yang dikenal luas. Strategi ini menandakan *Political Will* dalam dimensi kultural, yaitu kehendak untuk mengangkat identitas lokal menjadi nilai jual wisata sekaligus warisan

komunitas. Dalam banyak kasus pengembangan wisata desa, keberhasilan tidak hanya bergantung pada fisik dan anggaran, tetapi juga pada keberhasilan membangun narasi kolektif dan simbolisme yang dapat diterima oleh warga maupun pengunjung luar. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah desa memiliki kepedulian terhadap pelestarian hayati yang kemudian menjadi fondasi pengembangan taman berbasis konservasi. Pelestarian ini juga mencakup perlindungan tanaman obat-obatan dan vegetasi penting lain di sekitar kawasan.

5. Usaha Pelibatan masyarakat

Pemerintah desa memastikan bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam seluruh tahapan pengembangan wisata. Masyarakat diberdayakan sebagai tenaga kerja di kawasan wisata, mulai dari pemandu, penjaga kebun anggrek, pengelola parkir, hingga pengrajin souvenir. Pemerintah desa memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, digital marketing, dan pengemasan produk berbasis flora lokal. Dalam jangka panjang, pemerintah desa menargetkan tumbuhnya usaha mikro berbasis wisata. Pendekatan ini memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap taman wisata. Sebagai bentuk inisiatif partisipatif, Pemerintah Desa menggerakkan gotong royong masyarakat untuk membersihkan kawasan taman. Aksi ini bersifat insidental dan dilakukan saat dana operasional tidak tersedia. Seperti yang dijelaskan oleh Kaur Umum Ibu Nadilla berikut :

“Pemerintah desa dalam melaksanakan gotong royong selalu melibatkan masyarakat untuk menghidupkan kembali taman anggrek hitam.”
(Wawancara, 26 Agustus 2024)

Mobilisasi sosial ini merupakan bentuk *Political Will* dalam dimensi sosial, di mana sumber daya manusia menjadi tumpuan ketika sumber daya finansial tidak tersedia. Sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa Siong menginisiasi kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan taman dan merawat fasilitas yang ada secara insidental. Tindakan ini menunjukkan bahwa *Political Will* tidak selalu

diwujudkan dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam bentuk mobilisasi sosial. Namun, semangat kolektif ini belum dapat menggantikan kebutuhan struktural dalam pengelolaan taman, seperti keberadaan tenaga teknis, peralatan pendukung, dan dana pemeliharaan tetap.

Hal ini juga diperjelas dengan wawancara bersama anggota karang taruna Desa Siong Ibu Yenni Anugrahni berikut :

“Selain hanya melibatkan warga lokal, pengelolaan serta gotong royong juga melibatkan karang taruna sehingga terjalin koordinasi erat antar masyarakat dalam pengembangan wisata ini.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemerintah Desa secara konsisten mengorganisir kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat lokal sebagai strategi untuk menghidupkan kembali destinasi wisata tersebut. Pernyataan ini menyoroti dimensi kolaboratif yang lebih luas dari inisiatif ini. Pengelolaan taman dan kegiatan gotong royong tidak hanya melibatkan penduduk secara umum tetapi juga secara khusus mengintegrasikan Karang Taruna organisasi kepemudaan desa ke dalam proses tersebut. Pelibatan Karang Taruna ini menciptakan jembatan koordinasi yang efektif antara berbagai elemen masyarakat dalam konteks pengembangan wisata. Model pengelolaan kolaboratif ini mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) di mana warga tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pengembangan wisata tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan. Pendekatan ini berpotensi menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap Taman Anggrek Hitam di kalangan warga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif pengembangan wisata ini.

Dalam Hal pelibatan masyarakat juga ditambahkan dalam wawancara bersama warga desa Bapak Derman sebagai berikut :

“Warga masyarakat serta para lansia selalu diikutsertakan jika ada kegiatan gotong royong atau kerjabakti, sehingga tidak terbatas kepada yang muda saja, dan dulu para lansia sempat diikutsertakan bekerja membersihkan taman anggrek” (Wawancara, 26 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Derman, terdapat indikasi kuat tentang pendekatan inklusif dalam pelibatan masyarakat untuk kegiatan gotong royong di desa tersebut. Pernyataan menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong tidak terbatas pada kelompok usia produktif saja, tetapi secara sengaja menyertakan kelompok lansia yang sering kali termarginalkan dalam aktivitas pembangunan desa. Penekanan khusus pada keterlibatan lansia mengindikasikan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang menghargai kontribusi semua anggota masyarakat terlepas dari usia mereka. Ini mencerminkan filosofi gotong royong yang autentik, di mana proses tersebut tidak hanya berorientasi pada hasil fisik semata, tetapi juga pada aspek penguatan kohesi sosial dan transfer pengetahuan antar generasi. Pendekatan inklusif ini potensial memberikan manfaat ganda: secara sosial dapat memerangi isolasi yang sering dialami oleh kelompok lansia di pedesaan, sementara dari perspektif pembangunan dapat memanfaatkan pengalaman dan kearifan tradisional yang dimiliki oleh para lansia dalam konteks pengembangan desa, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti anggrek yang mungkin memiliki nilai kultural bagi masyarakat setempat.

Ketika dukungan anggaran dan teknis tidak tersedia, Pemerintah Desa Siong tidak berhenti pada ketidakmampuan, melainkan menggerakkan kekuatan sosial berupa gotong royong masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pembersihan taman dan pemeliharaan fasilitas yang masih memungkinkan untuk dirawat tanpa memerlukan dana besar. Akan tetapi, gotong royong tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan, yang mencakup aspek legalitas, pembiayaan, dan manajemen operasional yang juga diperlukan dalam pengembangan wisata taman ini. Warga diajak untuk membersihkan dan menata kawasan taman dengan sumber daya yang minim. Gotong royong ini menunjukkan dimensi lain dari *Political Will*, yaitu upaya Pemerintah Desa dalam mempertahankan inisiatif publik melalui penguatan partisipasi warga. Meskipun upaya ini tidak mampu menyelesaikan masalah struktural taman

seperti perbaikan infrastruktur atau legalisasi kelembagaan, mobilisasi sosial merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam situasi krisis. Dalam studi pembangunan desa, bentuk partisipasi ini disebut sebagai *social capital-based governance*, di mana pengelolaan program publik dilakukan melalui jejaring sosial dan rasa memiliki bersama terhadap aset desa.

Setiap kebijakan, kerja sama, atau perubahan dalam pengelolaan taman selalu dikonsultasikan dengan BPD, Pokdarwis, dan masyarakat desa. Seperti pada wawancara dengan Sekretaris Desa Siong Ibu Dina Mariana sebagai berikut :

“Kami tetap koordinasi dengan dinas dan musyawarah dengan BPD agar dapat mengambil kebijakan yang tepat.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Political Will yang terjadi sesuai wawancara bersifat inklusif dan demokratis, dengan melibatkan multipihak untuk menjamin legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. *Political Will* Pemerintah Desa Siong juga terlihat dalam prinsip kehati-hatian dan kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Setiap bentuk kerja sama, penerimaan bantuan, maupun perubahan kebijakan senantiasa dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan kelompok pengelola seperti Pokdarwis. Prinsip musyawarah ini penting karena menjamin bahwa pengelolaan taman tidak bersifat sentralistik, melainkan berbasis partisipasi warga. Dalam perspektif tata kelola yang baik (*good governance*), bentuk keterlibatan multipihak ini disebut sebagai *inclusive decision-making*, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, *Political Will* Pemerintah Desa tidak hanya diarahkan pada tujuan material, tetapi juga proses yang demokratis dan inklusif.

Keterlibatan dalam karang taruna dijelaskan dalam wawancara bersama anggota karang taruna Desa Siong Ibu Yenni Anugrahni sebagai berikut:

“Karang Taruna baru aktif dan menerima SK. Karang Taruna Bersedia jika ada program dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan taman anggrek hitam” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Wawancara ini mengungkapkan sikap kooperatif dari Karang Taruna terhadap inisiatif pengembangan Taman Anggrek Hitam. Organisasi kepemudaan desa ini menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan destinasi wisata tersebut. Kesiadaan Karang Taruna untuk terlibat mencerminkan potensi kolaborasi yang produktif antara pemerintah desa dengan organisasi kemasyarakatan lokal. Ini menunjukkan adanya modal sosial yang berharga dalam bentuk kesiapan pemuda desa untuk berkontribusi pada pembangunan pariwisata lokal. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna memiliki potensi signifikan untuk memberikan energi, kreativitas, dan tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

Namun keterlibatan mereka masih bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif dari Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran Karang Taruna dalam pengembangan Taman Anggrek Hitam masih belum sepenuhnya proaktif atau mandiri. Ada peluang untuk meningkatkan partisipasi mereka dari sekadar responden terhadap program pemerintah menjadi inisiator yang dapat mengusulkan dan mengimplementasikan ide-ide inovatif untuk pengembangan taman. Pernyataan ini juga menyiratkan pentingnya perencanaan program yang jelas dari Pemerintah Desa yang dapat mengakomodasi partisipasi Karang Taruna. Tanpa adanya program yang terstruktur, potensi sumber daya manusia dari organisasi kepemudaan ini mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan Taman Anggrek Hitam.

Selain pelibatan masyarakat dalam gotong royong, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pada wawancara bersama Kasi Pemberdayaan Ibu Setyoningsih sebagai berikut :

"Pemerintah desa melakukan pelibatan masyarakat melalui berbagai kegiatan mingguan dan acara hiburan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi dalam pengembangan Taman Anggrek Hitam. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memelihara taman tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama di antara warga. Melalui pendekatan ini, kami berharap masyarakat dapat secara aktif

berkontribusi pada keberlanjutan destinasi wisata yang menjadi kebanggaan desa kita." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Political Will yang diterjemahkan menjadi aksi ini terlihat dari konsistensi pemerintah desa dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan yang terjadwal secara rutin (mingguan) untuk melibatkan masyarakat. Pendekatan melalui kegiatan mingguan menunjukkan komitmen berkelanjutan. Ini mengindikasikan adanya alokasi sumber daya yang terencana dan berkelanjutan, yang merupakan indikator penting dari *Political Will*. Pendekatan melalui kegiatan hiburan menunjukkan *Political Will* yang memahami konteks sosial-budaya masyarakat desa, di mana program pemberdayaan yang dikemas dalam bentuk hiburan biasanya lebih efektif dalam memobilisasi partisipasi warga dibandingkan dengan pendekatan yang terlalu formal atau kaku.

6. Kemitraan dan Promosi Wisata

Dalam upaya promosi, pemerintah desa mengembangkan jejaring dengan berbagai aktor, termasuk media lokal maupun sosial, komunitas dan influencer wisata. Pemerintah desa memanfaatkan media sosial resmi desa, serta bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk memasarkan Taman Anggrek Hitam dalam agenda promosi daerah. Partisipasi dalam pameran wisata, seperti Gelar Produk Desa Wisata atau Festival, juga difasilitasi oleh pemerintah desa. *Political Will* juga tercermin dalam kemauan menjalin kemitraan. Pemerintah Desa Siong tampak aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan seperti Adaro dan Pama, tetapi relasi ini tidak selalu menghasilkan bantuan tahunan yang stabil. Bantuan dari CSR lebih bersifat proyek insidental seperti pembuatan pagar, grand house tetapi bukan sebagai dukungan kelembagaan jangka panjang. Ketiadaan nota kesepahaman formal dengan Dinas Pariwisata juga mengindikasikan minimnya kapasitas negosiasi politik vertikal dan horizontal. Akibatnya, potensi dukungan dari aktor luar belum mampu dioptimalkan karena tidak dibingkai dalam perjanjian kerja sama yang sah.

Political Will ini dilihat dari sejauh mana pemerintah desa mampu memobilisasi sumber daya sosial untuk mendukung programnya. Dalam

wawancara bersama Ketua BPD Siong Bapak Raedy Andrang dan disebutkan bahwa :

“Pemerintah Desa Siong aktif menggunakan media sosial dan tetap membuka diri terhadap dukungan komunitas pencinta anggrek. Mereka juga mendorong gotong royong, terutama saat dana formal tidak tersedia. komunitas pencinta anggrek barito timur juga menanam di kawasan wisata secara sukarela.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki *Political Will* dalam bentuk mobilisasi sosial, meskipun lemahnya dukungan fiskal dan kelembagaan membuatnya terbatas dalam skala. Komitas pecinta anggrek ini dapat membantu mempromosikan lewat pameran, ataupun konten yang berkaitan dengan taman anggrek hitam. Dari sisi perencanaan strategis, Pemerintah Desa Siong memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan Taman Anggrek Hitam sebagai simbol desa. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kegiatan promosi yang dilakukan, termasuk pembukaan grand house untuk umum dan pengadaan event bersama komunitas dan dinas pariwisata. Taman diharapkan bukan hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat edukasi, pelestarian, dan identitas budaya desa. Tujuan ini menunjukkan bahwa *Political Will* pemerintah desa tidak berhenti pada pemeliharaan fisik taman, tetapi juga mencakup dimensi simbolik dan pembangunan citra desa di mata publik.

Hal ini dijelaskan pada wawancara bersama Sekretaris Desa Ibu Dina Mariana sebagai berikut :

“Perusahaan berkomitmen membantu wisata taman anggrek hitam, membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan PT Sawit serta bantuan CSR dalam memperbaiki jalan dan infrastruktur, karena Pemerintah Desa tidak sanggup mengelola sendiri dari nol.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pola kerja sama ini berbasis bantuan langsung berupa sarana prasarana, bukan dalam bentuk uang tunai, dan dilakukan berdasarkan koordinasi langsung antara perusahaan dan pemerintah desa. Kolaborasi ini menandai

bahwa *Political Will* Pemerintah Desa diarahkan pada pendekatan adaptif dan terbuka terhadap intervensi pihak ketiga untuk menutup kekurangan fiskal.

Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara bersama Ketua BPD Bapak Raedy Andrang :

“Program-program dan implementasi program sudah ada, tetapi untuk dana, Desa Siong tidak sanggup berjalan sendiri sehingga perlu bantuan dan kerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan tidak memberi uang langsung, tapi membuat pagar dan memperbaiki jalan.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Salah satu bentuk Tindakan yang dilakukan adalah keterbukaan Pemerintah Desa Siong terhadap kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Desa Siong menjalin kerja sama dengan perusahaan sekitar, seperti PT Sawit dan BUMA, melalui program CSR untuk mendukung pengembangan infrastruktur taman. Bantuan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa pembangunan langsung di lapangan seperti pagar, grand house, dan jalan akses. Strategi ini menunjukkan adanya kemauan pemerintah desa untuk berkolaborasi dengan sektor swasta guna menutupi keterbatasan anggaran dan teknis. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan aktif membangun kemitraan horizontal dengan pelaku ekonomi lokal, tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah atasan.

Wawancara juga menegaskan bahwa bentuk dukungan perusahaan bersifat fisik, bukan finansial langsung. Perusahaan lebih fokus pada pemberian bantuan yang sifatnya lebih terukur dan langsung berdampak pada infrastruktur atau fasilitas umum. Pembangunan pagar dan perbaikan jalan adalah bentuk kontribusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas di area tersebut. Hal ini mencerminkan kebijakan perusahaan yang lebih memilih untuk melakukan investasi dalam infrastruktur yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas, daripada hanya memberikan bantuan finansial yang sifatnya sementara. Ini juga bisa mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada peningkatan kondisi lingkungan dan

fasilitas publik yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung. perusahaan tersebut tidak memberikan berupa uang secara langsung tapi pembuatan ke lapangan atau perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Siong membutuhkan perbaikan taman wisata anggrek hitam, berbicara dengan pihak ketiga yang membantu wisata taman anggrek hitam, pihak perusahaan sawit mengisolasi area lahan anggrek karena terjadi kemarau panjang pada waktu itu, supaya tidak terjadi kebakaran di area tersebut, karena pihak perusahaan sawit ini dekat dengan Desa Siong sehingga mereka membantu.

Terkait kerjasama ini juga dipaparkan dalam wawancara dengan Bapak Meiyanto sebagai berikut:

“Kerja sama dengan pihak ketiga akan diusahakan seluas-luasnya oleh Pemerintah Desa karena tidak sanggup kelola sendiri. Investasi dana dari luar bisa dilakukan dengan persetujuan BPD dan Pokdarwis. Desa tidak bersedia melepaskan kepada pihak ketiga, tetapi kalau untuk memberi fasilitas tanpa kerja sama yang terikat, Pemerintah Desa Siong siap melayani. Dengan kerja sama dengan pihak ketiga pemerintah Desa Siong akan berusaha melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang dan menambah wahana permainan yang lebih lagi dengan tidak merusak ciri khas asli lahan anggrek itu.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Kebijakan ini menandai adaptasi dari Pemerintah Desa untuk mencari dukungan non-formal demi kelangsungan taman, bentuk nyata dari *Political Will* kolaboratif. Wawancara yang diungkapkan oleh Meiyanto, Kepala Desa, menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan atau proyek tertentu di tingkat desa. Dalam narasi ini, Meiyanto mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak merasa mampu untuk mengelola semua aspek secara mandiri tanpa bantuan dari luar, baik itu dalam bentuk keahlian, sumber daya, atau dana. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga atau perusahaan, sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang ada. Kerja sama ini diupayakan dalam skala yang lebih luas untuk mengoptimalkan pengelolaan dan memastikan keberlanjutannya. Meiyanto juga menekankan bahwa investasi dana dari luar desa akan dilakukan dengan melibatkan persetujuan dari dua elemen penting

di tingkat desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). BPD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terkait kebijakan di desa, sementara Pokdarwis yang memiliki tugas dalam mengembangkan potensi wisata desa juga dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang memahami kebutuhan dan potensi desa dalam sektor wisata. Dengan adanya persetujuan dari kedua lembaga ini, diharapkan proses kerja sama dan investasi dana dari luar dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan desa. Wawancara ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya desa, yang mengakui bahwa kerja sama dengan pihak luar, seperti perusahaan atau lembaga, adalah cara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya internal desa. Keterlibatan BPD dan Pokdarwis dalam pengambilan keputusan terkait kerja sama dan investasi dana memastikan bahwa proses tersebut tetap mengutamakan transparansi dan kepentingan bersama, serta memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pernyataan terkait pemanfaatan fasilitas dijelaskan pada wawancara bersama Kasi Pemberdayaan Ibu Setyoningsih sebagai berikut :

“Pemerintah Desa menempatkan Taman Anggrek Hitam sebagai simbol identitas kolektif masyarakat Siong. Strategi ini diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan berskala lokal dan regional, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan daerah. Misalnya, grand house di taman disewakan tanpa tarif tetap, tetapi dimanfaatkan sebagai bentuk promosi destinasi desa.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Wawancara yang disampaikan oleh Setyoningsih memberikan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Desa memanfaatkan Taman Anggrek Hitam sebagai simbol identitas kolektif masyarakat Siong. Dalam konteks ini, Taman Anggrek Hitam tidak hanya dilihat sebagai sebuah objek wisata, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai dan budaya yang ada di masyarakat Siong. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa adalah mengorganisir berbagai kegiatan yang dapat menarik perhatian, baik pada skala lokal maupun regional,

guna memperkenalkan taman dan, secara lebih luas, destinasi Desa Siong kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, wawancara ini juga mengungkapkan tentang adanya upaya Pemerintah Desa untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintahan daerah. Bentuk kolaborasi ini memungkinkan pengembangan dan promosi yang lebih luas serta adanya dukungan dari berbagai sektor yang mungkin akan menguntungkan pengembangan desa secara keseluruhan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Desa adalah penyewaan grand house yang ada di dalam taman. Penyewaan ini dilakukan tanpa tarif tetap, yang menunjukkan bahwa grand house tersebut dimanfaatkan lebih sebagai sarana promosi daripada sebagai sumber pendapatan utama. Dengan cara ini, grand house berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan Taman Anggrek Hitam dan destinasi wisata desa kepada publik yang lebih luas. Pemerintah Desa memanfaatkan simbolik dan daya tarik Taman Anggrek Hitam untuk membangun identitas yang kuat bagi masyarakat Siong. Ini adalah bentuk implementasi dari strategi branding dan promosi yang berfokus pada kekayaan lokal dan potensi yang ada di desa. Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dan membuka ruang untuk kolaborasi, desa tidak hanya dapat memperkenalkan dirinya sebagai destinasi wisata, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warganya.

Strategi yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan Taman Anggrek Hitam mengarah pada penerapan konsep place branding, yang merupakan upaya untuk menciptakan identitas suatu tempat melalui pemanfaatan potensi lokal. Taman Anggrek Hitam sebagai simbol identitas kolektif masyarakat Siong tidak hanya berfungsi sebagai lokasi wisata, tetapi juga sebagai representasi dari sejarah, budaya, dan kekayaan alam desa. Dengan memperkenalkan taman ini melalui kegiatan berskala lokal dan regional, Pemerintah Desa menciptakan kesempatan bagi masyarakat luar untuk mengenal dan terlibat langsung dengan budaya lokal Siong.

Pembukaan ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan daerah, memperlihatkan adanya upaya sinergi untuk memperluas

jaringan dukungan dan memperkuat posisi desa dalam sektor pariwisata. Kerja sama ini memungkinkan desa untuk mendapatkan akses ke sumber daya tambahan, baik dalam bentuk dana, jaringan pemasaran, maupun peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan destinasi wisata. Hal ini relevan dengan penelitian tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan destinasi wisata untuk menciptakan keberlanjutan (Tosun, 2000). Penyewaan grand house tanpa tarif tetap menggambarkan pendekatan promosi yang lebih fleksibel dan berbasis pada nilai lebih daripada keuntungan finansial langsung. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam mengenalkan Desa Siong kepada dunia luar. Dengan menyediakan fasilitas yang menarik tanpa mematok tarif tetap, Pemerintah Desa menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi wisata ini lebih mengutamakan penyebaran informasi dan promosi daripada pencapaian keuntungan instan.

Pemerintah Desa Siong berharap dengan adanya bantuan dari pihak ketiga ini taman wisata anggrek hitam ini semakin terpenuhi, fasilitasnya juga semakin lengkap dan untuk wahana permainannya bisa ditambah untuk menarik minat pengunjung dari luar daerah untuk mencoba wahana tersebut, walaupun fasilitas dan wahana dilengkapi maupun diperbaiki tetapi pemerintah Desa Siong tidak akan merubah ciri khas asli lahan anggrek itu seperti anggrek-anggrek langka dan tanaman obat yang hidup alami tidak akan di pindah atau di tebang dari tempatnya. Invest berupa dana ke taman anggrek hitam bisa dilaksanakan dengan catatan koordinasi dengan tokoh masyarakat, BPD, dan kelompok pokdarwis yang utama dan misalkan disetujui bagi pokdarwis tidak jadi masalah karena kesepakatan bersama bukan karena mengambil tindakan sendiri atas dasar dari kepala desa sendiri. Dan pemerintah Desa Siong berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan dan langkah yang diambil dapat sesuai dengan peraturan yang ada dan juga dapat menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi Desa Siong.

7. Regulasi Lokal

Pemerintah desa menetapkan peraturan desa (Perdes) yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan Taman Anggrek Hitam. Peraturan desa tersebut mencakup aturan zonasi, jam operasional, pungutan retribusi, tata cara kunjungan, dan sanksi atas tindakan perusakan. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, melindungi spesies anggrek dari eksploitasi liar, dan menjamin pembagian keuntungan yang adil. Pemerintah desa membentuk tim pengawasan yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat untuk memantau jalannya operasional dan memberi laporan berkala kepada forum desa. Terakhir, penting dicatat bahwa setiap bentuk kebijakan dan kerja sama eksternal yang dilakukan pemerintah desa tetap dikonsultasikan dengan Dinas Pariwisata, pemerintah kabupaten, serta tokoh masyarakat dan kelompok lokal seperti BPD dan Pokdarwis agar menjadi kehati-hatian dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini diterangkan dalam wawancara Bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

“Segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan taman anggrek ini diatur didalam peraturan desa sehingga dapat menjadi pedoman pengelolaan. Pemerintah desa tetap koordinasi dengan dinas pariwisata dan pemda, agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di daerah.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Hal ini ditambahkan oleh dalam wawancara bersama Ketua BPD Siong Bapak Meiyanto sebagai berikut :

"Dasar hukum untuk segala pemungutan, seperti tiket masuk dan parkir, telah diatur melalui peraturan desa (perdes) yang disusun bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Dengan adanya peraturan desa ini, semua hal yang berkaitan dengan pemungutan di kawasan wisata Taman Anggrek Hitam dapat dijalankan tanpa bertentangan satu sama lain. Peraturan desa tersebut mengacu pada undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub), dan peraturan desa tersebut sudah terbentuk dan disahkan." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengatur berbagai kegiatan yang ada di tingkat desa, termasuk dalam hal ini pengelolaan objek wisata. Peraturan desa yang mengatur pemungutan biaya tiket masuk dan parkir di Taman Anggrek Hitam bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan sah bagi kegiatan tersebut. Dengan adanya peraturan desa, Pemerintah Desa Siong dapat mengelola sumber daya yang ada secara lebih terstruktur dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberadaan peraturan desa yang sesuai dengan perda dan peraturan gubernur juga dapat memastikan konsistensi dan keselarasan antara kebijakan di tingkat desa dengan kebijakan di tingkat provinsi dan daerah. Ini menciptakan sistem pemerintahan yang lebih harmonis dan terkoordinasi. Pengaturan pemungutan biaya, seperti tiket masuk dan parkir, merupakan salah satu cara untuk mendanai pengelolaan objek wisata. Pemerintah Desa Siong melalui peraturan desa ini memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran biaya yang dikenakan kepada pengunjung, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan kawasan wisata. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa memiliki visi jangka panjang terkait pengelolaan Taman Anggrek Hitam, yang tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dan pengunjung.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan sah, proses pengelolaan dan pemungutan biaya di kawasan wisata menjadi lebih transparan dan terstruktur. Ini dapat mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemungutan biaya serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan pengunjung yang datang. Kejelasan ini juga memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana yang diperoleh dari pemungutan tiket dan parkir, yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas wisata dan peningkatan kualitas pelayanan di kawasan wisata. Pernyataan bahwa peraturan desa ini mengacu pada undang-undang yang berlaku menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Siong berusaha untuk selalu berada dalam koridor hukum yang sah. Mengikuti ketentuan yang ada di tingkat nasional, seperti

undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sektor pariwisata dan kebijakan lokal, memperlihatkan komitmen Pemerintah Desa Siong untuk menjaga integritas dan legitimasi pemerintahannya.

Hal ini Dijelaskan sebagaimana wawancara bersama Sekretaris Desa Ibu Dina Mariana sebagai berikut :

“Aturan dalam peraturan desa yang sudah di susun oleh Pemerintah Desa Siong yaitu memuat pemasukan desa, dan mengatur terkait pengelolaan dana pemasukan dan pengeluaran untuk taman anggekk komitmen yang berkelanjutan, Pemerintah Desa berusaha meningkatkan pengelolaan taman anggrek serta transparansi pengelolaan dana agar menjadi lebih baik dan efektif” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Peraturan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Siong mencakup tiga elemen utama dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu pemasukan desa, dana sosial, dan kontribusi untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Pembagian ini menunjukkan adanya transparansi dan sistematis dalam pengalokasian dana yang masuk ke dalam kas desa. Pemasukan desa ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pariwisata, sumbangan, atau bentuk pendapatan lainnya yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, kontribusi untuk Pemda menunjukkan adanya kewajiban desa untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan dan pembangunan yang lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Walaupun kontribusinya disebutkan terbatas, hal ini tetap menunjukkan adanya hubungan dan sinergi antara desa dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Desa Siong menyebutkan bahwa kontribusi untuk Pemda dilakukan meskipun dalam jumlah yang terbatas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan dana desa yang tersedia atau prioritas penggunaan anggaran yang lebih difokuskan pada kebutuhan internal desa, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun kontribusi untuk Pemda terbatas, keberadaan komponen ini tetap penting karena mencerminkan tanggung jawab dan kepatuhan desa terhadap kewajiban administratif dan fiskal yang berlaku di tingkat daerah. Pemerintah Desa Siong juga menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan dan memperbaiki

pengelolaan keuangan desa di masa depan. Komitmen ini sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa yang harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan efektif. Pemerintah Desa Siong menyadari bahwa pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembangunan desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dapat mencakup beberapa langkah, seperti meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran, memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan keuangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dana yang berkelanjutan, yang dapat memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya terjadi dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah Desa Siong bisa mengembangkan beberapa strategi. Misalnya, meningkatkan potensi sumber daya yang ada di desa, seperti sektor pariwisata, pertanian, atau kerajinan lokal, yang bisa menjadi sumber pemasukan tambahan bagi desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga bisa menggali potensi dana dari luar, seperti hibah atau kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program-program sosial dan pembangunan.

Keberlanjutan pengelolaan dana desa juga sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan realistis, serta memprioritaskan program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh Pemerintah Desa Siong dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas manajerial. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor swasta, lembaga pemerintah, maupun masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu dalam memastikan bahwa

setiap kebijakan dan program yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berjalan secara berkelanjutan

Political Will di sini tidak bersifat otoritatif, melainkan diletakkan dalam prinsip musyawarah dan keterlibatan kolektif. Pendekatan seperti ini menghindarkan konflik internal, sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan wisata tersebut. Tidak hanya dalam aspek teknis, *Political Will* pemerintah desa juga diwujudkan dalam bentuk regulasi. Pemerintah Desa tengah menyusun Peraturan Desa (Perdes) untuk mengatur sistem pengelolaan pendapatan dari taman, termasuk tiket masuk dan sewa fasilitas. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Namun, hingga saat ini belum semua pendapatan dari taman masuk secara resmi ke dalam kas desa, karena belum tersedianya sistem pelaporan yang sistematis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan memperkuat legitimasi kebijakan publik mereka di mata masyarakat. Langkah berikutnya yang mencerminkan penguatan *Political Will* adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait tata kelola dan pengelolaan pendapatan dari wisata taman. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang akuntabel, transparan, dan legal. Akan tetapi, hingga kini belum seluruh pendapatan dari taman tercatat secara resmi dalam sistem pelaporan keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kehendak politik (*will*) dan implementasi teknis. Dalam literatur kebijakan publik, kondisi ini disebut sebagai *implementation deficit*, di mana kebijakan telah dirancang namun belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karena keterbatasan sistem, SDM, atau resistensi internal. Meskipun demikian, inisiatif menyusun Peraturan desa tetap menjadi indikator bahwa Pemerintah Desa berupaya menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi pengelolaan aset desa. penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait pengelolaan pendapatan dari taman ini merupakan Upaya yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang akuntabel, transparan, dan legal. Akan tetapi, hingga kini belum seluruh pendapatan dari taman tercatat secara resmi dalam sistem pelaporan keuangan desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga menegaskan bahwa setiap bentuk

investasi atau bantuan dari luar harus melalui musyawarah dengan BPD dan kelompok masyarakat agar tidak terjadi otoritas tunggal dari kepala desa. Ini menunjukkan *Political Will* yang dijalankan secara kolektif dan demokratis. Namun, belum semua pemasukan tercatat resmi ke rekening desa karena lemahnya sistem manajemen keuangan. Regulasi ini sedang disempurnakan agar sesuai dengan peraturan daerah dan tidak menimbulkan konflik antar pihak pengelola.

Seperti pada wawancara bersama sekretaris Desa Siong Ibu Dina Mariana berikut :

"Sebelum diatur dalam peraturan desa, Taman Wisata Anggrek Hitam menghasilkan keuntungan yang lumayan. Namun, setelah peraturan desa diterapkan, dana yang diperoleh tidak bisa sembarangan dibelanjakan. Sebelumnya, taman ini bisa didukung oleh Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi setelah diatur dalam peraturan desa, taman ini dinilai mandiri dan harus membiayai dirinya sendiri. Padahal, kondisi tersebut tidak selalu realistis, karena tidak setiap saat taman ini ramai pengunjung, bahkan bisa saja tidak ada pengunjung sama sekali." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Hal ini juga ditambahkan oleh dalam wawancara bersama bagian keuangan desa Ibu Yenni Anugrahni yang juga merupakan anggota karang taruna sebagai berikut :

"Harusnya semua dana dari taman masuk ke kas desa, nanti bisa dibelanjakan kembali untuk taman anggrek. Tapi beberapa masih belum masuk sistem." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemerintah Desa mencoba membangun sistem transparansi dan akuntabilitas fiskal. Meski belum terlaksana secara penuh, inisiatif ini menunjukkan kesadaran pentingnya reformasi tata kelola keuangan lokal. Pemerintah Desa Siong seharusnya mengalokasikan semua dana yang diperoleh dari Taman Anggrek Hitam ke kas desa, dengan tujuan untuk digunakan kembali dalam pengembangan dan pemeliharaan taman tersebut. Namun, terdapat kendala dimana sebagian dana masih belum tercatat atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan desa. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dana yang transparan dan terstruktur, yang perlu

segera diperbaiki agar penggunaan dana dapat lebih efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebelum penerapan peraturan desa, Taman Wisata Anggrek Hitam menghasilkan keuntungan, yang dapat digunakan untuk pengelolaan taman secara fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa taman tersebut telah menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan untuk desa. Namun, setelah peraturan desa diterapkan, pengelolaan dana menjadi lebih terbatas karena dana yang diperoleh tidak bisa sembarangan digunakan. Ini mencerminkan bahwa peraturan desa bertujuan untuk lebih mengatur dan menata penggunaan dana desa agar lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, pembatasan penggunaan dana ini bisa jadi menjadi tantangan dalam menjaga kelangsungan operasional taman, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengembangan. Sebelumnya, setelah peraturan desa diterapkan, taman ini harus dinilai mandiri dan diharapkan untuk membiayai operasionalnya sendiri. Hal ini mengindikasikan pergeseran kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien di tingkat desa. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini juga menunjukkan tantangan besar, karena taman wisata tidak selalu ramai pengunjung. Ini berarti pemasukan yang bergantung pada jumlah pengunjung tidak selalu dapat diandalkan, terutama di musim sepi. Tantangan utama yang dihadapi Taman Wisata Anggrek Hitam setelah penerapan peraturan desa adalah ketidakpastian dalam jumlah pengunjung.

Wisatawan yang datang bisa sangat fluktuatif, tergantung pada musim atau faktor lainnya, seperti cuaca atau tren pariwisata. Dalam kondisi seperti ini, mengandalkan pendapatan dari tiket masuk dan fasilitas lainnya untuk membiayai operasional taman menjadi sulit dan tidak selalu mencukupi. Hal ini menyoroti bahwa meskipun taman ini diharapkan mandiri, kenyataannya pendapatan dari sektor wisata tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk menutupi semua biaya operasional, apalagi jika pengunjung sepi.

Dalam tindakan nyata nya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah desa masih sangat

terbatas dan sporadis. Salah satu contoh tindakan yang sempat dilakukan adalah kegiatan gotong royong pembersihan area taman bersama warga, pemasangan papan nama taman, dan pengurusan dokumen legalitas. Promosi taman juga belum pernah dilakukan secara masif, baik secara daring (media sosial) maupun luring (kerja sama dengan agen wisata atau Dinas Pariwisata). Tindakan yang telah dilakukan cenderung bersifat reaktif dan temporer, tidak dibarengi dengan evaluasi maupun perencanaan berkelanjutan. Bahkan, beberapa warga dan anggota Pokdarwis menyatakan bahwa taman justru semakin terbengkalai sejak menjadi aset desa karena pendapatan tidak lagi bisa langsung dikelola oleh pengelola taman, tetapi harus masuk ke kas desa melalui sistem PADes, yang memperumit mekanisme operasional. Tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa masih sangat terbatas. Salah satu tindakan yang sempat dilakukan adalah gotong royong pembersihan area taman bersama masyarakat dan pemasangan papan nama wisata.

Selain itu, pemerintah desa juga pernah mengajukan usulan pengembangan ke tingkat kabupaten, walau belum mendapat respons. Namun, sebagian besar tindakan tersebut bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan. Tidak ada pelatihan khusus bagi masyarakat sebagai pelaku wisata, tidak ada pengembangan sarana dan prasarana wisata, dan tidak ada promosi yang memadai di media sosial atau media massa. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil belum mampu mendorong percepatan pengembangan Taman Anggrek Hitam sebagai destinasi wisata unggulan desa. Kesediaan memang ada, namun belum menyentuh aspek pengorganisasian yang kuat. Komitmen mulai terbentuk, tetapi belum ditindaklanjuti dengan konsistensi kebijakan dan penganggaran. Sementara itu, tindakan yang diambil masih minim dan tidak berdampak luas.

Pemerintah Desa Siong sejatinya telah melakukan sejumlah tindakan dalam rangka mendukung pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam, seperti perbaikan jalan menuju lokasi wisata, penyusunan Peraturan Desa yang memuat susunan kepengurusan Pokdarwis, hingga menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk kepentingan promosi. Selain itu, terdapat pula bentuk

pelibatan masyarakat melalui gotong royong, walaupun belum berkelanjutan. Pemerintah desa juga beberapa kali melibatkan stakeholder dalam forum musyawarah atau rapat pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang *political will* yang kuat dan serius, tindakan-tindakan ini belum cukup membuktikan adanya keberpihakan yang nyata dan konsisten terhadap sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti empiris yang menunjukkan capaian konkret dari kebijakan atau program tersebut, baik dalam bentuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan ekonomi masyarakat, maupun dukungan pendanaan yang berkesinambungan.

Tindakan yang dilakukan masih bersifat simbolis dan administratif tanpa strategi penguatan kelembagaan maupun keberlanjutan program. Misalnya, kerja sama dengan pihak luar belum berdampak signifikan karena dalam beberapa tahun terakhir tidak tercatat adanya bantuan dana, investasi, atau proyek konkret dari pihak eksternal yang benar-benar mendukung pengembangan taman anggrek. Gotong royong masyarakat yang sesekali dilakukan tidak cukup kuat untuk menopang pengelolaan taman secara profesional, apalagi tanpa dukungan dana dan sistem yang jelas. Bahkan, regulasi yang ada belum secara rinci mengatur peran, hak, dan kewajiban masing-masing aktor yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah desa belum diarahkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang sistematis dan terukur. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi tindakan dari Pemerintah Desa Siong, namun tindakan tersebut belum mencerminkan *political will* yang kuat dan serius. Tidak adanya hasil nyata, tidak jelasnya regulasi pendukung, dan belum optimalnya pelaksanaan program-program desa mengindikasikan bahwa tindakan yang dilakukan selama ini masih sebatas respons administratif tanpa komitmen transformatif. Untuk membuktikan adanya *political will* yang sejati, diperlukan aksi nyata yang berkelanjutan, terukur, serta disertai kemauan politik untuk mengalokasikan

sumber daya, mengatur regulasi secara menyeluruh, dan menjadikan wisata sebagai prioritas utama dalam pembangunan desa.

D. Tantangan yang Dihadapi

Meski memiliki prospek jangka panjang, pemerintah desa menghadapi tantangan seperti terbatasnya kapasitas teknis pengelola, resistensi masyarakat terhadap perubahan fungsi lahan, serta fluktuasi kunjungan wisata. Untuk mengatasi hal ini, strategi adaptif perlu dirancang dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, pembaruan produk wisata, serta memperluas kemitraan lintas sektor. Pemerintah desa juga perlu membangun sistem manajemen berbasis data untuk memantau dinamika pengunjung, tren keuangan, serta indikator keberhasilan konservasi. Penelitian lebih lanjut dari pihak eksternal sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan berbasis bukti.

1. Terbatasnya Anggaran Desa dan Pemangkasan Dana dari Kabupaten

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Siong adalah terbatasnya anggaran desa. Dana desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai program dan inisiatif, termasuk untuk pengelolaan Taman Anggrek Hitam, seringkali tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran dari tingkat kabupaten. Meskipun Taman Anggrek Hitam sudah diharapkan dapat menghidupi dirinya sendiri melalui pendapatan yang dihasilkan, kenyataannya Pemerintah Desa Siong belum dapat mencapai kemandirian finansial yang diinginkan. Seperti dijelaskan pada wawancara bersama kepala Desa Siong Bapak Meiyanto berikut :

"Tantangan utama anggaran, dari anggaran desa tidak bisa untuk sekarang karena menurut pemda sudah menghasilkan, sudah bisa menghidupkan diri sendiri, sedangkan pada kenyataannya Pemerintah Desa belum bisa."
(Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemangkasan anggaran dari kabupaten ini semakin memperburuk keadaan, karena dana yang sebelumnya bisa digunakan untuk mendukung

operasional taman, sekarang harus dialihkan atau disesuaikan dengan prioritas lain yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan taman, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan desa.

Hal ini juga dijelaskan pada wawancara bersama Ibu Setyonihsih (Kasi Pemberdayaan) :

“Pernah ada ide pengembangan seperti pembangunan wahana permainan dan acara mingguan, keterbatasan dana membuat Pemerintah Desa mengalihkan fokus ke prioritas lain. bahwa dana dari taman anggrek tidak masuk secara sistematis ke APBDes sehingga penggunaannya tidak terantau dan tidak terkoordinasi.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Ketidaksinambungan ini terlihat dari minimnya regulasi teknis terkait distribusi pendapatan dari wisata taman anggrek. Dana yang dihasilkan dari event atau penyewaan tidak selalu masuk ke APBDes, melainkan langsung dikelola oleh individu atau kelompok. Tanpa struktur formal dan sistem pelaporan yang akuntabel, *Political Will* hanya berhenti pada komitmen lisan, tanpa efektivitas kebijakan. menunjukkan bahwa kendala struktural dan vertikal menjadi hambatan *Political Will* yang kuat di tingkat desa. Meskipun ada niat dan kebijakan lokal, keputusan administratif dari atas dapat menghambat pelaksanaan program. Sebagai alternatif, Pemerintah Desa memobilisasi gotong royong dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap merawat taman meskipun tanpa dana operasional tetap.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Desa Siong adalah keterbatasan dana. Meskipun terdapat ide untuk mengembangkan taman dengan menambah wahana permainan dan mengadakan acara mingguan untuk menarik pengunjung, keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Desa harus mengalihkan fokus ke prioritas lain. Keterbatasan ini menjadi hambatan besar dalam upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata desa yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan. Keterbatasan dana ini juga memengaruhi kemampuan Pemerintah Desa untuk menjalankan program-program pengembangan wisata dengan efektif. Sebagai contoh, meskipun ada niat untuk

mengalokasikan anggaran tahunan untuk taman anggrek, usulan tersebut selalu dicoret oleh kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan pada kebijakan dan keputusan administratif dari tingkat yang lebih tinggi, yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu masalah utama yang dihadapi Pemerintah Desa adalah tidak terkoordinasinya dana yang dihasilkan dari Taman Anggrek Hitam. Dana yang diperoleh dari event atau penyewaan tidak selalu masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara sistematis. Hal ini menyebabkan penggunaan dana tidak terpantau dengan baik dan tidak terkoordinasi secara efisien. Dana yang dihasilkan langsung dikelola oleh individu atau kelompok, tanpa adanya struktur formal yang jelas.

Sekretaris Desa Ibu Dina Mariana juga menambahkan pernyataan sebagai berikut :

“Taman Anggrek Hitam dikembangkan dengan menambah wahana dan mengadakan event setiap hari Minggu, seperti menghadirkan artis lokal untuk menarik pengunjung. Namun, program ini terhenti karena pemangkasan anggaran, tidak ada laporan keuangan dari pengelola, dan kurangnya struktur pengelolaan resmi, seperti SK Pokdarwis yang masih dalam proses.” (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Pemerintah Desa Siong telah merencanakan berbagai program untuk pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam, namun implementasi program-program tersebut terkendala oleh berbagai faktor, terutama anggaran yang terbatas dan tidak tercapainya kesepakatan dengan pemerintah kabupaten untuk penyediaan dana. Meskipun ada rencana yang digagas, terutama dalam bentuk program musyawarah desa (Musyawarah Desa), banyak program yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran. Salah satu contoh yang jelas adalah pemangkasan dana yang terjadi pada tingkat kabupaten, sehingga beberapa program yang seharusnya dijalankan menjadi terhambat atau terhenti sama sekali. Selain itu, Pemerintah Desa juga mencoba mengoptimalkan gotong royong dari masyarakat desa, tetapi upaya tersebut tidak cukup untuk mendukung pengembangan taman secara berkelanjutan.

Kurangnya sistem pelaporan yang akuntabel dan struktur pengelolaan yang resmi, seperti SK Pokdarwis yang masih dalam proses, memperburuk keadaan ini. Tanpa adanya sistem yang jelas, pengelolaan dana menjadi tidak transparan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kebijakan. Meskipun ada *Political Will* atau niat politik yang baik di tingkat desa untuk mengelola taman secara lebih efektif, tanpa sistem yang memadai, niat tersebut hanya tetap pada komitmen lisan tanpa implementasi yang nyata. Kendala struktural dan vertikal menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa. Meskipun ada kebijakan lokal yang baik, keputusan administratif seperti pencoretan anggaran tahunan oleh kabupaten dapat menghambat realisasi kebijakan di tingkat desa. Ketergantungan pada keputusan dari tingkat yang lebih tinggi memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Siong belum sepenuhnya memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya desa, yang membatasi potensi pengembangan sektor pariwisata yang dapat berkontribusi pada perekonomian desa.

2. Ketidakjelasan Kepengurusan dan manajemen Taman

Menurut Dina Mariana, tantangan lainnya terletak pada ketidakjelasan dalam kepengurusan Taman Anggrek Hitam. Seperti pernyataan saat wawancara berikut:

"Tantangannya yaitu kepengurusan taman anggrek hitam yang belum jelas dan dana desa sendiri sangat terbatas untuk melakukan kegiatan."
(Wawancara, 27 Agustus 2024)

Tanpa struktur pengelolaan yang jelas, pengelolaan taman menjadi tidak terorganisir dengan baik. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan kegiatan dan proyek pengembangan taman, yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi desa. Ketidakjelasan ini juga memperburuk pengelolaan dana yang diterima dari taman, karena tidak ada pihak yang secara resmi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan efisien. Tindakan lainnya adalah alokasi dana desa untuk membiayai penjaga dan pembersih taman yang direkrut dari

kalangan warga rentan. Namun, anggaran ini tidak berlanjut akibat persepsi dari pemerintah kabupaten bahwa taman telah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Urusan Umum Nadilla berikut :

“Meskipun desa pernah ingin mengalokasikan anggaran tahunan untuk taman anggrek,. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada pemasukan yang tetap dari perusahaan atau CSR, dan segala upaya perbaikan hanya bergantung pada gotong royong masyarakat.” (Wawancara, 26 Agustus 2024)

Keterbatasan kebijakan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa dihadapkan pada keputusan administratif yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan lokal. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen kuat dari Pemerintah Desa untuk memajukan desa, keputusan dari pemerintah kabupaten dapat menjadi penghalang yang menghambat kebebasan desa dalam menentukan langkah-langkah yang sesuai untuk pengelolaan potensi wisata lokal. Sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dana dan struktur yang belum optimal, Pemerintah Desa Siong memobilisasi gotong royong masyarakat untuk merawat taman. Meskipun tanpa dana operasional tetap, masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan Taman Anggrek Hitam melalui kerja sama dan kontribusi sukarela. Gotong royong ini menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan taman dan memastikan taman tetap terawat, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Meskipun demikian, mengandalkan gotong royong sebagai sumber daya utama tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan, Pemerintah Desa Siong perlu mencari cara untuk mengoptimalkan sumber pendanaan, baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga, peningkatan regulasi terkait distribusi pendapatan dari taman, maupun penciptaan struktur yang lebih formal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa juga menghadapi kendala terkait dengan minimnya dukungan dari pihak eksternal, seperti perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Tidak ada pemasukan tetap dari perusahaan atau CSR yang dapat diandalkan untuk

mendukung pengelolaan taman. Semua upaya perbaikan sangat bergantung pada gotong royong masyarakat, yang dapat terbatas oleh sumber daya dan waktu yang dimiliki warga desa. Tanpa adanya investasi atau dukungan berkelanjutan dari pihak luar, keberlanjutan pengelolaan Taman Anggrek Hitam menjadi rentan.

Pemerintah Desa Siong menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan tindakan yang telah diambil untuk pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam. Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya anggaran desa, yang membuat Pemerintah Desa kesulitan dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Meskipun ada dukungan dana dari pemerintah kabupaten, dana tersebut sering kali dicoret atau dipangkas, membuat pengelolaan taman anggrek hitam menjadi tidak optimal. Selain itu, pengelolaan taman juga terganggu oleh ketidakjelasan struktur organisasi yang ada. Misalnya, pengelolaan taman anggrek hitam yang diserahkan kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), namun tanpa adanya legalitas yang jelas mengenai status mereka, hal ini menyebabkan pengelolaan yang kurang terkoordinasi dan terhambat. Masalah lain yang dihadapi adalah pengelolaan dana yang tidak transparan dan belum terintegrasi dengan sistem administrasi desa yang baik, sehingga tidak ada kejelasan mengenai penggunaan dana yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena sebelumnya pengelolaan masih dilaksanakan oleh beberapa orang dan belum ada peraturan desa yang mengatur, sehingga Ketika sudah ada peraturan desa yang mengatur, penggunaan dana lebih terarah dan transparan.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Siong dalam pengelolaan Taman Anggrek Hitam sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik dari segi anggaran, pengelolaan administrasi, maupun legalitas kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terlihat jelas bahwa meskipun ada potensi besar yang dimiliki taman ini sebagai destinasi wisata, terdapat kendala besar yang menghalangi pengelolaannya secara optimal.

Sekretaris Desa Ibu Dina Mariana juga menyoroti masalah administratif yang juga berpengaruh besar terhadap efektivitas pengelolaan dana. Sebagaimana dalam wawancara berikut :

"Tantangan administratif juga tampak dari konflik antara desa dan pengelola dalam hal aliran dana. Ada pelaporan yang tidak sinkron, hal ini menghambat proses akuntabilitas dan legalitas penggunaan dana." (Wawancara, 27 Agustus 2024)

Permasalahan ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen dan pelaporan keuangan di tingkat desa. Tanpa adanya sistem yang transparan dan akuntabel, dana yang dihasilkan dari Taman Anggrek Hitam tidak dapat dipantau dengan baik, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penggunaan dana tersebut. Kelembagaan yang sah dan terstruktur sangat penting untuk menjalankan berbagai program pengelolaan, termasuk dalam sektor pariwisata. Namun, di Pemerintah Desa Siong, legalitas kelembagaan pendukung seperti pokdarwis yang seharusnya dapat membantu dalam mengelola sektor wisata, masih kurang jelas atau belum terbentuk dengan baik. Hal ini menjadi penghalang dalam pengelolaan Taman Anggrek Hitam, karena tanpa struktur yang jelas, sulit untuk memastikan keberlanjutan operasional taman dan aliran dana yang efisien.

Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti pentingnya *political will* (kemauan politik) dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam di Desa Siong. *Political will* pemerintah desa masih tergolong belum kuat karena tidak memiliki bukti konkrit yang dapat memenuhi indikator *political will*, terdapat beberapa tantangan yang menghambat realisasi dari komitmen tersebut sehingga tidak semua inisiatif tersebut dapat direalisasikan dalam tindakan nyata. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menghambat implementasi kebijakan yang telah direncanakan, baik dari segi dana maupun kondisi yang ada di lapangan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan belum jelasnya struktur pengelolaan. Walaupun pemerintah desa menunjukkan kesediaan untuk melibatkan masyarakat dan menjalin kemitraan

dengan berbagai pihak eksternal, kendala administratif dan finansial seringkali memperlambat kemajuan desa.

Salah satu faktor utama yang menghalangi realisasi tersebut adalah terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung berbagai program pengembangan taman. Meskipun Pemerintah desa memiliki niat untuk meningkatkan fasilitas, memperbaiki infrastruktur, dan menggaji sukarelawan yang terlibat dalam pemeliharaan taman, kenyataannya dana yang ada tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut. Sebagaimana tercatat dalam wawancara dengan berbagai pihak, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah kabupaten menganggap bahwa taman anggrek ini menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga tidak lagi mendapat alokasi dana dari pemerintah kabupaten karena dianggap sudah mandiri secara finansial, Padahal pada kenyataannya taman tersebut belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, termasuk pengelolaan dan pemeliharaan rutin. Selain itu, ketergantungan pada dana desa dan tidak selalu dapat dialokasikan untuk pengelolaan taman mengakibatkan beberapa inisiatif, seperti peningkatan fasilitas dan penyediaan gaji untuk sukarelawan penjaga taman, tidak dapat terlaksana. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen dari pemerintah desa, keterbatasan finansial menjadi penghalang utama yang menghalangi transformasi niat menjadi tindakan nyata.

Selain itu, Meskipun dari hasil wawancara menunjukkan adanya upaya pengelolaan Taman Anggrek Hitam yang terstruktur dan partisipatif, pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti mengungkapkan realitas yang berbeda. Sebelum disahkannya Perdes, kepengurusan taman anggrek mengalami ketidakjelasan struktural yang menciptakan ambiguitas dalam distribusi tanggung jawab dan wewenang pengelolaan. Hal ini berdampak pada operasional harian yang tidak konsisten. peraturan yang mengatur pengelolaan taman, termasuk regulasi mengenai pemungutan tiket, pengelolaan dana, dan tata kelola kawasan wisata, belum cukup terkoordinir sebelum Perdes disahkan. Periode sebelum disahkannya Peraturan Desa (Perdes) ditandai dengan ketiadaan payung hukum yang kuat, menyebabkan ketidakjelasan

dalam pembagian tanggung jawab dan wewenang pengelolaan. Ketiadaan regulasi yang jelas ini mengakibatkan overlap kewenangan atau sebaliknya, kekosongan tanggung jawab dalam aspek-aspek tertentu pengelolaan taman. Ini mengarah pada masalah ketidakjelasan dalam legalitas operasional taman. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, pemerintah desa tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengatur dan mengelola Taman Anggrek Hitam secara formal dan terstruktur. Meskipun ada niat baik untuk mengembangkan taman sebagai aset desa, ketidakpastian hukum ini menyulitkan upaya pengelolaan taman yang efisien dan efektif. Ketidakjelasan regulasi juga menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari wisata, karena tidak ada ketentuan yang jelas tentang bagaimana pendapatan tersebut harus dialokasikan dan digunakan. Setelah disahkannya Perdes, sudah mulai ada upaya untuk memberikan dasar hukum bagi pengelolaan taman, walaupun implementasi regulasi ini masih terkendala oleh masalah administratif dan teknis.

Hasil observasi lapangan juga menemukan bahwa masalah lain yang menghambat pengelolaan Taman Anggrek Hitam di Desa Siong adalah kurangnya kejelasan dalam kepengurusan dan struktur organisasi yang mengelola taman tersebut. Regulasi yang kurang jelas tentang pengelolaan pendapatan dari taman dan alokasi dana desa yang tidak konsisten juga menjadi kendala besar dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ini menyebabkan pengelolaan taman menjadi kurang terkoordinasi. Meskipun demikian, dalam observasi lapangan, peneliti mencatat adanya inisiatif untuk memperbaiki struktur pengelolaan, Pemerintah desa telah berusaha menyerahkan pengelolaan taman kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang dimuat didalam peraturan desa, seperti rencana pembentukan SK Pokdarwis yang lebih terstruktur, namun proses tersebut masih dalam proses.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah kesediaan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pelestarian taman anggrek. Melalui pendekatan gotong royong, masyarakat setempat ikut serta dalam menjaga taman meskipun tanpa dana yang memadai. Hal ini merupakan

bentuk komitmen pemerintah desa yang tidak hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga melibatkan kekuatan sosial dari masyarakat setempat. Ini memperlihatkan potensi keberlanjutan dalam pengelolaan taman, meskipun ada keterbatasan dana dan sumber daya eksternal. Sebagaimana dicontohkan oleh inisiatif untuk memperbaiki akses jalan dan merawat taman, yang meskipun terkendala dana, tetap dilaksanakan dengan dukungan masyarakat. Meskipun wawancara menyebutkan adanya pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan gotong royong, observasi mengindikasikan bahwa partisipasi ini belum optimal dan berkelanjutan, lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Meskipun beberapa kebijakan di tingkat desa menunjukkan kemauan politik yang baik, implementasi sering terhambat oleh faktor eksternal dan kelembagaan. Meskipun ada kemauan politik yang jelas untuk mengembangkan Taman Anggrek Hitam, terutama dalam hal pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat, kenyataannya terdapat kendala struktural dan finansial yang cukup besar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran desa yang tidak mencukupi untuk pengelolaan taman secara optimal. Dana yang dialokasikan untuk taman anggrek tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional, yang berdampak pada ketidakmampuan pemerintah desa untuk mengelola taman dengan baik dalam jangka panjang. Kenyataan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, di mana meskipun taman ini dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), kontribusi dana dari taman anggrek sendiri tidak stabil. Sering kali, kebijakan yang diambil tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten atau pihak ketiga. Ini mencerminkan ketergantungan pada aliran dana eksternal yang sering kali tidak stabil, yang menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan inisiatif ini. Peneliti juga mencatat bahwa meskipun terdapat inisiatif yang baik dari pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat melalui sukarelawan untuk tugas-tugas seperti pembersihan dan penjagaan taman, namun tantangan finansial yang dihadapi oleh pemerintah desa sangat menghambat kelancaran

operasional tersebut dan belum adanya tindak lanjut dari kesediaan dan komitmen yang telah disebutkan. Situasi ini merupakan kesenjangan antara komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan taman dan kenyataan yang ada di lapangan, di mana keterbatasan dana memengaruhi kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan tenaga kerja sukarelawan. Meskipun niat baik untuk memberdayakan masyarakat desa dan melibatkan mereka dalam pemeliharaan taman anggrek sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal, kekurangan dana desa membuat pengelolaan operasional taman menjadi tidak stabil. Kesenjangan antara wacana dengan tindakan nyata ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pengelolaan aset wisata desa, termasuk penguatan aspek regulasi, kepastian pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur.

Hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat yang dapat menguatkan adanya *political will* yang benar-benar kuat dan serius dari Pemerintah Desa Siong dalam pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam. Secara deklaratif, memang terdapat pernyataan kesediaan untuk mengembangkan sektor wisata, namun kesediaan tersebut belum diikuti dengan langkah konkret yang menunjukkan kesiapan kelembagaan, perencanaan strategis, maupun keberanian politik dalam menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan desa. Komitmen yang sempat dinyatakan melalui pelibatan masyarakat dan promosi hanya bersifat sporadis dan tidak sistematis, serta tidak disertai indikator keberhasilan yang jelas. Tindakan-tindakan seperti perbaikan jalan, pembentukan Pokdarwis, dan pelaksanaan gotong royong masyarakat memang telah dilakukan, namun skala dan dampaknya belum mencerminkan sebuah *political will* yang memenuhi standar substantif. Tidak adanya alokasi anggaran khusus, tidak tersusunnya regulasi teknis yang rinci, serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan wisata menunjukkan bahwa realisasi program masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Selain itu, kerja sama dengan pihak luar lebih banyak bersifat wacana atau komunikasi awal tanpa tindak lanjut yang berdampak nyata, bahkan dalam

beberapa tahun terakhir tidak tercatat adanya bantuan dana atau proyek kemitraan konkret dari mitra eksternal. Dengan demikian, baik kesediaan, komitmen, maupun tindakan pemerintah desa belum dapat dikategorikan memenuhi indikator *political will* yang sejati, yaitu adanya kemauan untuk bertindak secara konsisten, berani mengambil keputusan strategis, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa apa yang ada di lapangan masih belum selaras dari standar *political will* yang transformatif dan berdampak luas bagi pengembangan wisata lokal di Desa Siong.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang berjudul “*Political Will* Pemerintah Desa Siong dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam” dapat disimpulkan bahwa :

Secara normatif Pemerintah Desa Siong memang menyatakan kesediaan, komitmen, dan telah melakukan beberapa tindakan awal untuk mengembangkan Taman Anggrek Hitam. Namun, ketiganya tidak disertai bukti nyata dan bukti konkrit yang kuat di lapangan. Kesediaan yang diklaim hanya sebatas pernyataan tanpa disertai dokumen perencanaan strategis, alokasi anggaran khusus, atau kebijakan teknis yang jelas. Komitmen yang disuarakan pun tidak terwujud dalam bentuk program kerja konkret, indikator keberhasilan, atau penguatan kelembagaan. Bahkan, kerja sama dengan pihak luar dan pelibatan masyarakat belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perkembangan taman wisata. Tindakan yang dilakukan, seperti pembentukan Pokdarwis, gotong royong, dan perbaikan infrastruktur, juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Ketika dilakukan observasi langsung, taman anggrek tampak tidak aktif, tidak terawat, dan nyaris tidak ada aktivitas atau intervensi langsung dari pemerintah desa. Pemerintah Desa Siong hanya berperan pasif sebagai pengawal administratif desa tanpa menunjukkan kepemimpinan substantif dalam pembangunan pariwisata. Kesimpulannya, meskipun terdapat indikasi awal kesediaan, komitmen, dan tindakan, ketiganya tidak memenuhi standar *political will* yang kuat dan transformatif. belum ada kebijakan yang dijalankan secara konsisten, belum ada tindak lanjut yang terstruktur, dan tidak ada hasil nyata yang berdampak langsung pada revitalisasi taman. Taman Anggrek Hitam kini berada dalam kondisi "mati suri", mencerminkan lemahnya *political will* Pemerintah Desa Siong dalam menjadikan potensi lokal sebagai pilar pembangunan desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Siong perlu segera menyelesaikan pembentukan struktur pengelola yang jelas, seperti Pokdarwis dan Karang Taruna, dengan memastikan bahwa setiap anggota pengelola memiliki tugas dan tanggung jawab yang terstruktur agar pengelolaan taman berjalan dengan lebih profesional dan terkoordinasi. Desa juga perlu memprioritaskan penyelesaian peraturan desa (perdes) yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan taman anggrek, termasuk struktur organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antara Pokdarwis dan pemerintah desa dan pengelolaan serta alokasi keuangan. Peraturan ini harus disusun melalui proses konsultatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan relevan untuk memastikan adanya rasa kepemilikan bersama dan komitmen dalam implementasinya.
2. Masyarakat Desa Siong perlu terus dilibatkan dalam pengelolaan taman anggrek, terutama dalam program-program pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan ekowisata dan konservasi yang dapat difokuskan pada aspek-aspek seperti manajemen pengunjung, pemasaran destinasi, interpretasi dan edukasi lingkungan, serta pengelolaan keuangan. Ini akan memastikan bahwa pengelolaan taman tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kesadaran lingkungan dan pelestarian flora lokal. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Pokdarwis dan aparatur desa dalam manajemen destinasi wisata. Program pelatihan dan pendampingan Peningkatan kapasitas berfungsi secara efektif dan profesional dalam mengelola taman anggrek sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan.
3. Mengingat keterbatasan dana desa, pemerintah desa harus memperluas kerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta, lembaga donor, dan program CSR untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan fasilitas

wisata, kolaborasi ini dapat dirancang dalam format adopsi tanaman anggrek, sponsor untuk pengembangan infrastruktur, atau dukungan untuk program pelatihan bagi pengelola taman dan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga bisa mengeksplorasi pendanaan alternatif, seperti penggalangan dana masyarakat atau partisipasi pengunjung melalui program donasi dan secara aktif mencari bantuan dari program pemerintah. Pemerintah desa dapat mengalokasikan sebagian dana desa secara khusus untuk pengembangan taman anggrek, dengan mempertimbangkan potensi investasi tersebut. Perlu dilakukan juga pengembangan model bisnis sosial seperti paket kunjungan edukasi tentang anggrek, program adopsi anggrek oleh pengunjung, penjualan bibit atau tanaman anggrek hasil budidaya, atau workshop tentang perawatan anggrek bagi pengunjung yang Pendapatan dari aktivitas-aktivitas ini dapat digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan taman anggrek hitam.

4. Pemerintah desa perlu melaksanakan perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan menuju Taman Anggrek Hitam, agar pengunjung dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Perbaikan infrastruktur ini harus segera dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata, karena akses yang terbatas mengurangi minat pengunjung. Perlu adanya Penyusunan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang dapat membantu desa mengoptimalkan implementasi program pengembangan taman anggrek di tengah keterbatasan sumber daya seperti penataan taman melalui gotong royong dan pelabelan spesies anggrek untuk meningkatkan nilai edukasi dan dapat mencakup perbaikan infrastruktur secara bertahap dan pengembangan fasilitas tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan pendapatan taman.
5. Pemerintah desa perlu membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mengatasi kurang jelasnya pengelolaan dana. Semua pendapatan dari wisata harus tercatat dengan baik di APBDes dan dialokasikan untuk pengelolaan taman. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pemanfaatan dan pemeliharaan dana wisata dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan keuangan. Diperlukan juga mekanisme koordinasi

yang efektif, seperti pertemuan rutin dan sistem pelaporan yang transparan, untuk memastikan keselarasan tindakan dan pencapaian tujuan bersama.

6. Pemerintah desa perlu terus berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan pihak terkait di tingkat kabupaten atau provinsi Untuk mendukung promosi wisata. Pemerintah desa perlu pengoptimalkan penggunaan media sosial dan kampanye promosi wisata dapat membantu menarik lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar daerah. Pengembangan strategi pemasaran dan branding untuk taman anggrek dapat membantu menarik pengunjung dan potensi pendanaan. Desa dapat memanfaatkan kolaborasi dengan komunitas pecinta anggrek atau fotografer alam untuk mempromosikan keunikan taman anggrek desa. Strategi ini dapat membantu menciptakan aliran pengunjung dan pendapatan yang stabil untuk mendukung keberlanjutan finansial taman anggrek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan insfrastruktur. *Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.30872/jinv.v19i3.13670>
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), Article 1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Atraksi Adventure Coelogyne Pandurata - Kalimantan Tengah. (n.d.). *Jadesta Kalteng*. Retrieved April 26, 2025, from https://kalteng.jadesta.com/atraksi/adventure_coelogyne_pandurata
- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol 12, No. 3. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39400>
- Brady, S. R. (2015). Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. *International Journal Of Qualitative Methods*, 1–6. <https://doi.org/10.1177/1609406915621381>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Desa Wisata Taman Anggrek Hitam Magaram Persada Desa Siong. (n.d.-b). *Jadesta Kemenparekraf*. Retrieved April 26, 2025, from https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/taman_anggrek_hitam_magaram_persada_desa_siong
- Fauzy, A. (2015). *Political Will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap Pelestarian Satwa Di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. *Jom Fisip*, Vol.2 No.2, 4–9.
- Giorgi, A., & Giorgi, B. (2003). The Descriptive Phenomeno-Logical Psychological Method. *Qualitative Research in Psychology*, 243–273. <https://doi.org/10.1037/10595-013>

- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2015). *Tourism and water: Interactions, impacts, and challenges*. Channel View Publications. <https://doi.org/10.21832/9781845415369>
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p429-437>
- Hall, C. M. (2007). *Tourism planning: Policies, processes and relationships*. Pearson Education. <https://doi.org/10.4324/9780080455873>
- Hendryadi, Tricahyadinata. I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i2.3643>
- Krisnayuda. (2016). *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Manan, B. (1993). *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. UNSIKA.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Marpaung, H., & Bahar, H. (2000). *Pengantar Pariwisata*. Penerbit Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mowforth, M., & Munt, I. (2016). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the third world* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315744130>

- Pendong, A., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5), Article5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnaleksektif/article/view/29456>
- Sabandi, H., Masyhudi, L., & Athar, L. M. I. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. *Journal Of Responsible Tourism*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.47492/jrt.v3i1.2723>
- Sahyana, Y. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 157–181. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>
- Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sholeh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, Vol.5 No.1, 32–52. <https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suparsa, A., & Widnyana, I. K. (2020). Pengelolaan pariwisata berkelanjutan: Komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 15(2), 45-58.
- Eko, Sutoro. (2021) *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: STPMD “APMD”, Jurnal Governabilitas Vol. 2 No. 1.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka. <https://osf.io/auqfr>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.
<https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>

Taman Konservasi Anggrek Hitam—Berwisata. (2022).
<https://berwisata.kalteng.go.id/wisata/taman-konservasi-anggrek-hitam/>

Tohir, R., Purnamasari, H., & Aditya, I. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Wisata (Studi Kasus pada Desa Wisata Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung). *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5242>

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management Journal*, 21(6), 613–633

Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.

Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), Article 5.

Wibowo, A. (2019). *Pariwisata berbasis masyarakat di kawasan konservasi*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Zainudin, A. (2016). (PDF) Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol 1 No. 2*, 332. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.607>

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (1999). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Tumbuhan yang Dilindungi.
<https://www.menlhk.go.id>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. Diambil 6 Juli 2024, dari
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014. Diambil 3 Juli 2024, dari
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38577/uu-no-4-tahun-2014>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Diambil 3 Juli 2024, dari
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

LAMPIRAN



Foto wawancara bersama Ibu Nadilla selaku kepala urusan umum Desa Siong



Foto wawancara bersama Kepala Desa Siong Bapak Meiyanto



Foto wawancara bersama ketua BPD Bapak Raedi Andrang



Foto wawancara bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Ibu Setyoningsih



Foto wawancara bersama karang taruna Ibu Yenni Anugrahni



Foto wawancara bersama masyarakat lokal Bapak Derman



Foto wawancara bersama sekretaris Desa Siong Ibu Dina Mariana



Foto tempat untuk beristirahatnya
pengunjung yang atap dan tempat
duduk nya sebagian rusak



Foto *grand house* untuk acara



Foto wahana mancakrida *outbound*
yang tidak bisa digunakan





Foto fasillitas toilet umum



Foto menara pantau yang sebagian kayunya sudah rapuh

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Jabatan :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Usia :

DAFTAR PERTANYAAN

A. Kesiediaan

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai potensi wisata taman anggrek hitam?
4. Seperti apa kesulitan atau hambatan yang dialami dalam proses mendapatkan dukungan pemerintah desa dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam?
5. Seperti apa faktor utama yang mempengaruhi kesiediaan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan wisata taman anggrek hitam?

B. Komitmen

1. Seperti apa langkah-langkah strategis yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan wisata taman anggrek hitam?
2. Bagaimana alokasi anggaran desa terhadap pengembangan wisata taman anggrek?
3. Seperti apa komitmen yang telah diberikan oleh pemerintah desa untuk pengembangan wisata taman anggrek hitam?

C. Tindakan/Aksi

1. Bagaimana implementasi program-program yang telah direncanakan untuk pengembangan wisata taman anggrek hitam?
2. Seperti apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan tindakan yang telah diambil dalam pengembangan wisata taman anggrek hitam?
3. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain (misalnya, sektor swasta, komunitas lokal)? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasamanya?

PENUJUKKAN DOSEN PEMBIMBING



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 021/PEM/J/TV/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Daniel Setiadi
No. Mahasiswa	: 19520131
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 5 April 2024
Judul Proposal	: Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. (Studi di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah).

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 4 April 2024

Ketua Program Studi

El Samaloisa

PERMOHONAN SURAT IJIN

Perihal: Permohonan Penerbitan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan S-1

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Di tempat

Dengan Hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Daniel Setiadi
NIM	:	19520131
Program studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian	:	<i>Political Will</i> Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam Di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Lokasi Penelitian	:	Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
Dosen Pembimbing	:	Analius Giawa, S.IP., M.SI

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Menyetujui ,

Dosen pembimbing

Peneliti

(Analius Giawa, S.IP., M.SI)

(Daniel Setiadi)

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA.)

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN PAJU EPAT
DESA SIONG
Jalan Damang Garif no.Telp-Kode Pos 73611

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 249 / Pem-DS / VIII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DANIEL SETIADI
No Mhs : 19520131
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD" Yogyakarta
Universitas : Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas
Yogyakarta
Judul Skripsi : Political Will Pemerintahan Desa Dalam
Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam
(Penelitian di Desa Siong, Kecamatan Paju Epat,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah).
Lama Penelitian : 1 Bulan
Tempat Penelitian : Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah .

Bahwa nama tersebut di atas telah mengadakan Penelitian tentang "**Political Will Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Hitam**" Di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) bulan. Penelitian tersebut sebagai persyaratan untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan semestinya.

Siong, 27 Agustus 2024
Kepala Desa Siong


MEIYANTO